



RPJMD KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 - 2026



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

**KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2021 - 2026**



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**
Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Timur, Desa Lalingato, Kode Pos 93582

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
Daftar Grafik	x
BAB 1 Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-11
1.5 Sistematika Penulisan	I-11
BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2 Topografi dan Kelerengan	II-4
2.1.1.3 Geologi dan Jenis Tanah	II-9
2.1.1.4 Sumber Daya Air (Hidrologis)	II-14
2.1.1.5 Klimatologi	II-16
2.1.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan	II-22
2.1.2 Demografi	II-27
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah	II-29
2.1.4 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-31
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
2.2.1 Pembangunan Manusia	II-38
2.2.2 Capaian Bidang Kesehatan	II-39
2.2.3 Capaian Bidang Pendidikan	II-40
2.2.4 Pengeluaran Riil	II-41
2.2.5 Disparitas IPM Kabupaten Kolaka Timur	II-41
2.2.6 Koperasi dan Perbankan	II-43
2.2.7 Kesejahteraan Sosial	II-45
2.2.8 Industri	II-46
2.2.9 Energi / Listrik	II-49
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-50
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-50
2.3.1.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar	II-50
2.3.1.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar	II-61
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-69
2.3.2.1 Pariwisata	II-69
2.3.2.2 Pertanian	II-71
2.3.2.3 Wilayah Rawan Pangan	II-73
2.3.2.4 Perikanan	II-76
2.3.2.5 Transmigrasi	II-77
2.3.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	II-79
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-110



BAB 3	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.1.1	Pendapatan	III-7
3.1.1.2	Belanja Daerah	III-12
3.1.2	Neraca Daerah	III-13
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-20
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-21
3.2.2	Analisis pembiayaan Daerah	III-23
3.3	Kerangka Pendanaan	III-25
3.3.1	Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah.....	III-25
3.3.2	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-27
3.3.2.1	Pendapatan Daerah	III-27
3.3.2.2	Belanja Daerah	III-30
3.3.3	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-33
BAB 4	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-2
A.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-2
B.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-6
C.	Urusan Pilihan Pemerintahan.....	IV-12
D.	Urusan Penunjang Pemerintahan	IV-16
4.2	Isu – Isu Strategi	IV-23
4.2.1	Isu Strategis Global	IV-22
4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV-32
4.2.3	Isu Strategis Provinsi	IV-35
4.2.4	Isu- Isu Strategis Daerah	IV-46
BAB 5	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-10
BAB 6	Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	VI-1
6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VI-5
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-10
BAB 7	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	VII-1
BAB 8	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VIII-1
BAB 9	Penutup	IX-1



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW, RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan daerah yang telah dicapai sebelumnya. Langkah-langkah ini dijabarkan ke dalam sebuah visi, misi melalui arahan kebijakan, dan rencana strategis serta program-program pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2021– 2026.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten serta RPJPD Kabupaten, selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahunan yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Demikian pula dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 disusun untuk menjabarkan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi Perencanaan antar level pemerintahan dalam jangka menengah baik dalam hal program pembangunan di daerah, provinsi, maupun pusat, maka RPJMD Kabupaten Kolaka Timur disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 yang telah ditetapkan lebih dahulu. selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kolaka Timur dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kolaka Timur dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kolaka Timur. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjawab dan mewujudkan empat pertanyaan dasar yaitu : (1) Arah pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana cara mencapainya dan (3) strategi apa yang perlu dilakukan (4) bagaimana mengendalikan dan mengevaluasi RPJMD.



Proses dokumen RPJMD dilakukan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan. Secara garis besar, tahapan penyusunan RPJMD, dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD, Persiapan penyusunan RPJMD meliputi: pembentukan tim penyusunan dengan keputusan kepala daerah, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
2. Penyusunan rancangan awal RPJMD Dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
3. Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi.
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.
6. Penetapan RPJMD Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kolaka Timur, yang telah dievaluasi Provinsi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.



Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep rencana pembangunan nasional dan provinsi, karenanya dalam menyusun program pembangunan daerah tetap mengacu kepada rencana pembangunan nasional dan provinsi, baik rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Selain itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga harus memuat skenario pembangunan yang berasaskan berkelanjutan berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun



- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 Nomor 6);



35. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 55);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 78);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian maka pola hubungan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat sasaran pokok Pembangunan Nasional beserta serangkaian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional salah satunya adalah mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan nasional dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 dijelaskan bahwa RPJMD harus berpedoman pada RPJMN.

Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 adalah pada misi daerah yang mendukung Nawacita sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026

RPJMN TAHUN 2020-2024		RPJMD KAB. KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026	
VISI :		VISI :	
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN ERLANDASKAN GOTONG ROYONG		SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA TIMUR YANG AGAMIS, MAJU MANDIRI DAN BERKEADILAN	
MISI :		MISI :	
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal (Misi 1, dan 5 RPJMN)
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;	2	Peningkatan Akseibilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Misi 1 dan 3 RPJMN)
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;	3	Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif (Misi 2 dan 3 RPJMN)
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;	4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat (Misi 6, 8 dan 9 RPJMN)



5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;	5	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha (Misi 2, 3 dan 9 RPJMN)
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;	6	Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Misi 3, 5 dan 8 RPJMN)
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;	7	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya (Misi 1 dan 5 RPJMN)
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;	8	Mengembangkan Potensi Wisata (Misi 2, 3 dan 5 RPJMN)
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.	9	Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib (Misi 2, 6, 7 dan 8 RPJMN)
		10	Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Misi 4 dan 7 RPJMN)

b. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Agar selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan melakukan telaahan terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur.

Tabel 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023



RPJMD PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023	RPJMD KAB. KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026
VISI :	VISI :
TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT	SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA TIMUR YANG AGAMIS, MAJU MANDIRI DAN BERKEADILAN
MISI :	MISI :
1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Agar dapat Berdaulat dan Aman dalam Bidang Ekonomi, Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Politik, serta Iman dan Takwa	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal (Misi 1 RPJMD Provinsi)
2. Memajukan Daya Saing Wilayah melalui Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Investasi	2. Peningkatan Akseibilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Misi 1 RPJMD Provinsi)
3. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Provinsi yang Modern, Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (Good Village Governance) serta Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan	3. Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif (Misi 4 RPJMD Provinsi)
4. Meningkatkan Konektivitas dan Kemitraan Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur, Sosial Ekonomi	4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat (Misi 3 RPJMD Provinsi)
	5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha (Misi 1, 2 dan 4 RPJMD Provinsi)
	6. Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Misi 2, 3 dan 4 RPJMD Provinsi)
	7. Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya (Misi 1 RPJMD Provinsi)
	8. Mengembangkan Potensi Wisata (Misi 2 dan 4 RPJMD Provinsi)
	9. Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib (Misi 1, 2 dan 3 RPJMD Provinsi)
	10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Misi 1 dan 4 RPJMD Provinsi)

c. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya



berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJPD Provinsi dan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD, lintas OPD, dan program perwilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 masih berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 yang merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Kolaka Timur sebelum pemekaran pada Tahun 2013 terutama yang berkaitan erat pada arah kebijakan pembangunan tahap ketiga dan keempat RPJPD Kabupaten Kolaka.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara “KABUPATEN KOLAKA SEBAGAI DAERAH PERJUANGAN YANG AMAN, MAJU, BERBUDAYA, RELIGIUS, DEMOKRATIS, ADIL DAN SEJAHTERA”. melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 1.3 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

RPJPD KAB. KOLAKA TAHUN 2005-2025	RPJMD KAB. KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026
VISI :	VISI :
KABUPATEN KOLAKA SEBAGAI DAERAH PERJUANGAN YANG AMAN, MAJU, BERBUDAYA, RELIGIUS, DEMOKRATIS, ADIL DAN SEJAHTERA	SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA TIMUR YANG AGAMIS, MAJU MANDIRI DAN BERKEADILAN
MISI :	MISI :
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, Masyarakat dan Aparatur	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal (Misi 1



		dan 4 RPJPD Kolaka)
2.	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Adil dan Sejahtera	2. Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Misi 1 dan 4 RPJPD Kolaka)
3.	Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan	3. Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif (Misi 4 RPJPD Kolaka)
4.	Mewujudkan Infrastruktur yang Memadai	4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat (Misi 1 dan 4 RPJPD Kolaka)
5.	Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha (Misi 2 dan 3 RPJPD Kolaka)
6.	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Demokratis	6. Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Misi 2 dan 3 RPJPD Kolaka)
7.	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Optimal dan Berkelanjutan.	7. Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya (Misi 1 dan 5 RPJPD Kolaka)
		8. Mengembangkan Potensi Wisata (Misi 2, 3 dan 4 RPJPD Kolaka)
		9. Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib (Misi 3, 5 dan 6 RPJPD Kolaka)
		10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Misi 4 dan 7 RPJPD Kolaka)

d. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Lain

RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 senantiasa mengedepankan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan daerah Kabupaten lain di regional Provinsi Sulawesi Tenggara dengan



memperhatikan aspek prioritas bersama, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat serta kemampuan keuangan daerah masing-masing.

e. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan RKPD Kabupaten Kolaka Timur

RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026 dijabarkan setiap tahunnya ke dalam RKPD Kabupaten Kolaka Timur sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

f. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan Renstra PD Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

g. RPJMD Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kolaka Timur Tahun 2020-2040

Dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 sejalan dengan RTRW RTRW Kolaka Timur Tahun 2020-2040 untuk lebih fokus pada pembangunan kawasan- kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Alam.



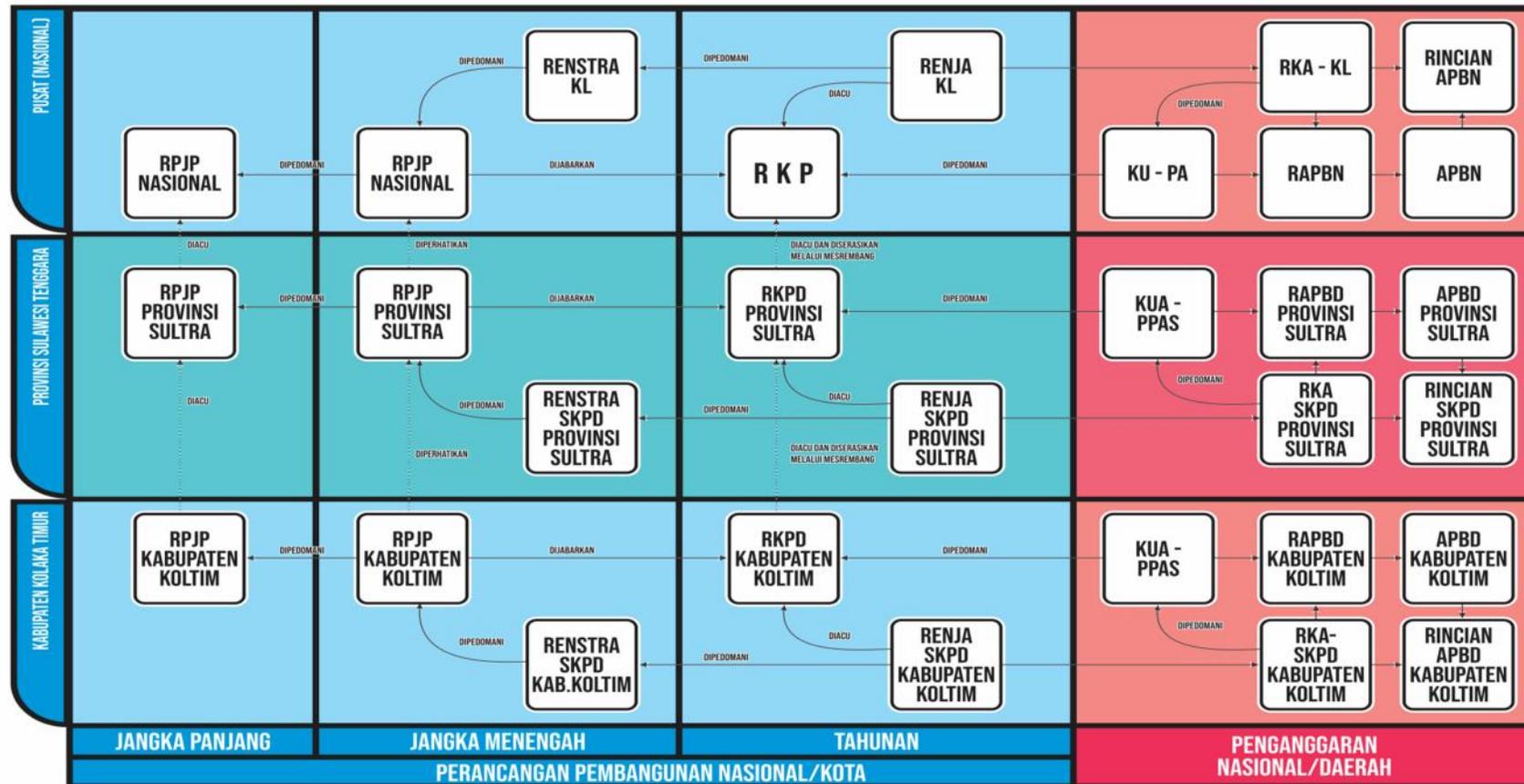
h. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 selain berkorelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tersebut di atas, juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sektoral Provinsi dan tingkat Nasional yang akan melibatkan Kabupaten Kolaka Timur sebagai wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa dokumen perencanaan tersebut antara lain :

1) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB); 2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Sulawesi Tenggara; 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK); 4) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG); 5) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM); 6) Grand Design Reformasi Birokrasi; 7) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 8) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tenggara; 9) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tenggara; 10) RAD Pengurangan Resiko Bencana; 11) Pedoman Pelaksanaan PUG di Sulawesi Tenggara; dan 12) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD; dan beberapa dokumen perencanaan sektoral lainnya.



Gambar 1-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



KETERANGAN :

- : KETERKAITAN DOKUMEN PADA SATU TINGKATAN PEMERINTAH
- > : KETERKAITAN DOKUMEN ANTAR TINGKAT PEMERINTAH

- DIACU : HAL-HAL YANG DIANGGAP YANG TERMUAT DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMILIKI HIRARKI LEBIH TINGGI
- DIPERHATIKAN : MEMPERTIMBANGKAN DAN MENYERTAKAN HAL-HAL YANG DIANGGAP SEJALAN YANG TERMUAT DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMILIKI HIRARKI LEBIH TINGGI
- DIJABARKAN : MENINDAK LANJUTI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMILIKI HIRARKI LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI LEBIH SPESIFIK DAN IMPELEMENTATIF
- MEMPEDOMANI : MENJADIKAN MUATAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG MEMILIKI ARAH DAN KOORDINASI
- DISERASIKAN : MEMBAHAS DAN MENYELARASKAN MUATAN RENCANA PEMBANGUNAN DALAM FORUM MUSREMBANG



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur. dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Pedoman bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
3. Instrumen evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
4. Pedoman penyusunan Renstra OPD dan penyusunan program dalam RKPD setiap tahunnya;
5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



- 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026
- 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
- 7.2 Program Perangkat Daerah

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX. PENUTUP



BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kolaka Timur terletak di daratan Tenggara Pulau Sulawesi, dengan ibukota Kabupaten berkedudukan di Kecamatan Tirawuta. Kabupaten Kolaka Timur disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 3.634,74 Km². Adanya perubahan luas wilayah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040, dimana luas Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan seluas 3.991,78 Km², ini disebabkan oleh perubahan batas wilayah antar kabupaten. Secara administrasi Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas dua belas wilayah kecamatan, yaitu Ladongi, Lambandia, Tirawuta, Mowewe, Uluiwoi, Tinondo, Lalolae, Poli-Polia, Loea, Aere, Dangia, dan Ueesi.

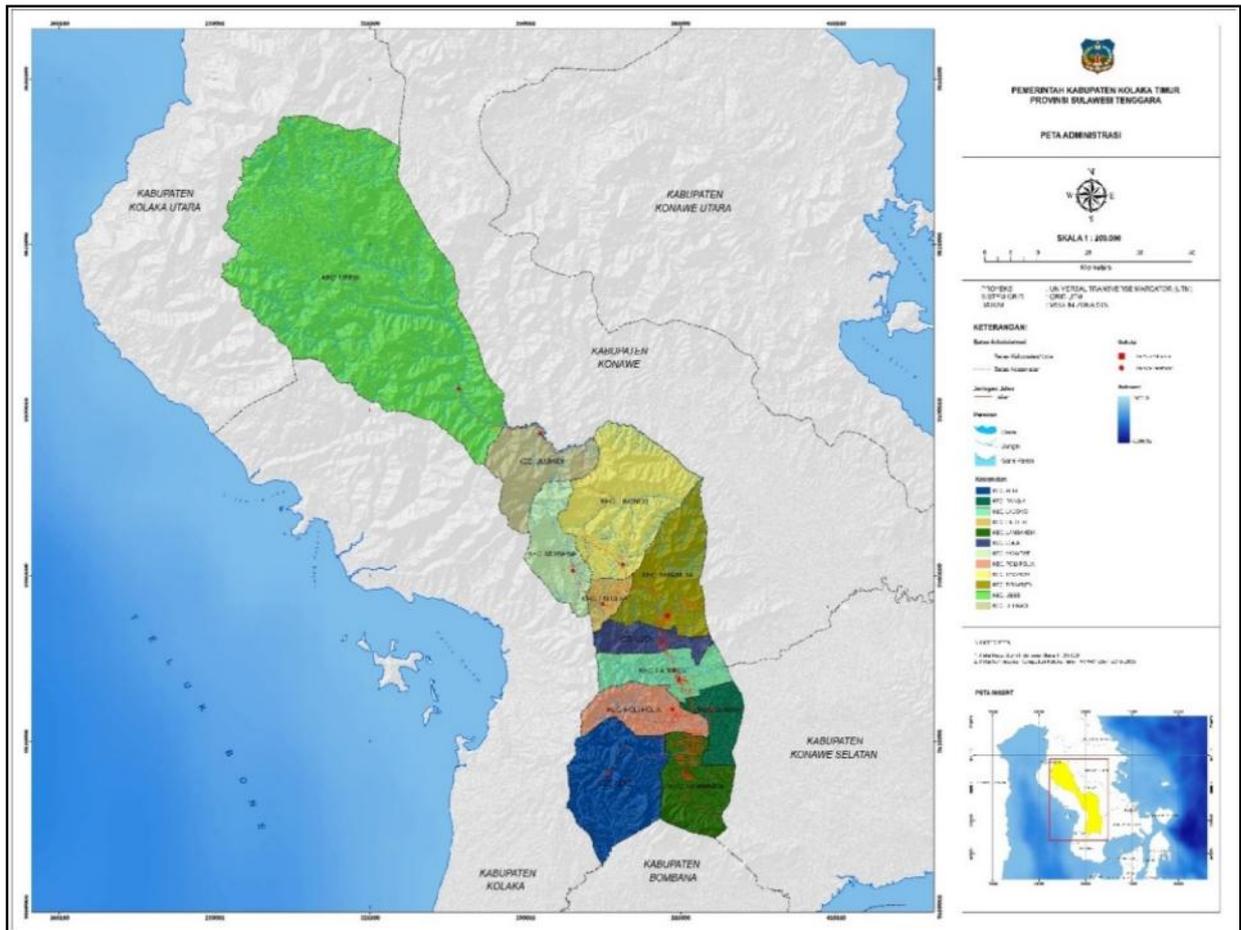
Kabupaten Kolaka Timur secara geografis terletak dibagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, memanjang dari Utara ke Selatan diantara 3°00'-4°30' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 121°45'-124°06' Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Kolaka Timur berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Kolaka Utara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Bombana
Sebelah Timur	: Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan
Sebelah Barat	: Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara



Gambar 2-1. Peta Administrasi Kabupaten Kolaka Timur



Sumber : UU. Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur

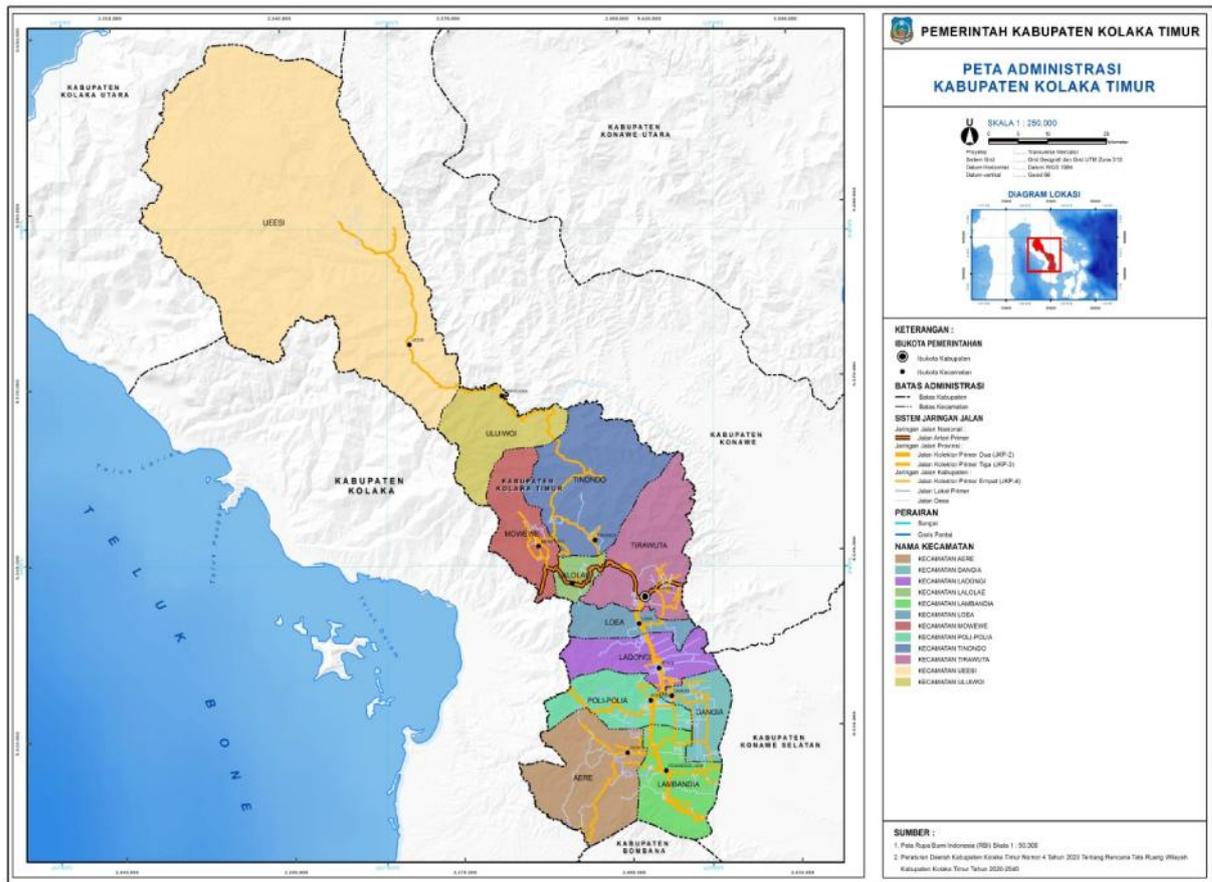
Tabel 2-1. Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah ± (Km ²)	Ibu Kota Kecamatan
1	Ladongi	122,88	Atula
2	Lambandia	133,00	PenanggoJaya
3	Tirawuta	206,80	Rate–Rate
4	Mowewe	155,29	Inebenggi
5	Uluiwoi	712,39	Sanggona
6	Tinondo	261,13	Tinondo
7	Lalolae	75,39	Lalolae
8	Poli – Polia	133,53	Poli–Polia
9	Aere	138,35	Aere
10	Dangia	172,72	Dangia
11	Loea	107,94	Loea
12	Ueesi	1.435,32	Ueesi
KolakaTimur		3.634,74	

Sumber : UU. Nomor 8 Tahun 2013, Perda Kolaka dan Hasil Perhitungan.



Gambar 2-2. Peta Administrasi Kabupaten Kolaka Timur



Sumber : Perda No.4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.

Tabel 2-2. Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Menurut Kecamatan

No	NamaKecamatan	Luas Wilayah ± (Km ²)	Ibu Kota Kecamatan
1	Ladongi	165,5	Atula
2	Lambandia	194,85	PenanggoJaya
3	Tirawuta	290,11	Rate-Rate
4	Mowewe	176,72	Inebenggi
5	Uluiwoi	212,79	Sanggona
6	Tinondo	374,83	Tinondo
7	Lalolae	49,16	Lalolae
8	Poli – Polia	156,99	Poli-Polia
9	Aere	304,20	Aere
10	Dangia	105,28	Dangia
11	Loea	91,76	Loea
12	Ueesi	1869,5	Ueesi
Kolaka Timur		3.991,78	

Sumber: Perda No.4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.



2.1.1.2 Topografi dan Kelerengn

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan bentuk bentang alamnya (morfologinya) Kabupaten Kolaka Timur dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu pedataran di bagian barat, bergelombang dibagian tengah dan pegunungan di bagian Timur. Ketiga bentuk bentang alam tersebut juga memanjang dari Utara Barat Laut ke Tenggara. Kondisi demikian tidak lepas dari proses pembentukan Pulau Sulawesi khususnya bagian timur yang berupa obduksi (tumbukan). Selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-3, Tabel 2-4, dan Gambar 2-3.

Tabel 2-3. Luas Satuan Geomorfologi Per-Kecamatan Kabupaten Kolaka timur

Nama Kecamatan	Satuan Geomorfologi	Luas (Hektar)	Persentase (%)
Aere	Pedataran	3.827,01	0,96
	Pegunungan	16.297,62	4,08
	Perbukitan	10.295,37	2,58
Dangia	Pedataran	10.528,25	2,64
Ladongi	Pedataran	8.107,57	2,03
	Pegunungan	1.922,92	0,48
	Perbukitan	6.529,03	1,64
Lalolae	Pedataran	1.951,83	0,49
	Pegunungan	490,31	0,12
	Perbukitan	2.473,38	0,62
Lambandia	Pedataran	14.371,32	3,60
	Pegunungan	4.212,21	1,06
	Perbukitan	901,70	0,23
Loea	Pedataran	3.208,88	0,80
	Pegunungan	906,41	0,23
	Perbukitan	5.060,44	1,27
Mowewe	Pedataran	2.125,21	0,53
	Pegunungan	12.229,65	3,06
	Perbukitan	3.316,69	0,83
Poli-polia	Pedataran	6.161,28	1,54
	Pegunungan	3.586,10	0,90
	Perbukitan	5.951,66	1,49
Tinondo	Pedataran	3.571,51	0,89
	Pegunungan	22.740,16	5,70
	Perbukitan	11.171,63	2,80
Tirawuta	Pedataran	4.570,92	1,15

	Pegunungan	13.633,96	3,42
	Perbukitan	10.805,87	2,71
Ueesi	Pegunungan	186.950,70	46,83
Uluiwoi	Pegunungan	21.278,90	5,33
Total		399.178,46	100

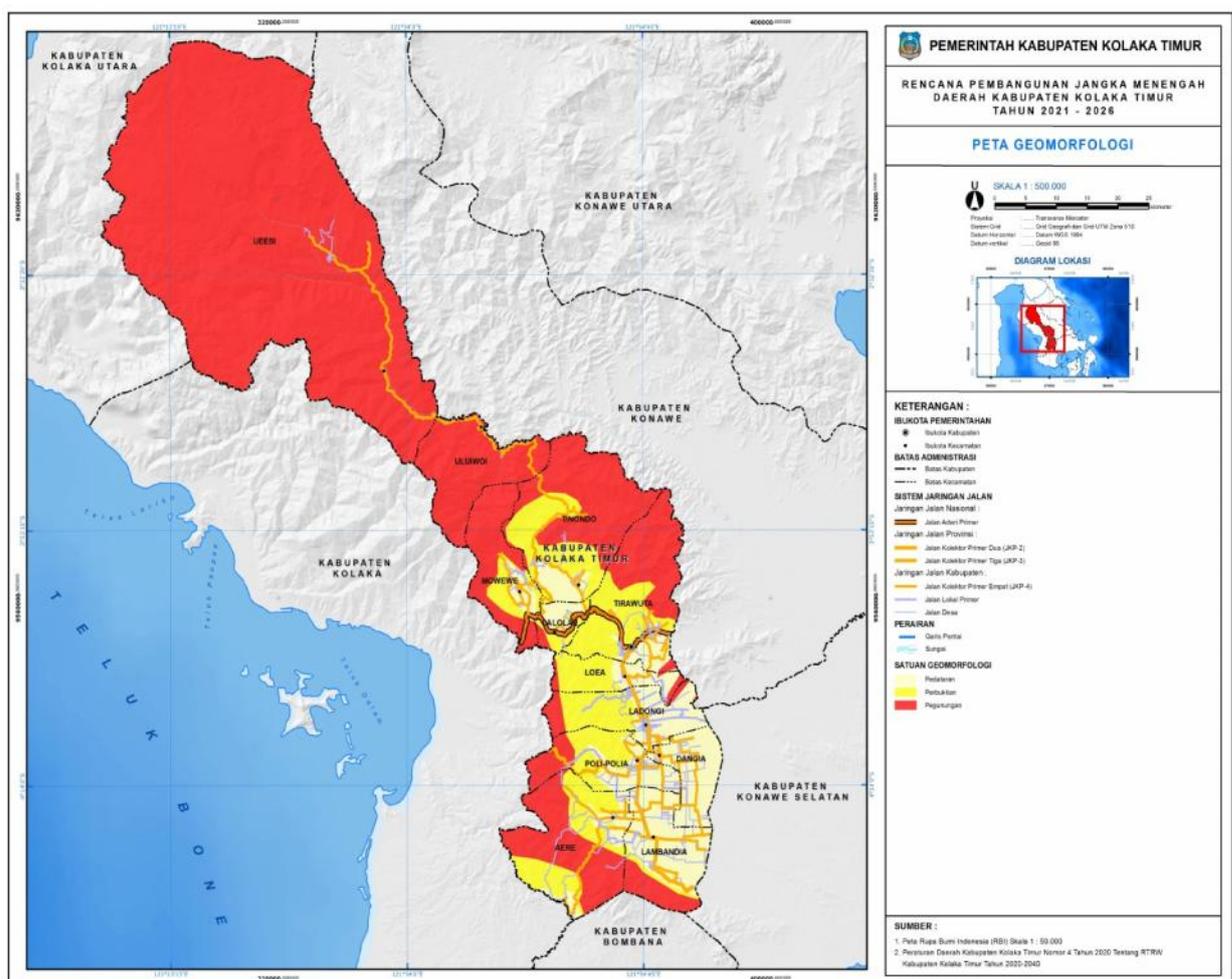
Sumber: Perda No.4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.

Tabel 2.4. Luas Satuan Geomorfologi Kabupaten Kolaka Timur

No.	Klasifikasi Geomorfologi	Luas (Ha)	(%)
1.	Pedataran	58.423,77	14,64
2.	Pegunungan	284.248,94	71,20
3.	Perbukitan	56.505,75	14,16
	Total	399.178,46	100

Sumber: Perda No.4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.

Gambar 2.3. Peta Geomorfologi Kabupaten Kolaka Timur



Ketinggian diklasifikasikan dalam empat kelas yaitu 0-250 MDPL, 250-500 MDPL, 500-1500 MDPL dan 1500-3000 MDPL. Ketinggian yang paling dominan yaitu 500-1500 MDPL dengan luas 185.248,22 Ha atau 46,41%, sedangkan yang paling rendah berada pada ketinggian 1500-3000 MDPL dengan luas 27.091,47 Ha atau 6,79%. Selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-5, Tabel 2-6 dan Gambar 2.4.

Tabel 2-5. Luas Satuan Topografi Kabupaten Kolaka Timur

No	Ketinggian	Luas (Ha)	%
1.	0-250 MDPL	87.660,40	21,96
2.	250-500 MDPL	99.178,36	24,85
3.	500-1500 MDPL	185.248,22	46,41
4.	1500-3000 MDPL	27.091,47	6,79
Jumlah		399.178,45	100.00

Sumber : Perda No.4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.

Tabel 2-6. Luas Satuan Topografi Per-Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur

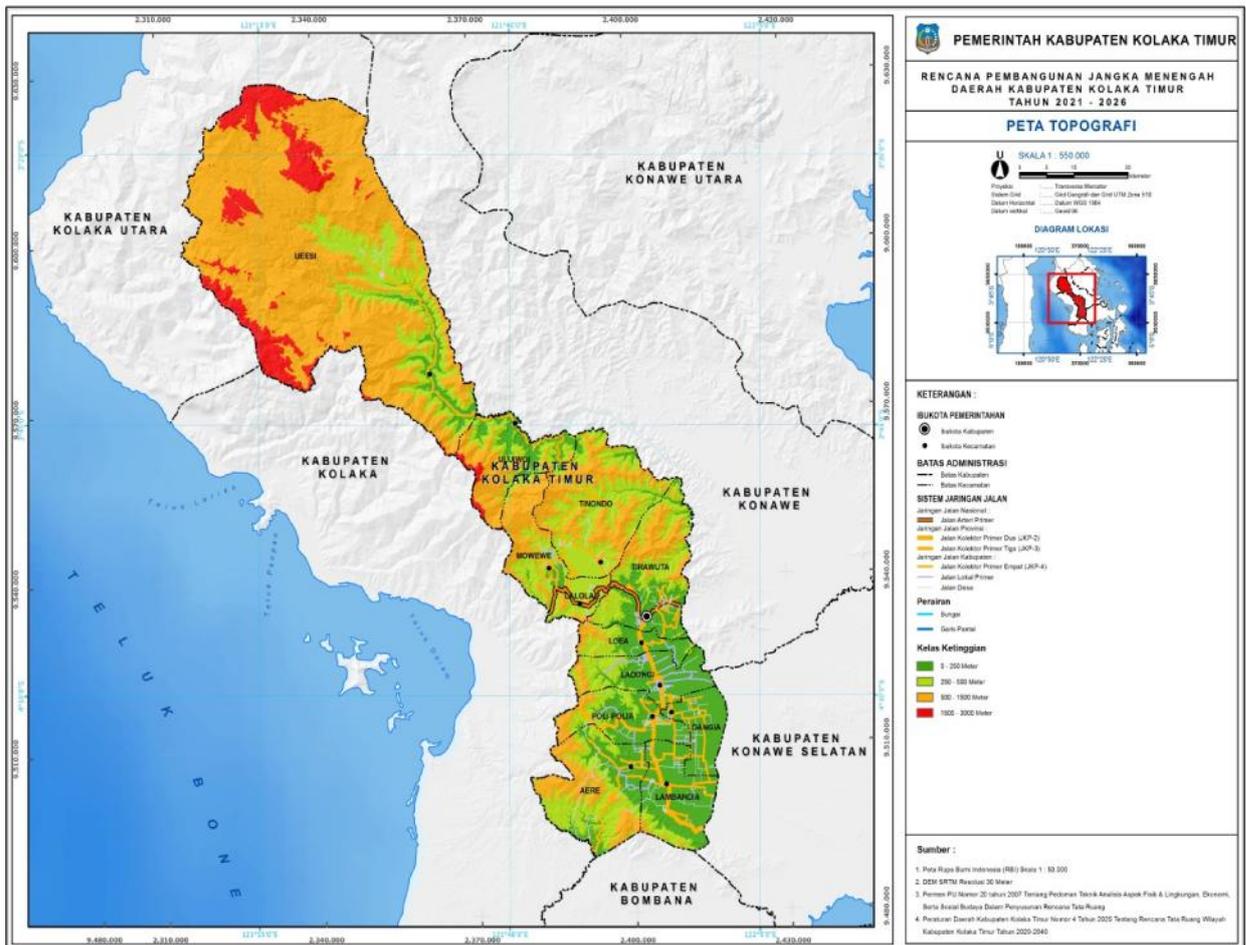
No	Kecamatan	Ketinggian	Luas (Ha)	%
1.	AERE	0-250 MDPL	9.186,28	2,30
		250-500 MDPL	12.138,73	3,04
		500-1500 MDPL	9.094,99	2,28
2.	DANGIA	0-250 MDPL	10.528,24	2,64
3.	LADONGI	0-250 MDPL	11.427,20	2,86
		250-500 MDPL	4.004,42	1,00
		500-1500 MDPL	1.127,89	0,28
4.	LALOLAE	250-500 MDPL	4.385,55	1,10
		500-1500 MDPL	529,97	0,13
5.	LAMBANDIA	0-250 MDPL	17.063,71	4,27
		250-500 MDPL	1.919,84	0,48
		500-1500 MDPL	501,68	0,13
6.	LOEA	0-250 MDPL	4.907,45	1,23
		250-500 MDPL	2.861,31	0,72
		500-1500 MDPL	1.406,97	0,35
7.	MOWEWE	0-250 MDPL	1.350,07	0,34
		1500-3000 MDPL	14,43	0,00
		250-500 MDPL	7.776,24	1,95
		500-1500 MDPL	8.530,81	2,14



8.	POLI-POLIA	0-250 MDPL	9.616,91	2,41
		250-500 MDPL	3.971,29	0,99
		500-1500 MDPL	2.110,83	0,53
9.	TINONDO	0-250 MDPL	1.015,67	0,25
		250-500 MDPL	21.136,48	5,29
		500-1500 MDPL	15.331,14	3,84
10.	TIRAWUTA	0-250 MDPL	10.566,07	2,65
		250-500 MDPL	11.226,66	2,81
		500-1500 MDPL	7.218,03	1,81
11.	UEESI	0-250 MDPL	5.908,58	1,48
		1500-3000 MDPL	25.872,22	6,48
		250-500 MDPL	24.274,60	6,08
		500-1500 MDPL	130.895,30	32,79
12.	ULUIWOI	0-250 MDPL	6.090,23	1,53
		1500-3000 MDPL	1.204,82	0,30
		250-500 MDPL	5.483,24	1,37
		500-1500 MDPL	8.500,60	2,13
Total			399.178,45	100,00

Sumber : Perda No.4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.

Gambar 2-4. Peta Topografi Kabupaten Kolaka Timur



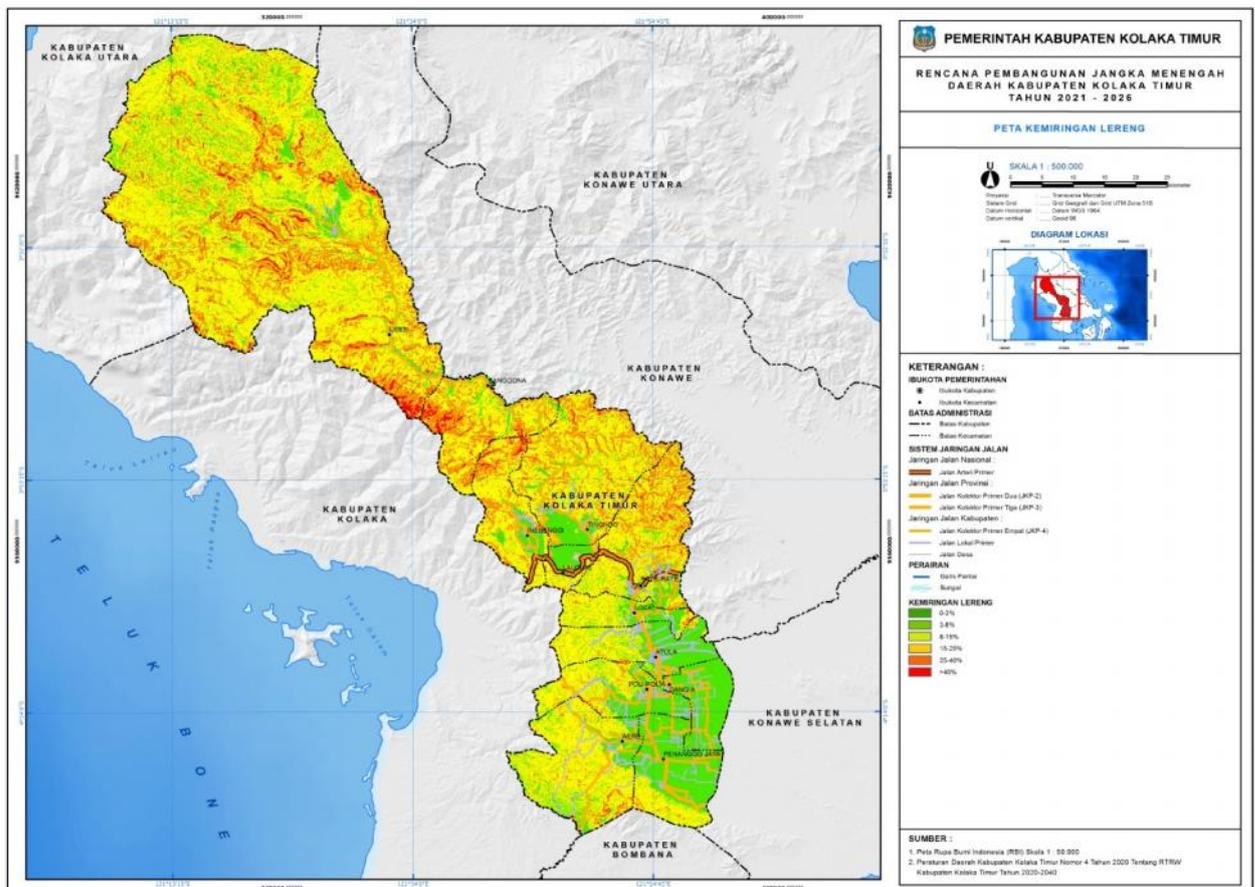
Kondisi topografi yang demikian ini pula mengakibatkan banyak terdapat sungai kecil yang mengalir dari wilayah topografi perbukitan di Timur ke wilayah pedataran di Barat. Kemiringan lahan diklasifikasikan dalam enam kelas lereng yaitu 0 – 3%, 3 – 8%, 8 –15%, 15 –25%, 25-40% dan lebih dari 40 %. Selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-7 dan Gambar 2-5.

Tabel 2-7. Luas Kelas Kemiringan Lereng Kabupaten Kolaka Timur

No	Kelas Lereng	Luas (Ha)	Luas (%)
1.	<0-3 %	63.270,69	15,85
2.	3-8 %	53.840,32	13,48
3.	8-15 %	80.900,99	20,27
4.	15-25%	140.193,49	35,12
5.	25-40%	55.590,13	13,93
6.	>40%	5.382,84	1,35
Jumlah		399.178,45	100,00

Sumber : Perda No.4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.

Gambar 2-5. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kolaka Timur



Tabel 2-7 menunjukkan Kemiringan lereng yang paling dominan adalah 15 –25% meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan luas 140.193,49 Ha atau 35,12% dan yang paling sedikit adalah >40% dengan luas 5.382,84 Ha atau 1,35% . Sedangkan daerah datar dengan kemiringan 0 % - 3% menempati areal seluas 63.270,69 Ha atau 15,85%.

2.1.1.3 Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan peta geologi lembar Lasusua – Kolaka Timur Sulawesi dan peta geologi lembar Kolaka Timur Sulawesi dengan skala 1:250.000 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G), Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral, Bandung 1993, serta kompilasi peta oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara (2005) wilayah Kabupaten Kolaka Timur tersusun oleh beberapa jenis batuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Penjelasan dari batuan yang tertua ke batuan yang termuda). Selengkapnya disajikan pada Tabel 2-8, Tabel 2-9 dan Gambar 2.6.

Tabel 2-8. Luas Formasi Geologi Kabupaten Kolaka Timur

Formasi/ Kompleks	Simbol	Umur Geologi	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Persen (%)
Aluvium	Qa	Jaman Kuarter (Kala Holosen), sekitar < 1 juta tahun yang lalu sampai sekarang.	kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan lumpur	24.105.16	6.15
Formasi Alangga	Qpa	Jaman Kuarter (Kala Plistosen), sekitar 1 juta tahun yang lalu.	Konglomerat dan batupasir	15.452.55	3.94
Formasi Boepinang	Tmpb	Jaman Tersier (Kala Pliosen), sekitar 13 juta tahun yang lalu.	Lempung pasiran, napal pasiran, dan batu pasiran	943.99	0.24
Formasi Langkowala	Tml	Jaman Tersier (Kala miosen), sekitar 25 juta tahun yang lalu.	Konglomerat, batupasir, dan batu lempung mengandung lensa batubara	10.865.23	2.77



Formasi Tokala	TRJt	Jaman Trias-Jurasekitar 152-158 juta tahun yang lalu.	Kalsilit, batu gamping, batupasir, serpih, napal dan batu sabak	5.675.52	1.45
Kompleks Mekongga	Pzm	Jaman Karbon sekitar 255 juta tahun yang lalu.	Sekis, genes, filit, kuarsit, batu sabak, dan sedikit pualam	242.631.40	61.92
Kompleks Pompangeo	MTPm	Jaman Tersier (Kala Paleosen), sekitar 58 juta tahun yang lalu.	Sekis mika, sekis glokofan, sekis amfibolit, sekis klorit, sekis genesan, pualam dan batugamping	25.322.85	6.46
Kompleks Ultramafik	Ku	Jaman Kapur, sekitar 135 juta tahun yang lalu	Harsburgit, dunit, wherlit, gabro, serpentinit basal, dolerit, diorit	6.549.80	1.67
Pualam Paleozoikum	Pzmm	Jaman Karbon sekitar 255 juta tahun yang lalu.	Pualam dan batu gamping terdaunkan	60.291.50	15.39
Jumlah				399.178	100.00

Sumber : Peta Geologi Lembar Lasusua-Kendari dan Lembar Kolaka Sulawesi Skala 1:250.000 Tahun 1993

Tabel 2-8. Menunjukkan bahwa formasi geologi terluas di Kabupaten Kolaka Timur adalah kompleks mekongga dengan jenis batuan Sekis, Genes, Filit, Kuarsit, Batu sabak, dan sedikit pualam seluas 242.631,40 Ha atau 61,92%. Sedangkan formasi geologi dengan luasan terkecil adalah formasi boepinang dengan jenis batuan lempung pasir, napal pasir, dan batu pasir seluas 943,99 Ha atau 0,24%.

Tabel 2-9. Luas Geologi Per-Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur.

Kecamatan	Geologi	Luas (Ha)	(%)
Aere	Formasi Langkowala	3078,49	0,77
	Formasi Mekongga	2597,54	0,65
	Formasi Pompangeo	20182,71	5,06
	Kompleks Ultramafik	4561,26	1,14
Dangia	Aluvium	7838,59	1,96
	Formasi Alangga	2382,55	0,60
	Formasi Langkowala	306,87	0,08
Ladongi	Aluvium	2430,84	0,61
	Formasi Alangga	3254,48	0,82
	Formasi Langkowala	237,55	0,06
	Formasi Menkongga	9488,42	2,38
	Kompleks Ultramafik	1148,23	0,29

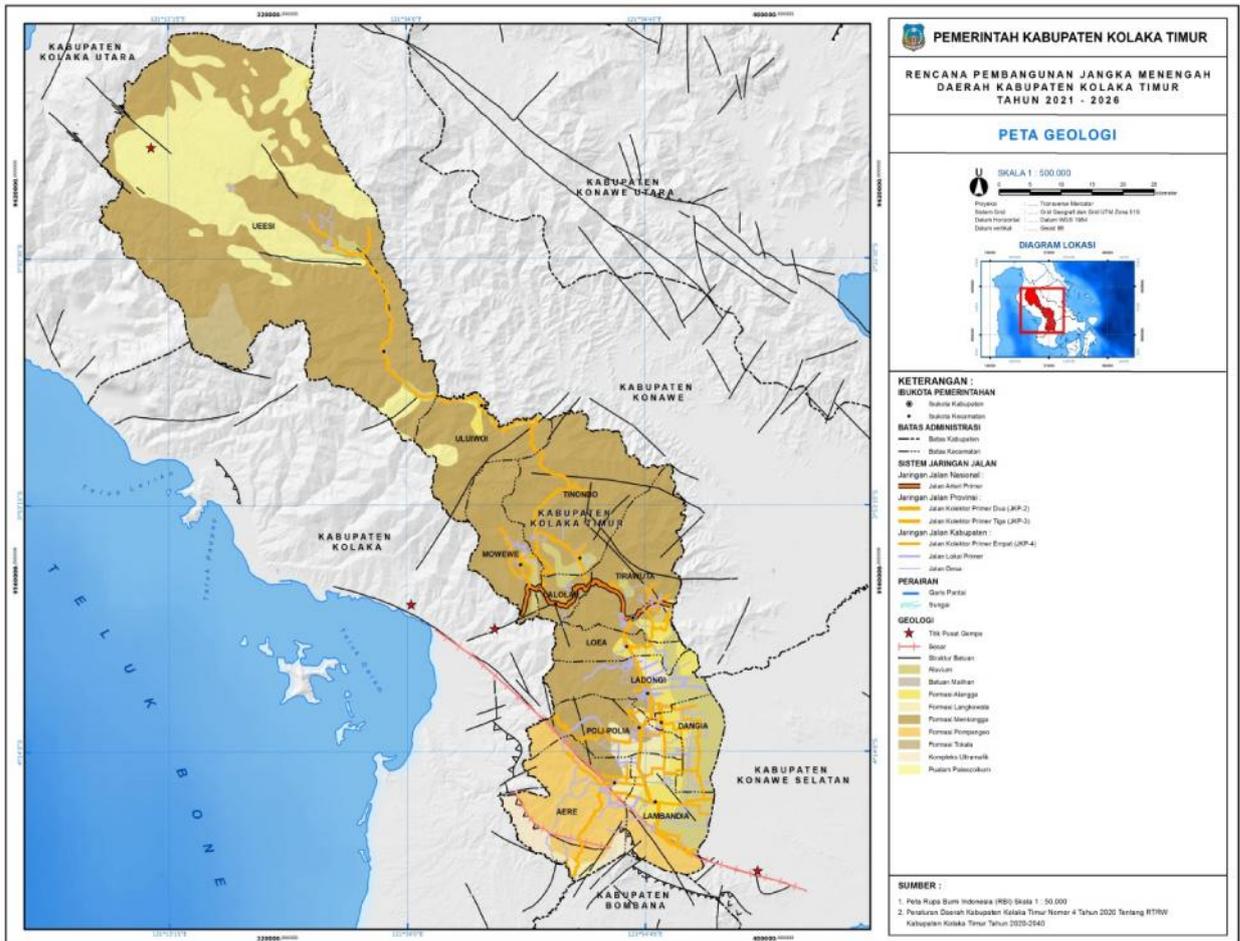


Lalolae	Aluvium	576,62	0,14
	Formasi Mekongga	4338,90	1,09
Lambandia	Aluvium	5809,26	1,46
	Formasi Alangga	4511,71	1,13
	Formasi Langkowala	3027,82	0,76
	Formasi Pompangeo	5659,61	1,42
	Kompleks Ultramafik	476,54	0,12
Loea	Aluvium	816,26	0,20
	Formasi Alangga	2127,27	0,53
	Formasi Mekongga	6224,50	1,56
	Kompleks Ultramafik	7,69	0,00
Mowewe	Aluvium	1044,97	0,26
	Formasi Mekongga	16626,57	4,17
Poli-polia	Formasi Alangga	1244,85	0,31
	Formasi Langkowala	3244,41	0,81
	Formasi Menkongga	9408,30	2,36
	Formasi Pompangeo	1785,59	0,45
	Kompleks Ultramafik	15,88	0,00
Tinondo	Aluvium	1761,95	0,44
	Formasi Mekongga	35721,35	8,95
Tirawuta	Aluvium	1477,20	0,37
	Formasi Alangga	1627,19	0,41
	Formasi Mekongga	25906,36	6,49
Ueesi	Aluvium	1914,95	0,48
	Batuan Malihan	183,44	0,05
	Formasi Alangga	140,67	0,04
	Formasi Mekongga	114336,98	28,64
	Formasi Tokala	8534,65	2,14
	Pualam Paleozoikum	61839,94	15,49
Uluiwoi	Aluvium	1579,17	0,40
	Formasi Alangga	686,04	0,17
	Formasi Mekongga	17691,53	4,43
	Pualam Paleozoikum	1322,15	0,33
Total		399.178	100,00

Sumber : Perda No.4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.



Gambar 2-6. Peta Geologi Kabupaten Kolaka Timur



Tanah dalam konteks kajian geografis yaitu sebagai tubuh alam yang menyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat dan perwatakannya yang khas dalam hal proses pembentukan, keterdapatn, dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia (Sartohadi at al., 2012). Kabupaten Kolaka Timur terdapat 6 jenis tanah berdasarkan luasannya antara lain jenis tanah Gleisol, Kambisol, Lateritik, Litosol, Mediteran dan Aluvial dengan total luasan yaitu 399.178 Ha. Hasil selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-10 dan Gambar 2-7.



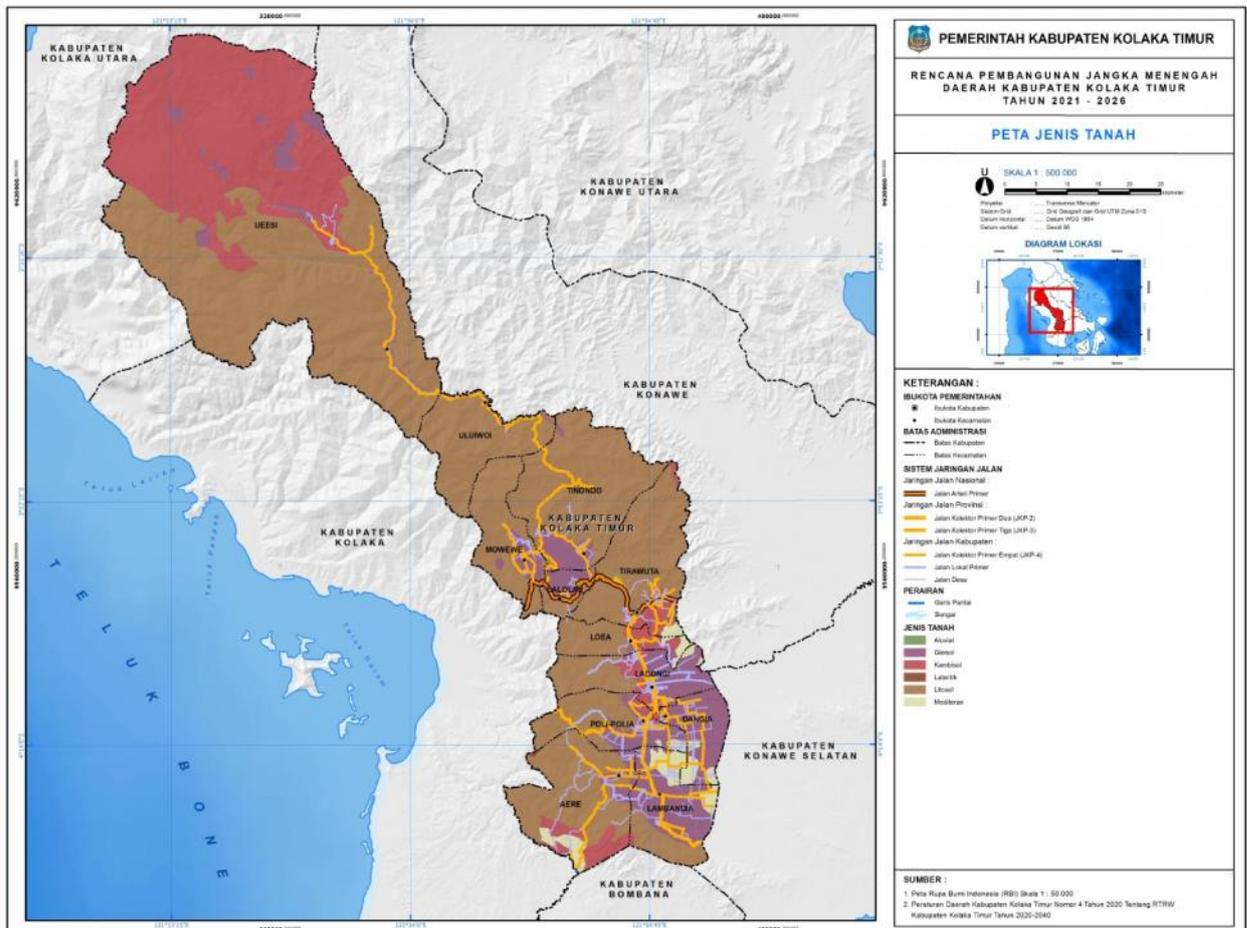
Tabel 2-10. Luas Jenis Tanah Kabupaten Kolaka Timur

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	%
1.	Gleisol	51.532,65	12,91
2.	Kambisol	98.316,70	24,63
3.	Lateritik	111,26	0,03
4.	Litosol	239.708,60	60,05
5.	Mediteran	9.157,83	2,29
6.	Aluvial	350,98	0,09
Jumlah		399.178	100

Sumber : Perda No.4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.

Tabel 2.10, menunjukkan bahwa dari enam jenis tanah di Kabupaten Kolaka Timur, jenis tanah yang paling luas adalah jenis Litosol seluas 239.708,60 Ha atau sebesar 60,05% dan jenis tanah yang paling rendah luasnya adalah jenis tanah Lateritik seluas 111,26 Ha atau sebesar 0,03%.

Gambar 2-7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Kolaka Timur



2.1.1.4 Sumber Daya Air (Hidrologis)

Prasarana sumber daya air adalah prasarana pengembangan sumber daya air untuk memenuhi berbagai kepentingan, utamanya untuk air bersih dan air irigasi. Pengembangan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan, sumber air tanah dan sumber mata air. Pengembangan sistem irigasi dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi diarahkan pada pengelolaan DAS yang terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah DAS Konawehea. Kabupaten Kolaka Timur memiliki beberapa sungai-sungai kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan. Sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-11 dan Gambar 2-8.

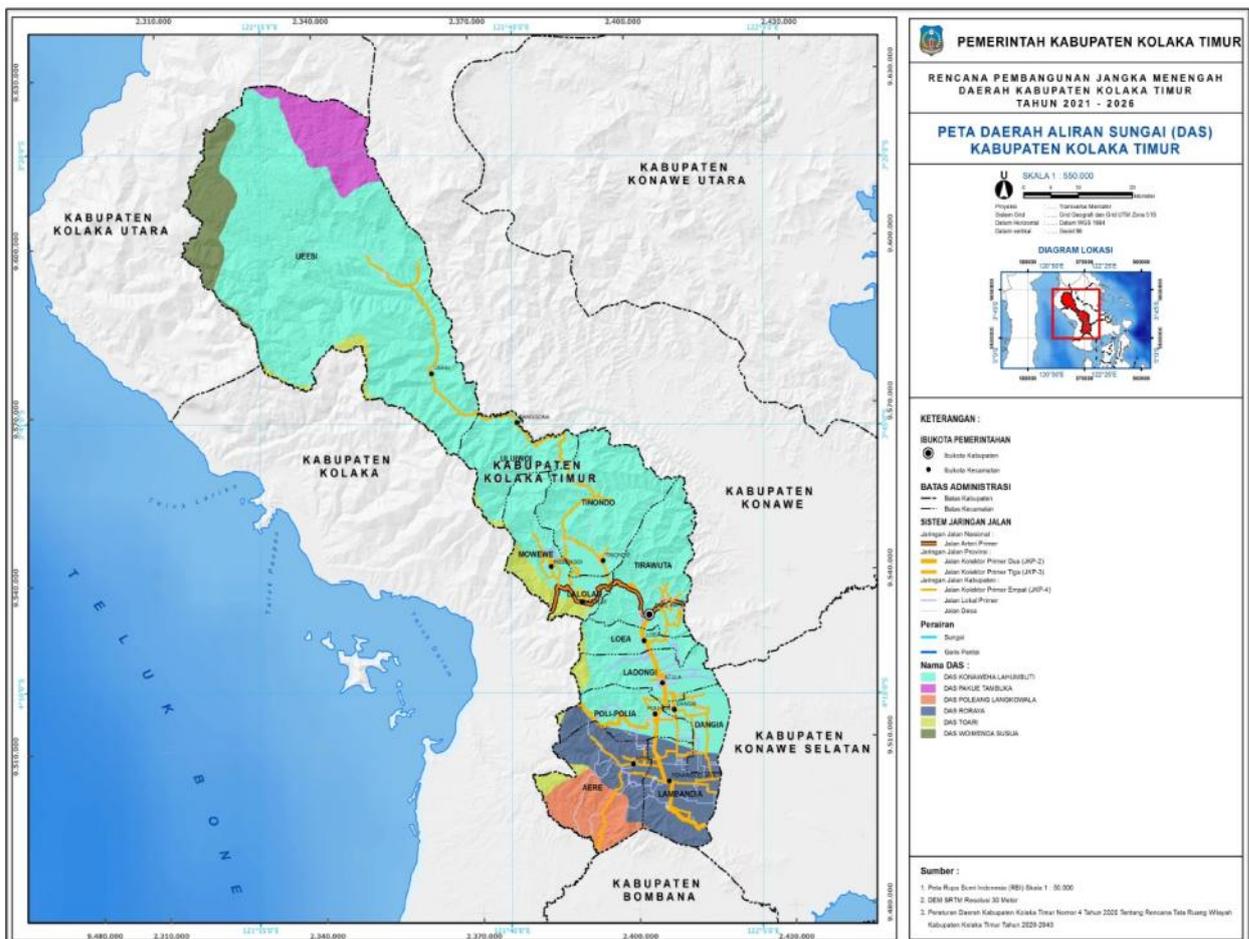
Tabel 2-11. Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kolaka Timur

NO.	DAS	KECAMATAN	LUAS	JUMLAH	%
1.	Das Konawehea Lahumbuti	Aere	5,48	296.004,37	74,15
		Dangia	8.590,71		
		Ladongi	15.165,00		
		Lalolae	3.049,37		
		Lambandia	417,22		
		Loea	8.750,24		
		Mowewe	12.743,02		
		Poli-Polia	12.152,68		
		Tinondo	37.483,29		
		Tirawuta	29.010,75		
		Ueesi	147.984,12		
		Uluiwoi	20.652,50		
2.	Das Pakue Tambuka	Ueesi	19.735,21	19.735,21	4,94
3.	Das Poleang Langkowala	Aere	14.216,21	14.288,38	3,58
		Lambandia	72,17		
4.	Das Roraya	Aere	14.130,83	38.392,98	9,62
		Dangia	1.937,53		
		Ladongi	17,01		
		Lambandia	18.995,84		
		Poli-Polia	3.311,76		

5.	Das Toari	Aere	2.067,49	14.256,43	3,57
		Ladongi	1.377,50		
		Lalolae	1.866,15		
		Loea	425,48		
		Mowewe	4.928,53		
		Poli-Polia	234,59		
		Ueesi	2.730,35		
		Uluiwoi	626,33		
6.	Das Woimenda Susua	Ueesi	16.501,01	16.501,01	4,13
TOTAL			399.178,39	399.178,39	100

Tabel 2-11, Menunjukkan bahwa DAS Konaweha Lahumbuti merupakan DAS terluas di Kabupaten Kolaka Timur yaitu 296.004,37 Ha atau 74,15%. Sedangkan DAS Toari merupakan DAS dengan luasan terendah di Kabupaten Kolaka Timur yaitu seluas 14.256,43 Ha atau 3,57%.

Gambar 2-8. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kolaka Timur



2.1.1.5 Klimatologi

Jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah 2.487,6 mm/tahun dengan jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 422,4 mm dan jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 78,6 mm. Sedangkan jumlah hari hujan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah 241 hari dengan jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Juni sebanyak 25 hari hujan dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 10 hari hujan. Keadaan curah hujan dan hari hujan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-12 dan Gambar 2-9.

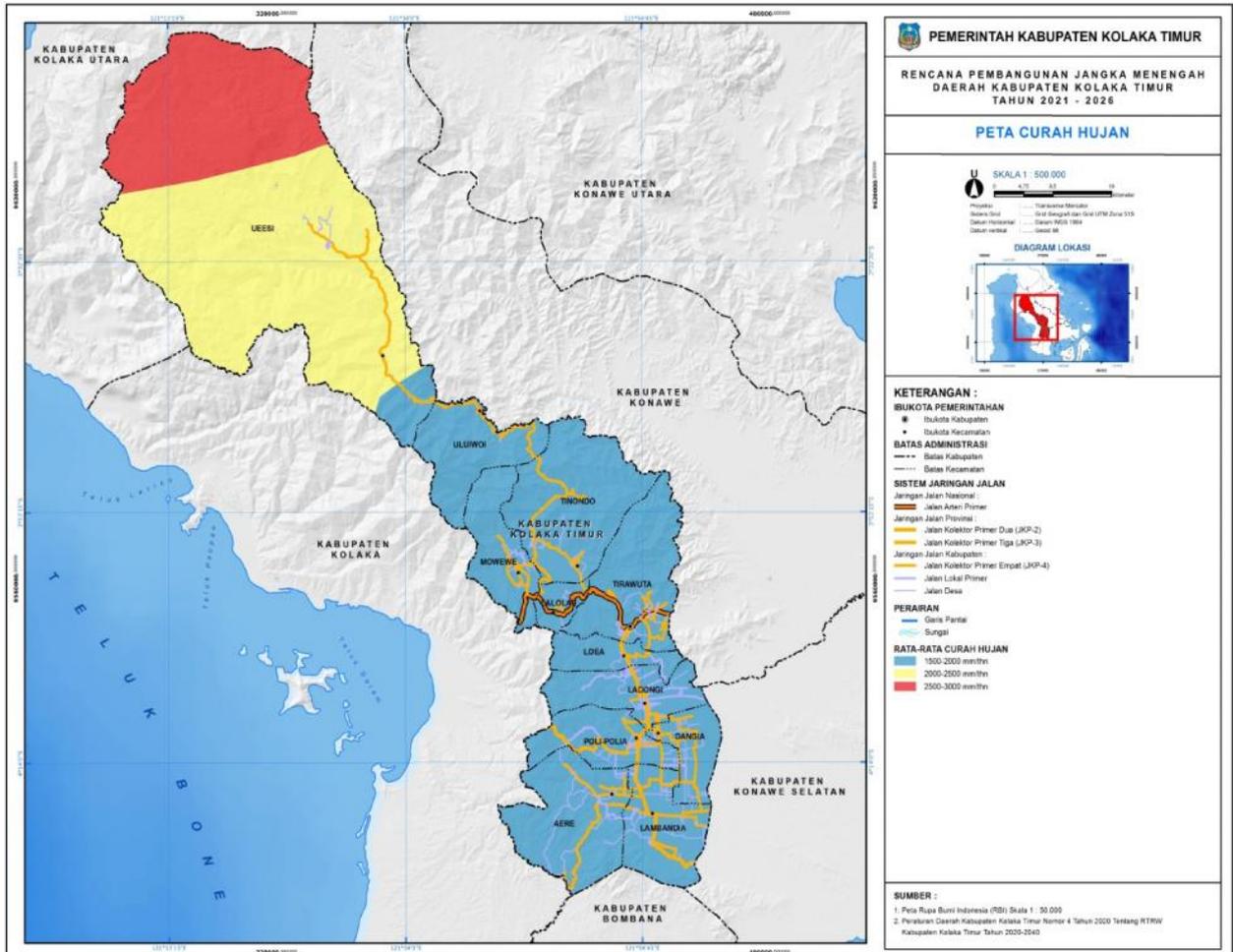
Tabel 2-12. Keadaan Curah Hujan dan Hari Hujan kabupaten Kolaka Timur

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
1.	Januari	147,5	21
2.	Februari	266,4	15
3.	Maret	315,7	24
4.	April	121,3	18
5.	Mei	422,4	25
6.	Juni	134,3	25
7.	Juli	143,9	22
8.	Agustus	78,6	10
9.	September	162,3	20
10.	Oktober	165,8	13
11.	November	260,0	27
12.	Desember	269,4	21
Jumlah		2.487,6	241

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur, 2021



Gambar 2-9. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kolaka Timur



Suhu udara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur berkisar antara 26,8-29,3°C. Suhu udara tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember yaitu 29,3°C dan suhu udara terendah terjadi pada bulan Juni dan Juli yaitu 26,8°C. Kelembaban udara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur berkisar antara 75-84%. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 84% dan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 75%. Suhu udara dan kelembaban udara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-13.



Tabel 2-13. Keadaan Suhu dan Kelembaban kabupaten Kolaka Timur

No.	Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)
1.	Januari	28,9	77
2.	Februari	28,7	78
3.	Maret	28,1	81
4.	April	28,5	80
5.	Mei	27,5	83
6.	Juni	26,8	84
7.	Juli	26,8	82
8.	Agustus	27,0	75
9.	September	27,9	76
10.	Oktober	28,8	77
11.	November	29,3	76
12.	Desember	29,3	76

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur, 2021

Arah angin dominan bulanan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur selama periode tahun 2009–2016. Kecepatan angin dominan berubah sesuai dengan pergantian musim. Wind Rose (Mawar angin) di wilayah Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2-14 dan Gambar 2-10; Gambar 2-11.

Tabel 2-14. Arah Angin Dominan dan Distribusi Frekuensi Kemunculan

No.	Bulan	Arah Dominan (dari)	Frekuensi Distribusi (%)		
			0,5-2,1 m/d	2,1-3,6 m/d	3,6-5,7m/d
1.	Januari	Barat Daya	11,11	-	-
		Barat	33,33	55,56	-
2.	Februari	Barat Daya	12,50	-	-
		Barat	75,00	-	12,50
3.	Maret	Barat Daya	11,11	-	-
		Barat	77,78	-	11,11
4.	April	Utara	11,11	-	-

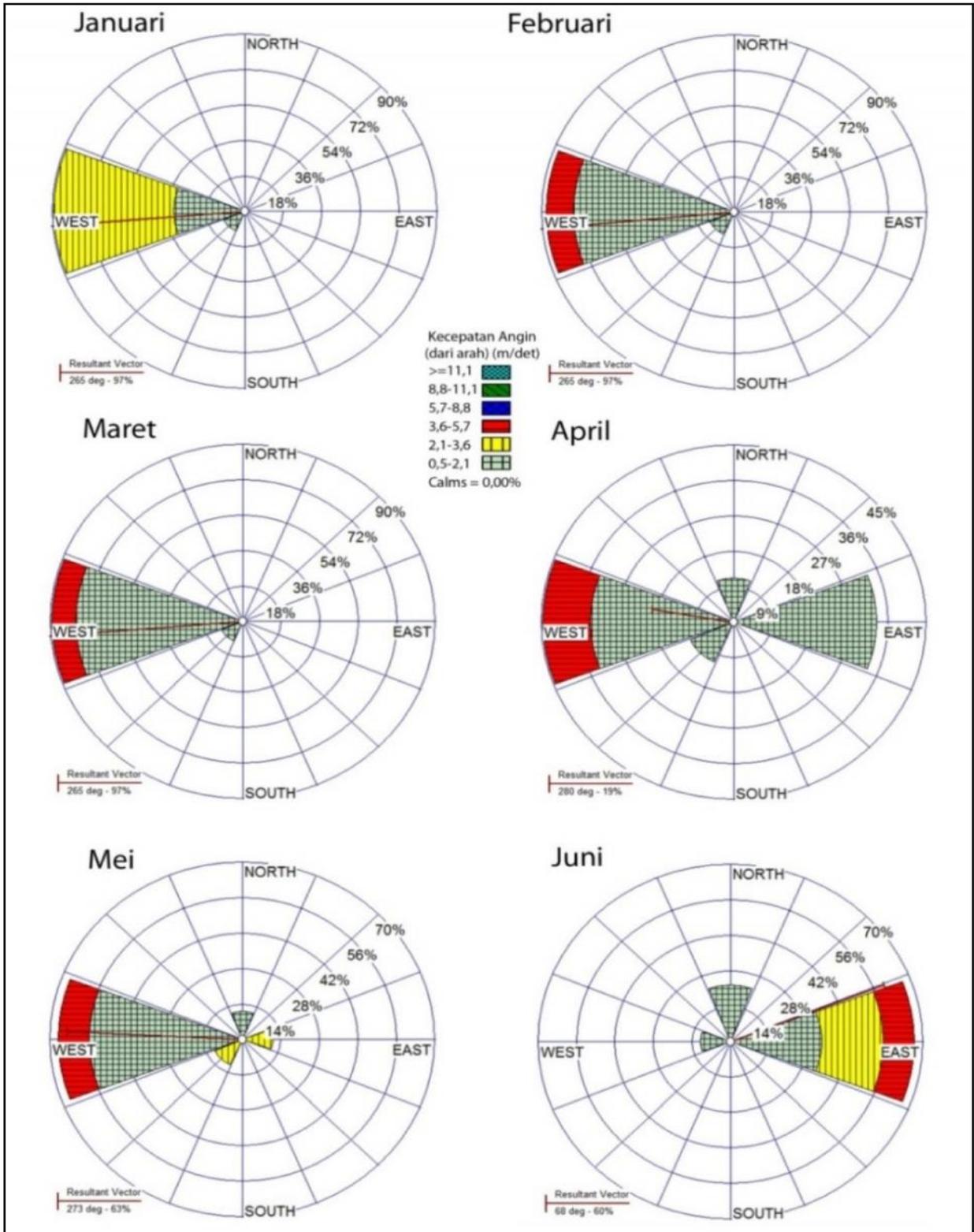


		Timur	33,33	-	-
		Barat Daya	11,11	-	-
		Barat	33,33	-	11,11
5.	Mei	Utara	11,11	-	-
		Timur	-	11,11	-
		Barat Daya	11,11	11,11	-
		Barat	55,56	-	11,11
6.	Juni	Utara	22,22	-	-
		Timur	33,33	22,22	11,11
		Barat	11,11	-	-
7.	Juli	Utara	22,22	-	-
		Timur	33,33	22,22	-
		Barat	11,11	-	-
8.	Agustus	Timur	33,33	11,11	-
		Barat Daya	11,11	11,11	-
		Barat	11,11	22,22	-
9	September	Utara	11,11	-	-
		Timur	-	11,11	-
		Barat Daya	11,11	22,22	-
		Barat	44,44	40,00	-
10.	Oktober	Barat Daya	11,11	-	-
		Barat	88,89	-	-
11.	November	Barat Daya	11,11	-	-
		Barat	77,78	11,11	-
12.	Desember	Barat Daya	11,11	-	-
		Barat	77,78	11,11	-

Sumber : Data Stasiun Klimatologi Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, 2017.



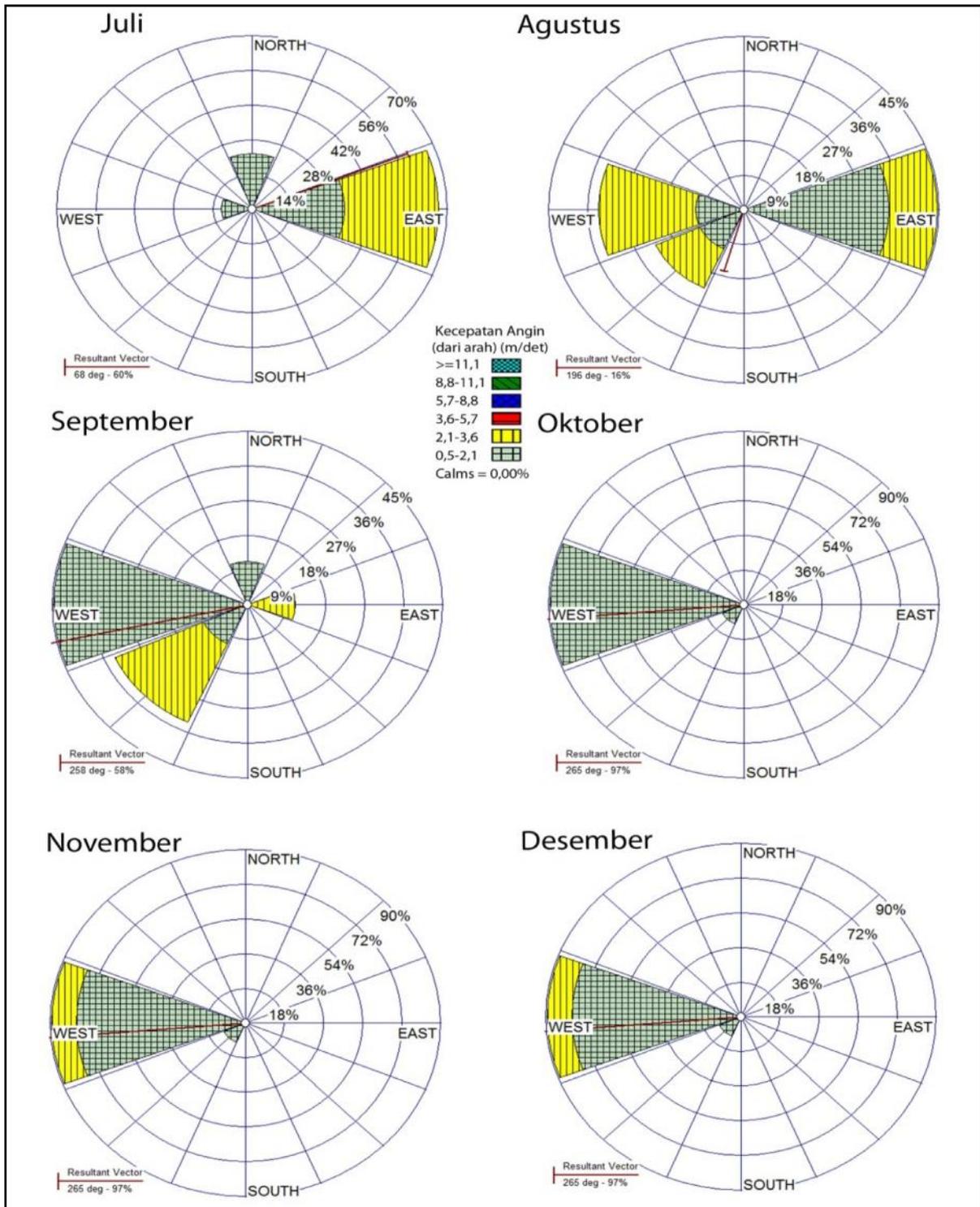
Gambar 2-10. Diagram Wind Rose (Januari-Juni) di wilayah Kabupaten Kolaka Timur



Sumber : Data Stasiun Klimatologi Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, 2009-2016.



Gambar 2-11. Diagram Wind Rose (Juli-Desember) Di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur



Sumber: Data Stasiun Klimatologi Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, 2006-2016.



2.1.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah ekspresi dari aktivitas manusia dalam mengelola ekosistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan akan mempengaruhi lingkungan hidup suatu daerah. Penggunaan lahan berperan besar pada air limpasan dari hasil hujan yang telah melebihi laju infiltrasi. Daerah yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan sulit mengalirkan air limpasan, hal ini disebabkan besarnya kapasitas dalam menyimpan air.

1. Penggunaan Lahan Sawah

Penggunaan lahan sawah (eksisting) di Kabupaten Kolaka Timur seluas 14.309,0 Ha. Penggunaan lahan sawah terluas terdapat di Kecamatan Lambandia seluas 4.083,00 Ha atau 28,53 %. Sedangkan penggunaan lahan sawah dengan luasan terendah terdapat di Kecamatan Aere seluas 226,00 Ha atau 1,58%. Luas lahan sawah di Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 2-15.

Tabel 2-15. Penggunaan Lahan Sawah Kabupaten Kolaka Timur

No.	Kecamatan	Luas Lahan Sawah	
		(Ha)	(%)
1.	Mowewe	1.185,00	8,28
2.	Tinondo	1.298,00	9,07
3.	Lalolae	724,00	5,06
4.	Tirawuta	826,00	5,77
5.	Loea	1.465,00	10,24
6.	Ladongi	3.108,00	21,72
7.	Dangia	618,00	4,32
8.	Poli-Polia	776,00	5,42
9.	Lambandia	4.083,00	28,53
10.	Aere	226,00	1,58
Jumlah		14,309,00	100,00

Sumber : Dinas Pertanian Kolaka Timur

Persentase penggunaan lahan sawah menurut jenis pengairan dan luas sebarannya antara lain pengairan irigasi teknis dan tadah hujan. Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten



Kolaka Timur menunjukkan bahwa Kecamatan Lambandia memiliki luas lahan sawah irigasi tertinggi sebanyak 2.722 Ha. dan Kecamatan Dangia memiliki luas lahan sawah irigasi terendah sebanyak 97 Ha. Sedangkan lahan tadah hujan yang memiliki luas tertinggi terdapat di Kecamatan Lalolae sebanyak 724 Ha dan lahan tadah hujan yang memiliki luas terendah terdapat di Kecamatan Loea sebanyak 25 Ha. Hasil selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-16.

Tabel 2-16. Penggunaan Lahan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan (Ha) di Kabupaten Kolaka Timur

No.	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Total
1	Ladongi	2.140	0	2.140
2	Lambandia	2.722	78	2.800
3	Tirawuta	826	0	826
4	Mowewe	1.127	53	1.180
5	Uluwoi	0	0	0
6	Tinondo	532	631	1.163
7	Lalolae	0	724	724
8	Poli-Polia	440	200	640
9	Aere	1.368	25	1.393
10.	Dangia	97	0	97
11.	Loea	306	153	459
12.	Ueesi	0	0	0
Jumlah		9.558	1.864	11.422

Sumber: Kabupaten Kolaka Timur dalam Angka, 2020.

Luas tanam komoditas padi sawah di Kabupaten Kolaka Timur tertinggi terdapat di Kecamatan Lambandia yaitu 7.053,3 ha dengan luas panen 7.052,3 ha, produksi 30.325 ton dan produktivitas 4,3 ton/ha. Sedangkan luas tanam komoditas padi sawah terendah terdapat di Kecamatan Aere yaitu 410,9 ha dengan luas panen 410,8 ha, produksi 1.766 ton dan produktivitas 4,3 ton/ha. Luas tanam, luas panen dan produksi tanaman padi sawah di Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-17.



Tabel 2-17. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah di Kabupaten Kolaka Timur

No.	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Ladong	5.405,8	5.177,4	22.263	4,3
2.	Lambandia	7.053,3	7.052,3	30.325	4,3
3.	Tirawuta	1.376,2	1.355,5	5.829	4,3
4.	Mowewe	1.943,0	1.241,5	9.638	4,3
5.	Uluiwoi	-	-	-	-
6.	Tinondo	2.375,6	1.937,4	8.331	4,3
7.	Lalolae	783,0	759,6	3.266	4,3
8.	Poli-Polia	1.129,7	1.109,9	5.203	4,3
9.	Aere	410,9	410,8	1.766	4,3
10.	Dangia	722,5	722,5	3.107	4,3
11.	Loea	2.725,0	2.590,9	11.141	4,3
12.	Ueesi	-	-	-	-
Jumlah		23.925,0	23.457,9	100.869	4,3

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur, 2020

2. Penggunaan Lahan Kawasan

Berdasarkan peraturan daerah Nomor.4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Pola Ruang wilayah Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 2-18 dan Gambar 2-12.

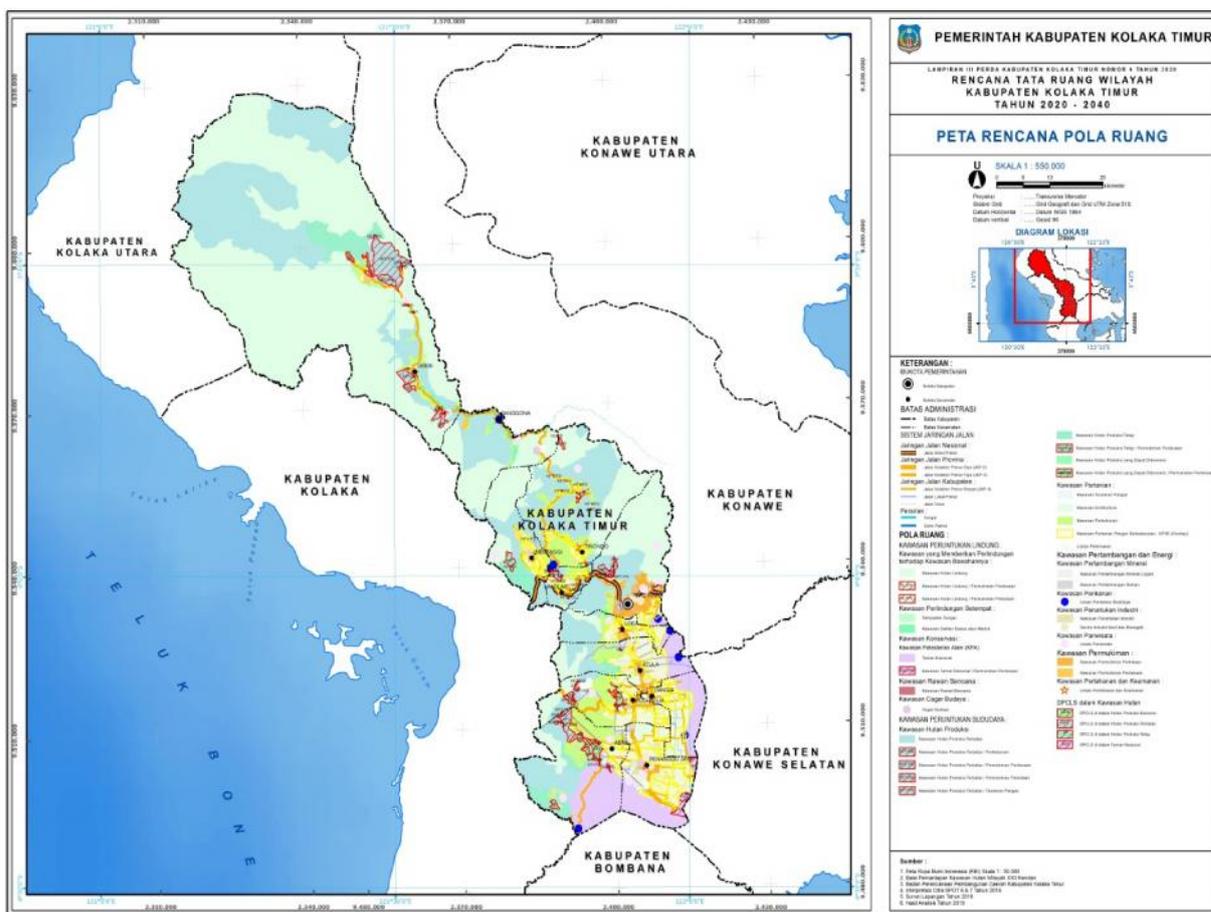
Tabel 2-18. Luasan Kawasan menurut Pola Ruang Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040

No	Pola Ruang	Luas (ha)
A	Kawasan Peruntukan Lindung	
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	176.598
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	3.332
3.	Kawasan Konservasi	23.058
4.	Kawasan Rawan Bencana	490
5.	Kawasan Cagar Budaya	(point pada Peta)

6.	Sungai	193
B	Kawasan Peruntukan Budidaya	
1.	Kawasan hutan produksi	120.490
2.	Kawasan pertanian	57.495
3.	Kawasan perikanan	(point pada Peta)
4.	Kawasan Pertambangan dan energi	870
5.	Kawasan Peruntukan Industri	359
6.	Kawasan Rawan Bencana	490
7.	Kawasan Pariwisata	(Point pada Peta)
8.	Kawasan Permukiman	15.845
9.	Kawasan pertahanan dan keamanan	(point pada Peta)
	Jumlah	399.180

Sumber : Perda. Nomor 4 Tahun 2020 tentang RTRW Kolaka Timur Tahun 2020-2040.

Gambar 2-12. Peta Pola Ruang Kabupaten Kolaka Timur



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040.



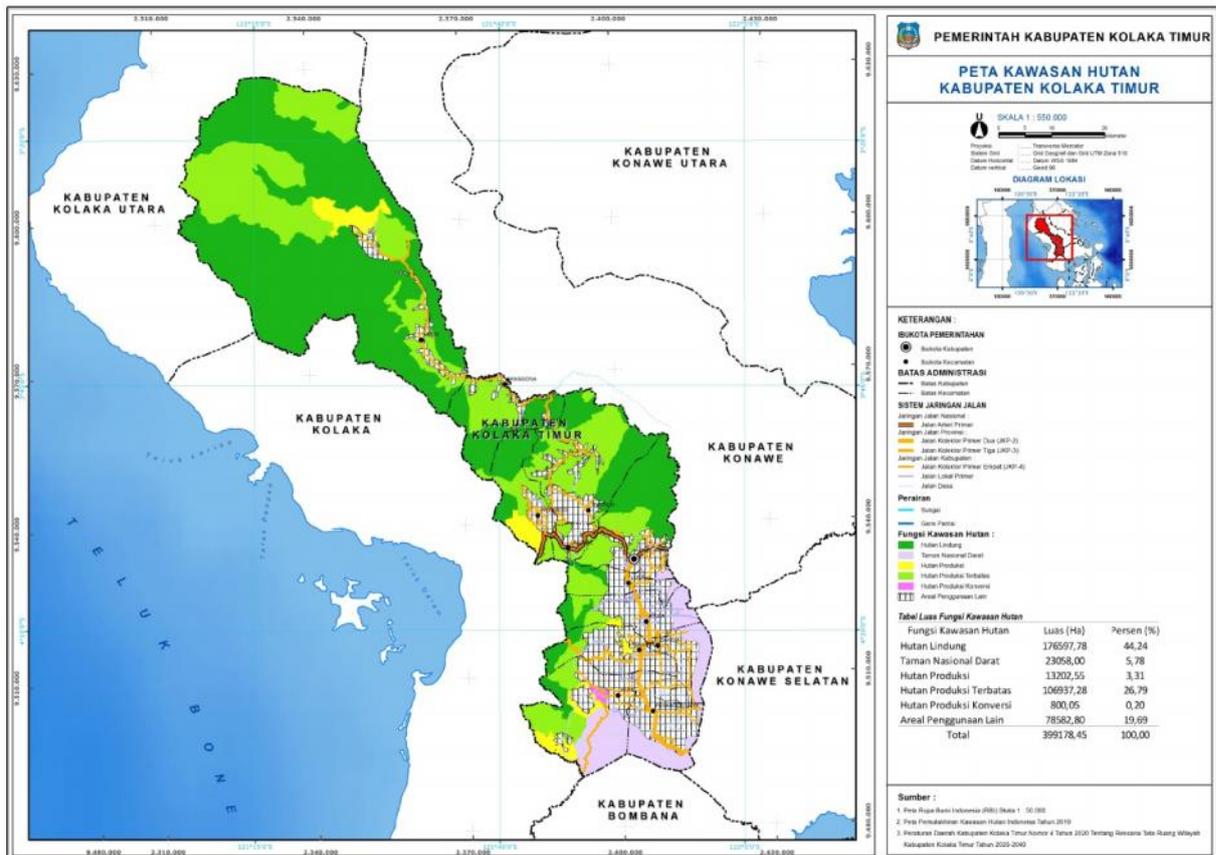
3. Penggunaan Lahan Kawasan Hutan

Pada peta pemutakhiran kawasan hutan Indonesia tahun 2019, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, fungsi Kawasan Hutan yang berada pada Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana disajikan pada Tabel 2-19 dan Gambar 2-13.

Tabel 2-19. Luas Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Kolaka Timur

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persen %
1.	Hutan Lindung	176.59,78	44,24
2.	Taman Nasional	23.058	5,78
3.	Hutan Produksi	13.202,55	3,31
4.	Hutan Produksi Terbatas	106.937,28	26,79
5.	Hutan Produksi Konversi	800,05	0,20
6.	Areal Penggunaan Lain	78.582,80	19,69
	Jumlah	399.180	100,00

Gambar 2-13. Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kolaka Timur



Sumber : Peta Pemutakhiran Kawasan Hutan 2019.



2.1.2 Demografi

Tingginya jumlah penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur dapat dipengaruhi oleh adanya kelahiran yang merupakan salah satu dampak dari pembangunan berbagai macam fasilitas perkantoran pemerintah maupun swasta di daerah tersebut. Fasilitas merupakan daya tarik penduduk untuk datang dan tinggal, sehingga terjadi imigrasi penduduk baik yang datang dari daerah di luar Kabupaten maupun penduduk dari desa-desa di kecamatan sekitar. Penduduk melakukan berbagai aktivitas seperti mencari pekerjaan di kantor-kantor pemerintah, swasta, sebagai buruh bangunan ataupun melakukan transaksi barang dan jasa di pasar seperti berdagang/ berjual beli barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-20.

Tabel 2-20. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kolaka Timur

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ladongi	122,88	18.333	149
2.	Lambandia	113,00	19.555	173
3.	Tirawuta	206,80	16.792	81
4.	Mowewe	155,29	8.557	55
5.	Uluiwoi	712,39	5.061	7
6.	Tinondo	261,13	8.985	34
7.	Lalolae	75,39	4.551	60
8.	Poli-Polia	133,53	10.997	82
9.	Aere	138,35	8.471	61
10.	Dangja	172,72	8.535	49
11.	Loea	107,94	7.242	67
12.	Ueesi	1.435,32	3.620	3
Jumlah		3.634,74	120.699	33

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur, 2021

Berdasarkan data statistik tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 120.699 jiwa, dengan tingkat kepadatan yaitu 33 jiwa/Km². Jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Timur sebagian



besar menyebar secara merata. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Lambandia sebanyak 19.555 jiwa dari total penduduk Kabupaten Kolaka Timur dengan tingkat kepadatan mencapai 173 jiwa/km². Jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ueesi dengan jumlah penduduk 3.620 dari total jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Timur dengan tingkat kepadatan mencapai 3 jiwa/Km².

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Lambandia yaitu 19.555 jiwa terdiri dari 10.066 jiwa laki-laki dan 9.489 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ueesi yaitu 4.175 terdiri dari 1.959 jiwa laki-laki dan 1.161 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Ueesi yaitu 117,7 dan rasio jenis kelamin terendah terdapat di Kecamatan Ladongi yaitu 101,8. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-21.

Tabel 2-21. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Kenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Ladongi	9.248	9.085	18.333	101,8
2.	Lambandia	10.066	9.489	19.555	106,1
3.	Tirawuta	8.558	8.234	16.792	103,9
4.	Mowewe	4.335	4.222	8.557	102,7
5.	Uluiwoi	2.625	2.436	5.061	107,8
6.	Tinondo	4.673	4.312	8.985	108,4
7.	Lalolae	2.358	2.193	4.551	107,5
8.	Poli-Polia	5.737	5.260	10.997	109,1
9.	Aere	4.418	4.053	8.471	109,0
10.	Dangia	4.359	4.176	8.535	104,4
11.	Loea	3.728	3.514	7.242	106,1
12.	Ueesi	1.959	1.661	3.620	117,7
Jumlah		62.064	58.635	120.699	105

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur, 2021



2.1.3 Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040. Berdasarkan RTRW dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti : Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan, pertambangan dan lain-lain.

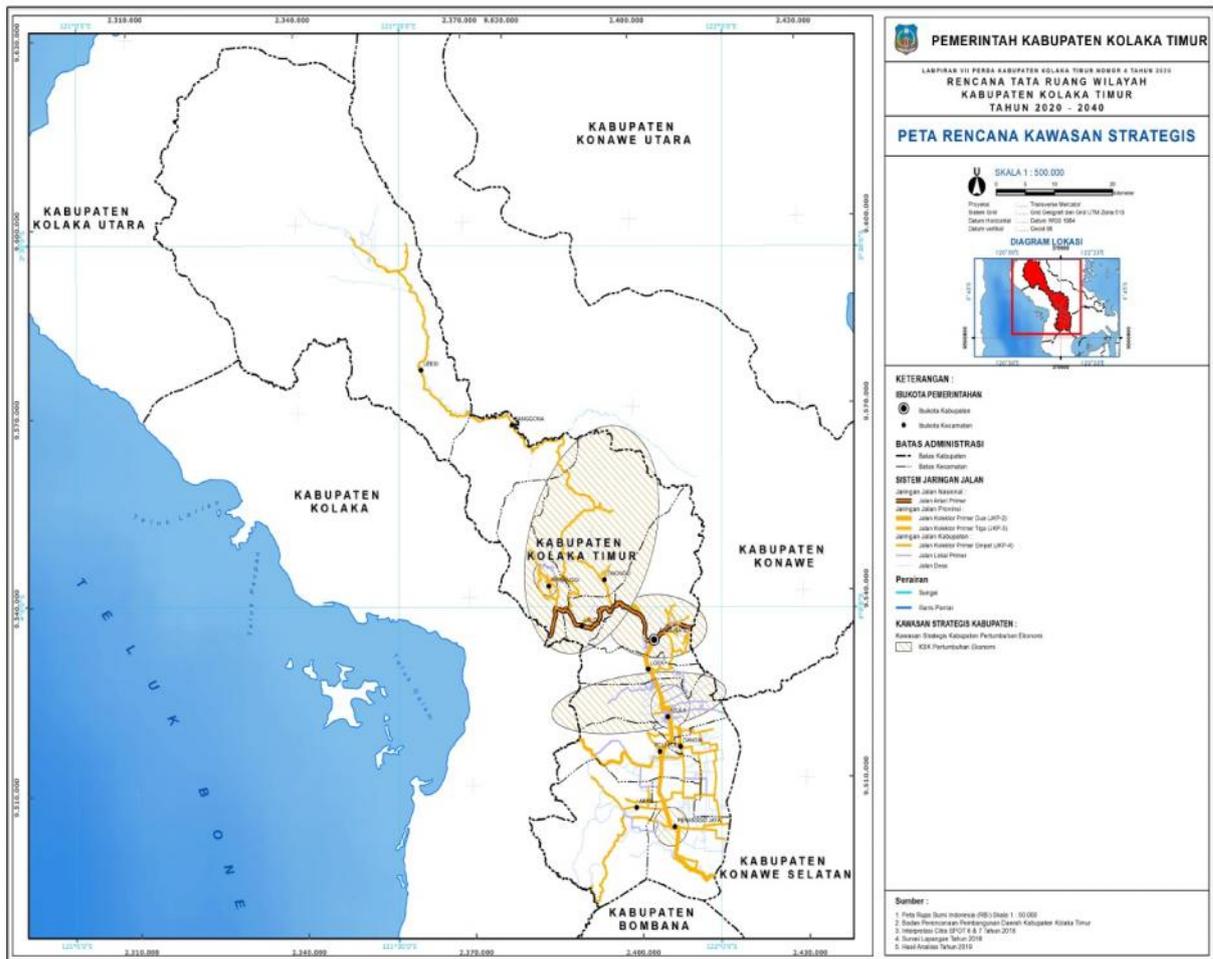
Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi, yang terdiri atas:

1. Kawasan perkotaan Tirawuta di Kecamatan Tirawuta;
2. Kawasan perkotaan Lambandia di Kecamatan Lambandia;
3. Kawasan perkotaan Mowewe di Kecamatan Mowewe;
4. Kawasan perkotaan Ladongi di Kecamatan Ladongi; dan
5. Kawasan agropolitan di Kecamatan Ladongi, Mowewe, Lalolae, dan Tinondo.

Selain kawasan strategis kabupaten, Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Kawasan strategis provinsi yang berada di Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Industri Perkebunan Kakao di Kecamatan Ladongi. (Gambar 2-14)



Gambar 2-14. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040



Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040

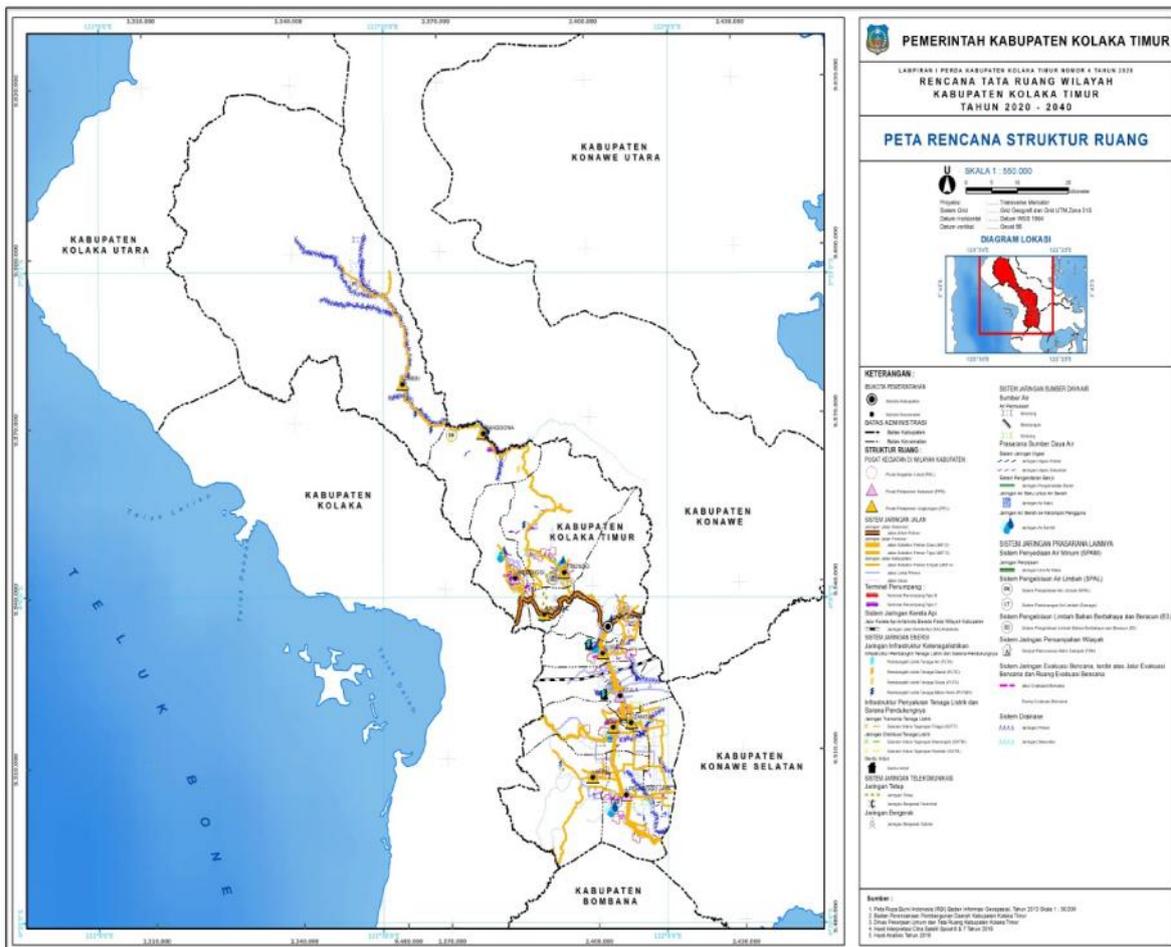
Selain membagi wilayah Kabupaten Kolaka Timur menjadi kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi dan Kawasan strategis provinsi, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pada Rencana Struktur Ruang juga membagi daerah wilayah Kabupaten Kolaka Timur menjadi pusat-pusat kegiatan perkotaan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL ditetapkan di Kawasan Perkotaan Tirawuta;



2. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kecamatan Lambandia, Mowewe, dan Ladongi; dan
3. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL terletak di Kecamatan Uluiwoi, Tinondo, Lalolae, Loea, Poli-Polia, Ueesi, Aere dan Dangia.

Gambar 2-15. Peta Struktur Ruang Kabupaten Kolaka Timur



Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040



2.1.4 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpengaruh akibat adanya misi dan arah kebijakan pembangunan infrastruktur berdampak terhadap status daya dukung pangan dan air. Dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Kolaka Timur secara keseluruhan, karena pencemaran lingkungan dan terjadinya perubahan iklim, menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah maupun air permukaan, keberadaan kawasan rawan bencana dan penurunan keanekaragaman hayati akan berpengaruh terhadap lingkungan dan tingkat kesehatan masyarakat, disajikan berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026, terhadap variabel pangan dan air untuk mengkuantifikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Kolaka Timur.

1) Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan.

Daya dukung pangan yang akan dibahas disini adalah daya dukung lahan pertanian terkait dengan pemenuhan ketersediaan pangan akan komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Kabupaten Kolaka Timur. Penentuan daya dukung lahan tersebut dilakukan dengan membandingkan komponen ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) akan beras (pangan).

Penafsiran berdasarkan formula daya dukung pangan beras adalah sebagai berikut:

1. $DDPb > 1$, wilayah mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri.
2. $DDPb < 1$, wilayah tidak mampu menyediakan pangan beras untuk kebutuhan penduduknya secara mandiri.

Berdasarkan hasil perhitungan $DDPb > 1$ maka dinyatakan surplus. Tetapi jika $DDPb < 1$ maka dinyatakan defisit atau terlampaui. Surplus menunjukkan bahwa produksi luas lahan sawah yang ada masih



dapat mencukupi kebutuhan penduduk akan beras di Kabupaten Kolaka Timur. Sebaliknya jika defisit berarti sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan beras di Kabupaten Kolaka Timur. Berdasarkan hasil perhitungan dengan pendekatan model densitas penduduk untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 secara keseluruhan status daya dukung pangan Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan surplus.

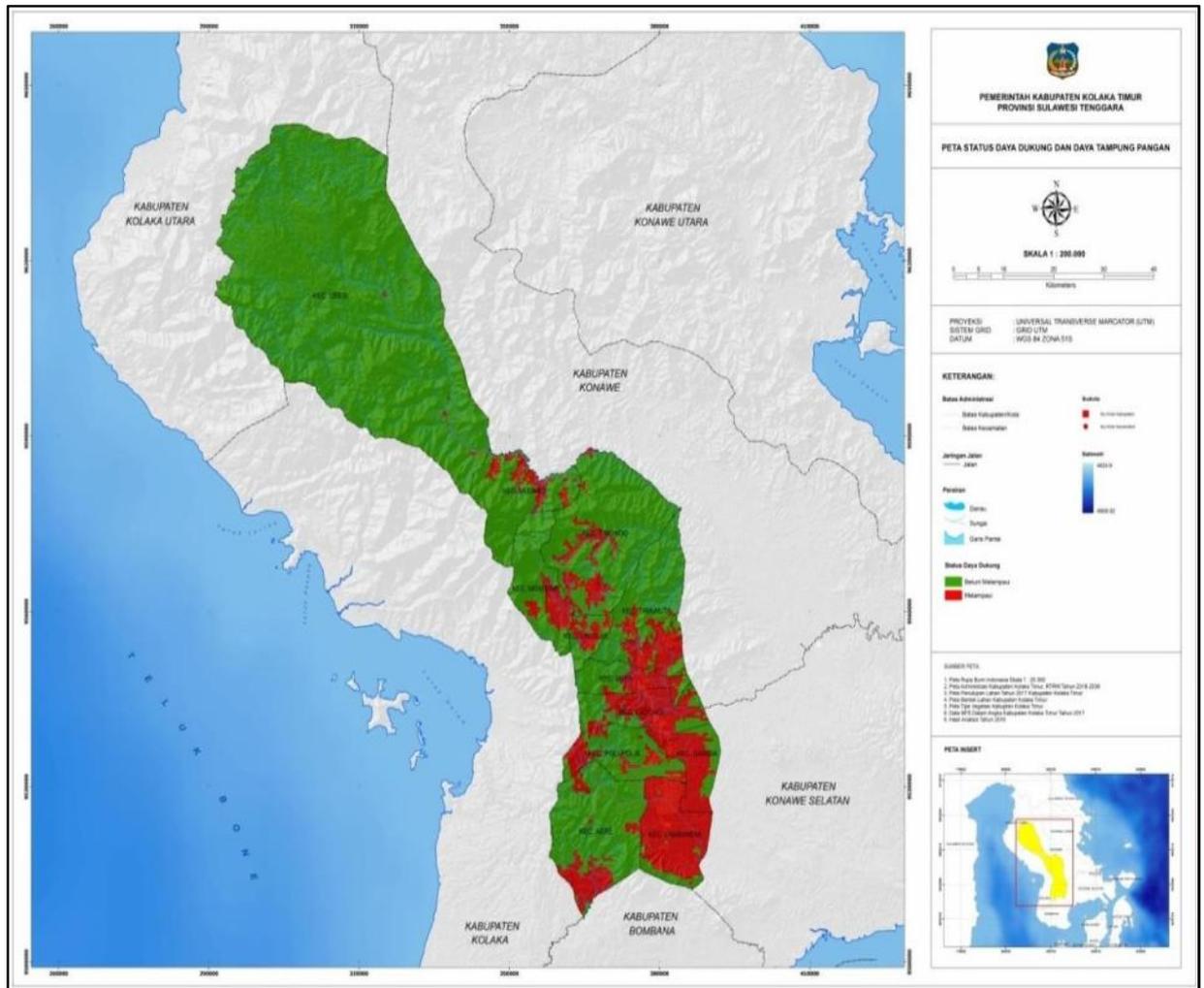
Berdasarkan hasil analisis daya dukung pangan menunjukkan beberapa kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur yang memiliki status daya dukung pangan terlampaui, namun secara keseluruhan Kabupaten Kolaka Timur memiliki status daya dukung pangan yang aman atau belum terlampaui untuk memenuhi kebutuhan penduduknya secara mandiri pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2021 = 2,01 (lebih besar dari 1) maka daya dukung pangan beras (lahan sawah) dinyatakan surplus. Beberapa kecamatan yang memiliki status daya dukung pangan yang terlampaui antara lain kecamatan Dangia, kecamatan Ladongi, kecamatan Lalolae, kecamatan Lambandia, kecamatan Loea dan kecamatan Poli-Polia. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan pangan Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2026 = 1,22 (lebih besar dari 1) maka daya dukung pangan beras (lahan sawah) dinyatakan surplus.

Dengan kata lain, kabupaten Kolaka Timur masih mampu menyediakan kebutuhan pangan akan beras untuk memenuhi kebutuhan penduduknya secara mandiri sampai pada tahun 2026. Periode RPJMD Kabupaten Kolaka Timur adalah tahun 2021-2026, jika dilihat pada status daya dukung pangan dapat dinyatakan aman. Lebih jelasnya status daya dukung pangan Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada peta di bawah ini. (Gambar 2.16).



Gambar 2-16. Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kolaka Timur



2) Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyediaan Air.

Selanjutnya dilakukan analisis daya dukung air pada prinsipnya adalah membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air, diketahui ketersediaan air di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 sebesar 8.625.028.127,96 m³/tahun. Sehingga apabila diasumsikan bahwa C (koefisien limpasan tertimbang) perhitungan tahun 2021 diasumsikan sama pada tahun 2026, maka ketersediaan air untuk tahun 2026 = 2021 yaitu : 8.625.028.127,96 m³/tahun.

Hasil perhitungan kebutuhan air Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah sebesar 201.500.800,00 m³/tahun. Sementara itu, hasil perhitungan kebutuhan air Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2026 adalah sebesar 333.131.200,00 m³/tahun.

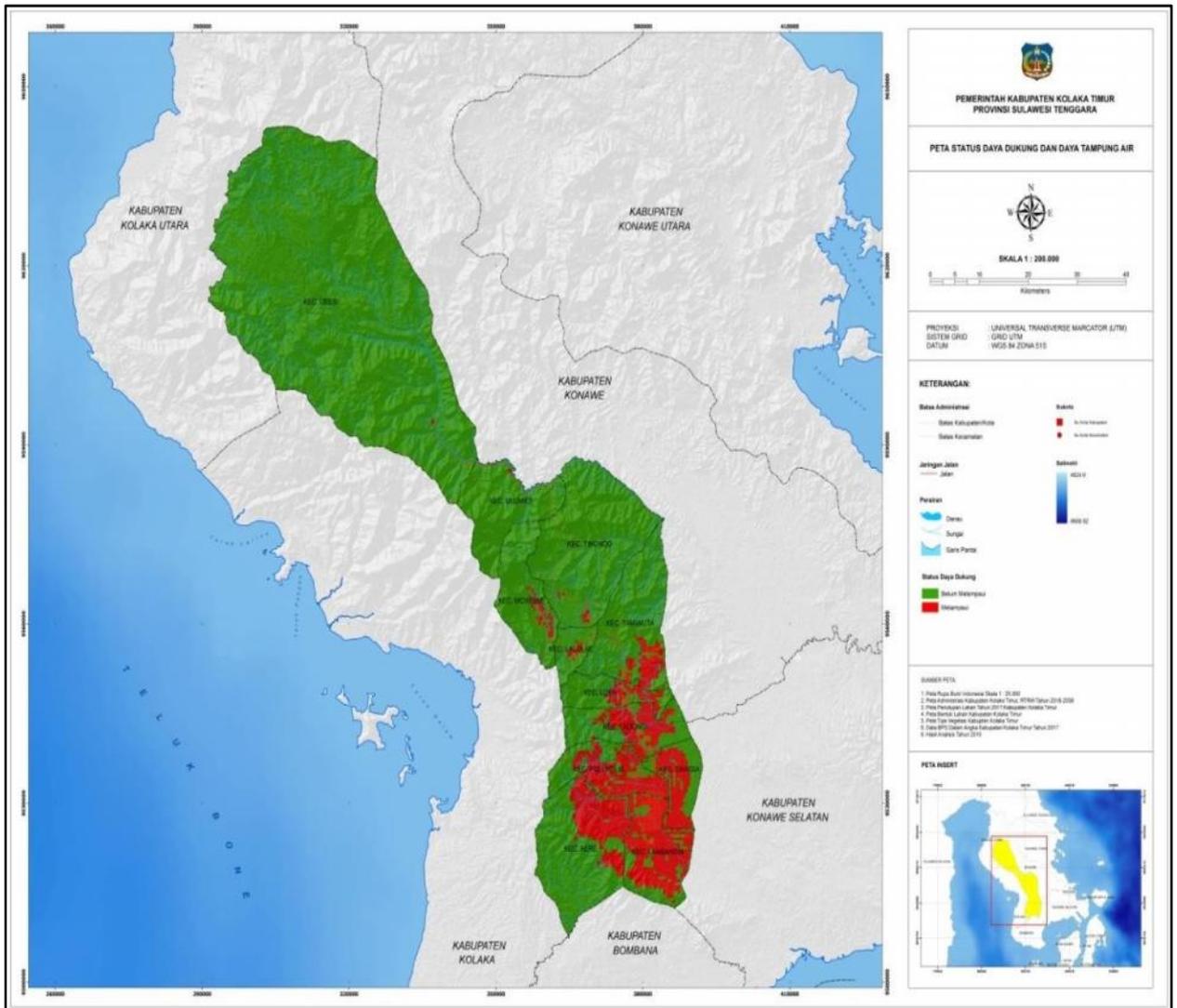
Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA).

1. Bila $SA > DA$, daya dukung air dinyatakan surplus.
2. Bila $SA < DA$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2026 didapatkan bahwa SA (8.625.028.127,96 m³/tahun) > DA (333.131.200,00 m³/tahun), hal ini berarti bahwa daya dukung air di Kabupaten Kolaka Timur sampai tahun 2026 dinyatakan dalam kategori aman atau belum terlampaui. Namun jika dilihat dari pembagian wilayah kecamatan menunjukkan beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung air terlampaui yaitu kecamatan Aere (50,00 ha), Kecamatan Dangia (150,00 ha), kecamatan Lalolae (3.117,39 ha), kecamatan Ladongi (1.438,21 ha), kecamatan Lambandia (1.496,21 ha), kecamatan Loea (449,31 ha), kecamatan Mowewe (425,00), kecamatan Poli-Polia (275,00), kecamatan Tinondo (1.124,94 ha), dan Kecamatan Tirawuta (571,59 ha). Lebih jelasnya status daya dukung air Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada peta di bawah ini. (Gambar 2-17).



Gambar 2-17. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kolaka Timur



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui distribusi tiap sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan distribusi tiap sektor dapat diperoleh struktur ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019, Perekonomian kabupaten Kolaka Timur masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi dari sektor Pertanian mencapai 42,06 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan 13,75 persen dan konstruksi 11,78 persen.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah wilayah dapat dilihat melalui laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Di tahun 2019, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kolaka Timur secara umum mencapai 5,91 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Kolaka Timur mampu tumbuh sebesar 4,77 persen, terjadi peningkatan produksi di beberapa sektor lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan galian serta sektor konstruksi yang mampu tumbuh 9,65 persen, dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai 6,88 pada sektor pertambangan dan Penggalian, 6,99 pada sektor konstruksi. Kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mencapai 8,65 persen, jika dibandingkan tahun 2018 mencapai 5,70 persen.

Tabel 2-22. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kolaka Timur

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,59	4,47	42,66	5,39	42,27	3,49	42,06	5,55	42,49	-0,77
B	Pertambangan dan Penggalian	9,64	12,47	9,42	3,42	9,49	6,88	9,87	9,65	9,09	-4,41
C	Industri Pengolahan	3,27	9,91	3,39	7,21	3,23	0,12	3,08	0,04	3,03	-2,74
D	Pengadaan Listrik dan	0,02	9,38	0,02	5,94	0,02	1,63	0,02	5,95	0,02	3,26



	Gas										
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	4,13	0,17	0,12	0,16	5,70	0,17	8,65	0,18	7,23
F	Konstruksi	11,43	13,82	11,19	3,69	11,52	6,99	11,78	9,65	11,65	-0,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,90	9,20	13,46	7,46	13,67	5,93	13,75	5,50	13,49	-2,00
H	Transportasi dan Pergudangan	2,22	10,18	2,17	4,35	2,25	9,04	2,25	5,17	2,22	-1,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,50	5,73	0,5	5,62	0,48	6,64	0,48	5,11	0,47	-3,81
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	9,76	1,22	8,44	1,22	8,20	1,23	8,56	1,31	10,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	6,64	2,1	4,61	2,04	2,06	2,02	4,63	2,10	5,27
L	Real Estate	1,36	3,18	1,34	4,17	1,28	2,78	1,25	4,55	1,24	0,42
M, N	Jasa Perusahaan	0,20	10,17	0,21	5,98	0,21	5,22	0,20	2,35	0,20	-3,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,25	3,55	6,13	4,13	6,13	3,87	6,02	4,10	6,43	5,05
P	Jasa Pendidikan	3,69	10,98	3,64	3,13	3,64	6,59	3,47	1,27	3,67	6,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	9,25	0,85	3,21	0,86	5,86	0,85	4,86	0,94	9,79
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,60	6,27	1,55	2,74	1,53	5,41	1,50	4,86	1,48	-3,00
	PDRB	100,00	7,40	100,00	5,11	100,00	4,77	100,00	5,91	100,00	-0,31

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

2.2.1 Pembangunan Manusia

Secara umum pembangunan manusia di Kolaka Timur selama periode 2016-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kolaka Timur mencapai 63.60. Telah terjadi kenaikan sebesar 0.95 basis poin menjadi 64.55 pada 2017. Pada tahun 2018 IPM Kolaka Timur meningkat sebesar 0.98 basis poin meningkat menjadi 65.53.



Menurut kriteria pembangunan manusia dan kesetaraan gender, maka Kolaka Timur kurun waktu 2016-2018 berada dalam posisi sedang. Mengacu pada batasan besaran 60 IPM 70 sebagai wilayah dengan IPM terkategori sedang.

Peningkatan angka IPM tidak terlepas dari peran pemerintah untuk terus menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan merata, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penyediaan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat Kolaka Timur. Peningkatan angka IPM merupakan gabungan dari meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan dan standar hidup.

Tabel 2-23. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (tahun)	71.31	71.51	71.58	71.66	71,99
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10.78	11.06	11.33	11.58	11.89
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6.30	6.39	6.65	6.90	7,18
Daya Beli (Ribu Rupiah/Orang)	7.09	7.16	7.28	7.49	7.60
IPM	62.10	62.74	63.60	64.55	65.53

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019.

2.2.2 Capaian Bidang Kesehatan

Salah satu indikator kesehatan berkualitas adalah meningkatnya umur harapan hidup. Peningkatan tersebut terjadi dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesehatan, dan lingkungan. Angka harapan hidup secara konsepsi diartikan sebagai perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan harapan tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Semakin tinggi harapan hidup disuatu daerah menggambarkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya secara umum.

Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Kolaka Timur tahun 2013 adalah 71,28, meningkat 0,03 poin menjadi 71,31 pada tahun 2014, meningkat menjadi 71,51 atau sebesar 0,2 poin pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 71,58 atau meningkat 0,07 pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017, angka



harapan hidup Kabupaten Kolaka Timur meningkat 0,08 poin menjadi 71,66 hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kolaka Timur mampu bertahan hidup sampai usia 71 tahun, tahun 2018 menjadi 71,99 dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 72,33 atau rata-rata penduduk Kolaka Timur berumur 72 tahun.

2.2.3 Capaian Bidang Pendidikan

Sasaran pembangunan pendidikan dititik beratkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan. Dimulai dari kegiatan prasekolah (Taman Kanak-Kanak) sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manusia berkualitas. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dapat memperoleh kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur seperti banyaknya sekolah dan guru. Perkembangan berbagai rasio dan sebagainya.

Tabel 2-24. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020

Kategori Usia	APS				
	2016	2017	2018	2019	2020
7 – 12	14.372	13.003	13.224	12.602	12.940
13 – 15	5.529	4.907	5.448	5.256	5.347
16 – 18	4.739	5.574	5.150	5.102	3.978

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kolaka Timur 2020

Pada angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2016 adalah sebesar 14.372 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar. pada jenjang Sekolah Menengah Pertama angka partisipasi sekolah sebesar 5.529 dan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 4.739. Hampir semua



anak usia 7-12 tahun sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. tingginya angka partisipasi sekolah pada kelompok umur ini di pengaruhi oleh program pemerintah pendidikan gratis untuk semua. Tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah cenderung menurun di semua angka partisipasi sekolah hingga tahun 2020 menjadi 12.940 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, 5.347 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan 3.978 pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Tabel 2-25. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kolaka Timur

Kelompok Umur	A P M				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD	94,13	94,36	96,13	99,19	98,73
SLTP	74,81	78,02	74,68	76,95	84,54

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kolaka Timur 2021.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat dijenjang pendidikan yang seharusnya terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

2.2.4 Pengeluaran Riil

Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan peningkatan. Tahun 2015, pengeluaran perkapita setiap orang penduduk Kabupaten Kolaka Timur sebesar 7.157.000 rupiah. Pada tahun 2016, naik menjadi 7.283.000 rupiah, dan tahun 2017 naik menjadi 7.499.000 rupiah. Tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sehingga mencapai 9.050.000 rupiah. Nilai ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat walaupun berjalan lambat.

2.2.5 Disparitas IPM Kabupaten Kolaka Timur

Indikator pencapaian pembangunan manusia antar Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan adanya ketidakmerataan perkembangan diberbagai sektor pembangunan. Ketidakmerataan dapat dilihat dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi. Beberapa indikator social



ekonomi telah terangkum dalam IPM merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan.

Tabel 2-26. Disparitas IPM Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara tahun 2020

No.	Wilayah	IPM	Peringkat Provinsi
1	Buton	65,98	13
2	Muna	69,02	8
3	Konawe	71,35	4
4	Kolaka	73,45	3
5	Konawe Selatan	68,20	9
6	Bombana	66,05	12
7	Wakatobi	69,48	6
8	Kolaka Utara	69,31	7
9	Buton Utara	67,87	10
10	Konawe Utara	69,86	5
11	Kolaka Timur	67,02	11
12	Konawe Kepulauan	65,41	14
13	Muna Barat	65,08	15
14	Buton Tengah	64,37	17
15	Buton Selatan	64,93	16
16	Kota Kendari	83,53	1
17	Kota Bau-Bau	75,90	2
	Sulawesi Tenggara	71,45	

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

Nilai IPM Kabupaten Kolaka Timur 67,02 sedangkan Sulawesi Tenggara sudah 71,45 atau beda 4,43 basis poin. Kabupaten Kolaka Timur masih belum mampu melampaui Provinsi Sulawesi Tenggara dalam capaian IPM. Ini menjadi indikasi kemampuan Kolaka Timur harus lebih meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kemakmuran bagi penduduknya.



Tabel 2-27. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2016–2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buton	63,69	64,47	65,08	65,67	65,98
Muna	66,96	67,61	68,47	68,97	69,02
Konawe	69,84	70,24	70,72	71,29	71,35
Kolaka	71,12	71,46	72,07	73,01	73,45
Konawe Selatan	66,97	67,23	67,51	67,88	68,20
Bombana	64,02	64,49	65,04	65,65	66,05
Wakatobi	67,50	67,99	68,52	68,99	69,48
Kolaka Utara	67,60	67,77	68,44	68,91	69,31
Buton Utara	65,95	66,40	67,13	67,68	67,87
Konawe Utara	67,20	67,71	68,50	69,22	69,86
Kolaka Timur	63,60	64,55	65,53	66,49	67,02
Konawe Kepulauan	62,56	63,44	64,36	65,05	65,41
Muna Barat	62,57	63,43	64,11	64,45	65,08
Buton Tengah	62,56	62,82	63,46	64,06	64,37
Buton Selatan	62,55	63,20	63,47	64,37	64,93
Kota Kendari	81,66	81,83	82,22	82,86	83,53
Kota Bau-Bau	73,99	74,14	74,67	75,21	75,90
Sulawesi Tenggara	69,31	69,86	70,61	71,20	71,45

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

2.2.6 Koperasi dan Perbankan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jumlah koperasi yang masih aktif di Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 18 Koperasi baik itu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, ataupun yang lainnya.



Tabel 2-28. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Aere	1	-	-
Lambandia	-	3	3
Poli-Polia	-	4	4
Dangia	-	1	1
Ladongi	3	4	4
Loea	-	1	1
Tirawuta	4	4	4
Lalolae	1	-	-
Mowewe	6	-	-
Tinondo	3	-	-
Uluiwoi	-	1	1
Ueesi	-	-	-
Kolaka Timur	18	18	18

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021

Tabel 2-29. Jenis Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur 2020

Kecamatan	Jenis Koperasi					Jumlah
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7
Aere	-	-	-	-	-	0
Lambandia	1	-	-	-	2	3
Poli-Polia	-	-	-	-	4	4
Dangia	-	-	-	-	1	1
Ladongi	-	-	-	-	4	4
Loea	-	-	-	-	1	1
Tirawuta	-	-	-	-	4	4
Lalolae	-	-	-	-	-	0



Mowewe	-	-	-	-	-	0
Tinondo	-	-	-	-	-	0
Uluwoi	-	-	-	-	1	1
Ueesi	-	-	-	-	-	0
Kolaka Timur	1	0	0	0	17	18

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. Jumlah Bank Pemerintah yang ada di Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 9 Bank, baik itu berstatus BUMN maupun BUMD.

Tabel 2-30. Jumlah Bank Pemerintah di Kabupaten Kolaka Timur 2017-2020

Kecamatan	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
BRI	3	3	3	3
BNI	-	1	1	1
Mandiri	1	1	1	1
BTN	-	-	-	-
BPD	4	4	4	4
Kolaka Timur	8	9	9	9

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021

2.2.7 Kesejahteraan Sosial

Kondisi yang diinginkan dengan berbagai program di bidang penanganan masalah sosial yaitu menurunnya jumlah penyandang masalah sosial. Menurut Permensos Nomor 8 Tahun 2012, Perlu dipahami bahwa PMKS tidak semata-mata masalah kemiskinan atau penduduk miskin, tetapi juga berhubungan dengan Anak berhadapan dengan hukum, Korban Bencana Alam, Anak Dengan Kedisabilitas, Keluarga Miskin, Anak Terlantar dan Penyandang Cacat. Dengan pemahaman seperti diatas, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah melaksanakan upaya-



upaya dalam bentuk program dan kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan setiap tahun. Gambaran PMKS di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 terlihat dalam tabel 2-31, berikut dibawah ini:

Tabel 2-31. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Penyandang Kesejahteraan Sosial					
	Penyandang Disabilitas	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Fakir Miskin	Anak Dengan Kedisabilitas	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial
AERE	27	65	120	7	670	5
LAMBANDIA	49	134	173	2	343	3
POLI-POLIA	47	84	124	2	0	0
DANGIA	44	27	54	1	450	2
LADONGI	73	70	164	3	0	24
LOEA	33	70	118	1	5	0
TIRAWUTA	112	114	216	5	0	0
LALOLAE	29	15	123	2	0	0
MOWEWE	61	42	142	5	0	6
TINONDO	58	35	241	3	0	3
ULUIWOI	91	112	151	4	28	0
UEESI	64	78	184	2	0	0

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Kolaka Timur, 2020.

2.2.8 Industri

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Perusahaan industri aktif di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 untuk industri skala kecil berjumlah 32 dan untuk skala mikro berjumlah 200. Selengkapny disajikan pada Tabel. 2-32.

Tabel 2-32. Jumlah Perusahaan Industri Menurut Skala Usaha
Di Kabupaten Kolaka Timur, 2020

Skala Usaha	Usaha	
	Terdaftar	Aktif
1	2	3
Besar	-	-



Sedang	2	4
Kecil	8	32
Mikro	10	200
Jumlah	20	236

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021

Tabel 2-33. Rekapitulasi Industri Kecil, Menengah, dan Besar Cabang Industri Pangan di Kabupaten Kolaka Timur, 2020

No	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)	Jenis Produk Utama	Nilai Produksi/Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Industri Penghasil Ikan	-	-	-	-	-
2	Industri Pemanis Buah-buahan	-	-	-	-	-
3	Industri Minyak Sawit Mentah	-	-	-	-	-
4	Industri Pelumatan Buah-buahan	-	-	-	-	-
5	Industri Penggilingan Padi	56	198	7.000.000	Padi	5.369.400
6	Industri Pengupasan Pembibitan Kopi	-	-	-	-	-
7	Industri Sirup	-	-	-	-	-
8	Industri Roti dan Sejenisnya	11	2	7.000	Roti	144.000
9	Indusri Gula Merah	55	157	50.450	Gula Merah	3.508.560
10	Industri Es	-	-	-	-	-
11	Industri Tempe	5	22	85.000	Tempe	524.400
12	Industri Mie	-	-	-	-	-
13	Industri Kerupuk dsb	1	3	5.000	Kerupuk	90.000
14	Industri Jamu	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.



Tabel 2-34. Rekapitulasi Industri Kecil, Menengah, dan Besar Cabang Industri Sandang dan Kulit serta Cabang Industri Kimia dan Bahan Bangunan Kabupaten Kolaka Timur, 2020

No.	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp 000)	Jenis Produk Utama	Nilai Produksi/Thn (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ind. Bordir/Sulaman	24	50	490.500	Pakaian Jadi	2.793.600
2	Ind.Moulding	-	-	-	-	-
3	Ind. Karet Remah	-	-	-	-	-
4	Ind. Batu Bata dari Tanah Liat	48	208	1.222.000	Batu Bata	15.837.000
5	Ind. Genteng dari Tanah	-	-	-	-	-
6	Ind. Pertenunan	1	3	20.000	Kain	36.000
7	Ind. Komponen Bahan Bangunan					
8	Ind. Percetakan	-	-	-	-	-
9	Ind. Barang dari Semen	6	16	375.000	Batako	1.035.000

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

Tabel 2-35. Rekapitulasi Industri Kecil, Menengah, dan Besar Cabang Industri Kerajinan dan Umum serta Cabang Industri Logam di Kabupaten Kolaka Timur, 2020

No.	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp 000)	Jenis Produk Utama	Nilai Produksi/Thn (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ind. Anyaman Bambu	-	-	-	-	-
2	Ind. Barang Kerajinan dari Tanah Liat	1	10	500	Tungku	27.000
3	Ind. Furnitur dari Kayu	17	58	809.500	Meubel	5.368.800
4	Ind. Furnitur Lainnya	1	2	50.000	Almunium	360.000



5	Ind. Barang Perhiasan dari Logam Mulia	-	-	-	-	-
6	Ind. Kerajinan Lainnya	1	6	500	Toples	36.000
7	Ind. Pengolahan Lainnya	70	221	3.338.000	Minyak Atsiri	21.942.540
8	Ind. Barang Logam Siap Pasang	-	-	-	-	-
9	Ind. Alat Pertanian dari Logam	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

2.2.9 Energi / Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan.

Tabel 2-36. Daya Listrik Tersambung dan Jumlah Pelanggan PLN yang Masuk Wilayah PT. PLN (Persero) Rayon Kolaka Menurut Kelompok Tarif di Kabupaten Kolaka Timur, 2018

Kelompok Tarif	Daya Listrik Tersambung (KVA)	Jumlah Pelanggan
1	2	3
Sosial	80.35	75
Rumah Tangga	2.915.05	3.599
Bisnis	95.15	61
Industri	-	-
Instansi Pemerintah	33.60	22
Curah	-	6
Jumlah	3.124.15	3.763

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020.



2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dari indikator layanan pendidikan (rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, rasio guru murid), indikator layanan kesehatan (rasio rumah sakit/penduduk, rasio Puskesmas/penduduk), indikator layanan perizinan (jumlah perizinan yang dikeluarkan) dan indikator layanan kependudukan (rasio penduduk ber-KTP).

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Sasaran pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan, dimulai dari kegiatan prasekolah (Taman Kanak-Kanak) sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manusia berkualitas. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dapat memperoleh kesempatan belajar yang seluas-luasnya.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur seperti banyaknya sekolah dan guru, perkembangan berbagai rasio dan sebagainya.

Tabel 2-37. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020

Kategori Usia	Angka Partisipasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
7 – 12	14.372	13.003	13.224	12.602	12.940
13 – 15	5.529	4.907	5.448	5.256	5.347
16 – 18	4.739	5.574	5.150	5.102	3.978

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020.



Pada tabel 2-37. menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020 adalah sebesar 12.940 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama angka partisipasi sekolah sebesar 5.347 dan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 3.978. Hampir semua anak usia 7-12 dan 13 – 15 tahun sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, dimana angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu Pada tahun 2019 Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-12 Tahun berjumlah 12.602, sedangkan pada usia 13 – 15 tahun berjumlah 5.256.

Tabel 2-38. Rasio Murid terhadap Sekolah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019/2020

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Rasio
1	TK/PAUD	116	3.746	32,29
2	SD/MI	140	12.182	87,01
3	SMP/MTs	41	4.578	111,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020.

Tabel 2-38 menunjukkan bahwa Rasio Sekolah Murid pada tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Timur masing-masing: TK sebesar 32,29, SD Sebesar 87,01 SMP sebesar 111,66. Ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, 1 SD menampung murid sebanyak 87,01 dan kondisi ini melampaui angka ideal kebutuhan SD di Kabupaten Kolaka Timur yaitu 140 Sekolah. Pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, 1 SMP mampu menampung murid sebanyak 111,66 dan kondisi ini melampaui angka ideal kebutuhan SMP di Kabupaten Kolaka Timur yaitu 41 sekolah.

Tabel 2-39. Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	TK	235	3.746	15,94
2	SD	1.252	12.182	9,73
3	SMP	443	4.578	10,33

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur 2020



Tabel 2-39 menunjukkan bahwa Rasio Guru Murid pada tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Timur masing-masing: TK sebesar 15,94, SD sebesar 9,73, SMP sebesar 10,33. Ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak setiap orang guru membina 15 orang murid, pada jenjang Sekolah Dasar setiap guru membina 9,73 orang murid, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama setiap guru membina 10,33 orang murid. Rasio tersebut sudah melampaui target SPM yaitu 1 orang guru menangani 32 orang murid walaupun demikian, perlu dilakukan pemerataan distribusi penempatan guru menurut sekolah dan kecamatan, sehingga setiap sekolah memiliki jumlah guru yang proporsional.

Tabel 2-40. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	APM (%)					APK (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
PAUD						40	45	55	69,96	80
SD / MI	94,13	94,36	96,13	99,19	98,73	111,89	113,71	116,45	100,17	98,35
SMP/MTs	74,81	78,02	74,68	76,90	84,54	92,12	91,97	82,76	101,48	101,40

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AHM merupakan indikator pembangunan bidang pendidikan yang digunakan untuk :

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. Menunjukkan kemampuan penduduk disuatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Data mengenai perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020 untuk penduduk berumur 15 – 24 berdasarkan sumber



dari Badan Pusat Statistik Kolaka Timur adalah adalah 100,00 untuk kelompok umur 15-44 sebesar 98,79 dan pada kelompok umur 45+ sebesar 95,50.

B. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia, keberhasilan pembangunan kesehatan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan dilakukan dengan 3 induk indikator umum yaitu indikator input dan proses yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor pendukung kesehatan; indikator antara yang berhubungan dengan keadaan lingkungan, perilaku hidup sehat, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan; indikator derajat kesehatan yang berhubungan dengan mortalitas, morbiditas dan status gizi. Untuk membantu menunjang pembangunan bidang kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur memberikan pelayanan kesehatan melalui BPJS dan BOK.

Hasil rekapitulasi data dari rekapan Puskesmas, jumlah penduduk yang telah memanfaatkan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Jaminan Kesehatan bagi keluarga miskin integrasi ke KIS selama tahun 2019 sebanyak 77,335 jiwa atau 58%, baik pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas maupun pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit.

a. Puskesmas

Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur berjumlah 12 dari 12 Kecamatan, yang terdiri dari 10 Puskesmas Non rawat Inap dan 2 Puskesmas rawat inap.

b. Puskesmas Pembantu (Pustu)

Untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, selain kegiatan pelayanan di Puskesmas Induk yang berada di Wilayah Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur juga memiliki Puskesmas Pembantu sebanyak 17 buah.



c. Polindes (Pondok Bersalin Desa)

Polindes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Jumlah Polindes yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur memiliki 11 buah Pondok Bersalin Desa.

d. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)

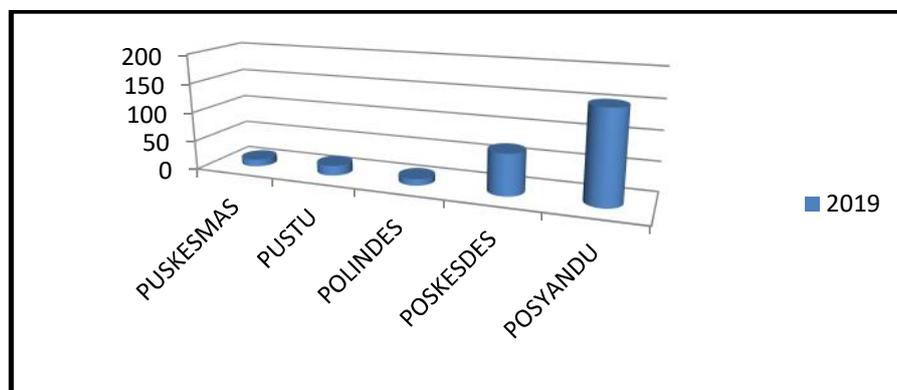
Selain Polindes, Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur juga memiliki 69 Pos Kesehatan Desa yang merupakan wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai resiko dan masalah kesehatan.

e. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur juga memiliki 153 Posyandu yang berada di semua desa/kelurahan. Pemanfaatan Posyandu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Angka rasio posyandu per jumlah balita terus naik dari tahun ketahun. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

Grafik 2-1. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur 2019.

Tabel 2-41. Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

No	KECAMATAN	SARANA KESEHATAN				
		PUSKESMAS	PUSTU	POLINDES	POSKESDES	POSYANDU
1	Mowewe	1	1	0	9	16
2	Tinondo	1	2	0	8	16
3	Lalolae	1	1	0	2	6
4	Uluwui	1	1	3	8	10
5	Ueesi	1	1	0	3	11
6	Tirawuta	1	2	0	9	16
7	Loea	1	1	0	6	10
8	Lambandia	1	2	3	5	20
9	Poli-Polia	1	1	2	6	13
10	Aere	1	1	1	7	12
11	Dangia	1	1	1	3	12
12	Ladongi	1	3	1	3	11
Jumlah		12	17	11	69	153

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur 2019.

Tabel 2-42. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana
Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

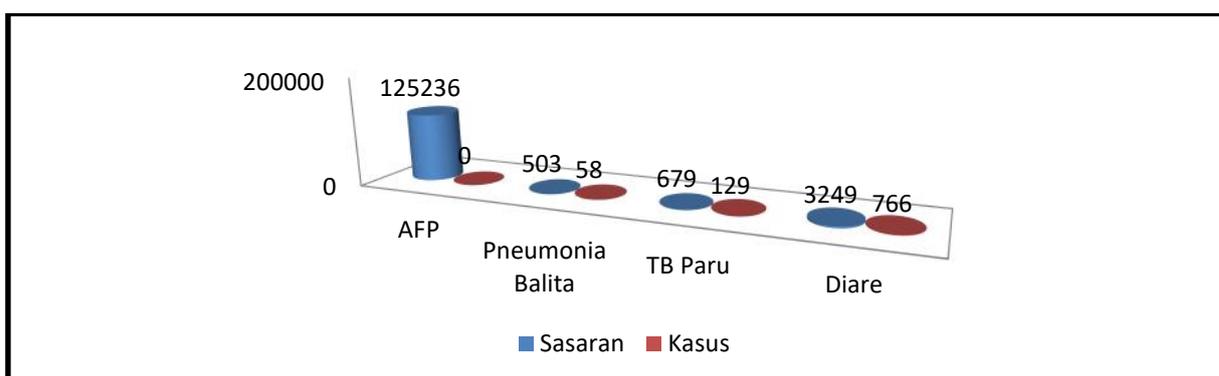
No	Kecamatan	Tenaga Medis			
		Dokter	Dokter Gigi	Bidan	Perawat
1	Puskesmas Mowewe	1	0	13	5
2	Puskesmas Tinondo	1	0	7	7
3	Puskesmas Lalolae	1	1	6	4
4	Puskesmas Sanggona	2	0	7	4
5	Puskesmas Ueesi	0	0	4	4
6	Puskesmas Tirawuta	2	1	12	7
7	Puskesmas Loea	1	0	9	10
8	Puskesmas Lambandia	2	1	15	8
9	Puskesmas Poli-Polia	1	0	8	6
10	Puskesmas Aere	1	0	8	7
11	Puskesmas Dangia	1	1	6	5
12	Puskesmas Ladongi Jaya	1	1	13	6
Jumlah		14	5	108	73

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur 2019.



Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah penderita pneumonia pada balita mencakup 58 kasus dari jumlah sasaran 503 balita. Jumlah penderita penyakit TB mencakup 129 kasus dari 679 jumlah sasaran penderita TB Paru. Jumlah penderita Diare mencakup 766 kasus dari 3,249 target penemuan kasus diare, di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten kolakaTimur tahun 2019.

Grafik 2-2. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit



Sumber: Profil Kesehatan Dinkes Kab.Kolaka Timur Tahun 2019

Adapun jumlah persebaran tenaga kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-43. Distribusi Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

PROFESI/PENDIDIKAN	STATUS		JUMLAH
	PNS	PTT	
S2-Kesehatan	4	0	4
Dokter Spesialis	1	0	1
Dokter Umum	10	0	10
Dokter Gigi	1	0	1
S1 Kes. Masyarakat	32	0	32
S1 Keperawatan	10	0	10
S1 Farmasi	4	0	4
S1 Gizi	2	0	2
S1 Psikologi	1	0	1

Apoteker	3	0	3
Ners	5	0	5
D-IV Gizi	3	0	3
D-IV Kebidanan	7	0	7
D-III Gizi	3	0	3
D-III Farmasi	6	0	6
D-III Keperawatan	42	0	42
D-III Kebidanan	94	0	94
D-III Kes.Lingkungan	1	0	1
D-III Tehnik Gigi	2	0	2
D-III Rekam Medik	1	0	1
D-III Analis Kesehatan	3	0	3
D-I Kebidanan	7	0	7
D-I Transfusi Darah	1	0	1
SMK Farmasi	1	0	1
SPK	33	0	33
SMA	2	0	2
JUMLAH	249	0	249

Sumber: Profil Kesehatan Dinkes Kab.Kolaka Timur Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah Pegawai dengan status PNS yang memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan sebanyak 249 orang dengan latar belakang pendidikan dari berbagai profesi.

Tabel 2-44. Data Balita Stunting Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Jumlah Balita	Balita dengan status "Sangat Pendek"	Balita dengan status "Pendek"	TOTAL	%
1	AERE	AERE	543	26	104	130	23,94
2	DANGIA	DANGIA	450	30	85	121	26,89
3	LADONGI	LADONGI	733	30	104	134	18,28
4	LALOLAE	LALOLAE	310	16	46	62	20,00
5	LAMBANDIA	LAMBANDIA	1250	20	61	81	6,48
6	LOEA	LOEA	394	11	30	41	10,41



7	MOWEWE	MOWEWE	583	35	80	115	19,73
8	POLI-POLIA	POLI-POLIA	609	16	81	97	15,93
9	ULUIWOI	ULUIWOI	426	13	77	90	21,13
10	TINONDO	TINONDO	317	4	35	39	12,30
11	TIRAWUTA	TIRAWUTA	1310	19	125	144	10,99
12	UEESI	UEESI	282	20	58	78	27,66
Jumlah			7207	240	886	1132	17,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Kolaka Timur.

Dari data di atas tergambar Balita Stunting Kabupaten Kolaka Timur, pada tahun 2020 dari jumlah balita 7.207 jumlah balita dengan status sangat pendek lebih sedikit dengan balita status pendek sehingga totalnya menjadi 1.132 dengan persentase sebesar 17,89 % jumlah kasus tertinggi terjadi di kecamatan Ueesi sebesar 27,66 %.

C. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kolaka Timur terbagi dalam 4 Bidang, diantaranya yaitu Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

Capaian di Bidang Bina Marga ini dapat dilihat dari Pekerjaan Jalan yang sesuai dengan Tingkat Kewenangan Pemerintahan. Panjang Jalan teraspal di Kabupaten Kolaka Timur untuk setiap tahunnya dimulai dari Tahun 2016 hingga 2020 mengalami penambahan, dimana pada tahun 2016 panjang jalan Aspal sepanjang 6,00 KM bertambah menjadi 77,39 KM. Namun, penambahan ini belum maksimal, melihat kondisi jalan yang dikategorikan baik masih belum memenuhi 50% dari total panjang jalan di Kabupaten Kolaka Timur. Maka Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur merumuskan Strategi Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang. Proporsi jalan di Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut:



Tabel 2-45. Panjang Jalan Menurut tingkat Kewenangan di Kabupaten Kolaka Timur

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Panjang (KM)
Jalan Negara	163,30
Jalan Provinsi	273,50
Jalan Kabupaten	599,90
TOTAL	1.036,70

Sumber :BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021

Tabel 2-46. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kolaka Timur (KM) Tahun 2016-2020

Jenis Permukaan Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
Aspal	6,00	22,68	40,30	45,10	77,39
Tidak Aspal	1030,70	1014,02	996,40	991,60	959,31
TOTAL	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70	1.036,70

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021

Tabel 2-47. Panjang Jalan Menurut Kondisi (KM) Jalan di Kabupaten Kolaka Timur (KM) Tahun 2018-2019

Kondisi Jalan	2018	2019
Baik	22,68	35,85
Sedang	263,74	291,36
Rusak	373,48	389,09
Rusak Berat	376,80	320,40
Jumlah	1036,70	1036,70

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

Capaian di Bidang Cipta Karya pada Urusan Pekerjaan Umum secara luas telah mengalami peningkatan, dimana beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur untuk mengukur capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun hal ini belum efektif, ditandai dengan Persentase penduduk berakses air minum yang masih mencapai angka 47%. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Kolaka Timur



merumuskan kebijakan Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana transportasi, irigasi, penyediaan air minum dan utilitas umum. Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table 2-48 di bawah ini.

Tabel 2-48. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya di Kab. Kolaka Timur Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tangga bersanitasi layak (persen)	20	40	40	50	50
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (persen)	40	40	40	40	40
Persentase penduduk berakses air minum (persen)	-	-	39	41	47
Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (KK)	-	-	11.357	11.939	13.687
Luas Areal Kawasan Kumuh (Ha)	-	-	997,41	1002,48	1028,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

Capaian Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air di Kabupaten Kolaka Timur jika dilihat dari beberapa indikator secara umum telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun hal ini belum efektif karena melihat Persentase Luas daerah irigasi kabupaten Kolaka Timur dalam kondisi baik yang hanya mencapai 50,38% dimana Kabupaten Kolaka Timur merupakan daerah Agrobisnis yang bergantung pada jaringan Irigasi. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur merumuskan kebijakan Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana transportasi, irigasi, penyediaan air minum dan utilitas umum. Data mengenai Capaian Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table 2-49 berikut.

Tabel 2-49. Capaian Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air di Kab. Kolaka Timur Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Daerah Irigasi	9,9	10,2	10,4	11,7	13,6
Persentase Jaringan Irigasi yang diperbaiki	10,8	3,4	2,1	12,8	43,3
Persentase Jaringan Irigasi yang dipelihara	6,4	2,7	2,1	8,4	7,08
Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	17,2	6,1	4,1	21,1	50,38

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021



Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang pada Urusan Pekerjaan Umum yang melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan telah merumuskan 3 Produk hukum, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040, Penyusunan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tirawuta dan Materi Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Tirawuta yang akan dijadikan dasar dalam mencapai tujuan mewujudkan Infrastruktur Publik yang Berkualitas.

Tabel 2-50. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kolaka Timur

Uraian	Tahun Pelaksanaan
Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2040	2016 - 2020
Penyusunan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tirawuta	2020
Materi Teknis RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Tirawuta	2020

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

D. Sosial

Sebagai upaya mendukung Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial maka disamping menangani permasalahan sosial yang ada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga terus menggali Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, TKSK dan KKDU untuk senantiasa menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Urusan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial meliputi Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di



luar panti sosial dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2-51. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

Kabupaten	Jenis Penyandang Kesejahteraan Sosial					
	Penyandang Disabilitas	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Fakir Miskin	Anak Dengan Kedisabilitas	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial
Kolaka Timur	688	846	1810	37	1496	43

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Kolaka Timur, 2020.

2.3.1.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar

A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kolaka Timur antara lain meliputi :

Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	4 Regulasi
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)mengalami kekerasan(fisik,seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dari 12 bulan terakhir.	1 : 37.831 orang
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,01
Pesentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di perlemen tingkat pusat perlemen daerah dan pemerintah daerah.	7 orang
Proporsi perempuan dan laki laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	3 orang
Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	28 %
Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I,II)	14,81 %

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka Timur.



B. Pangan

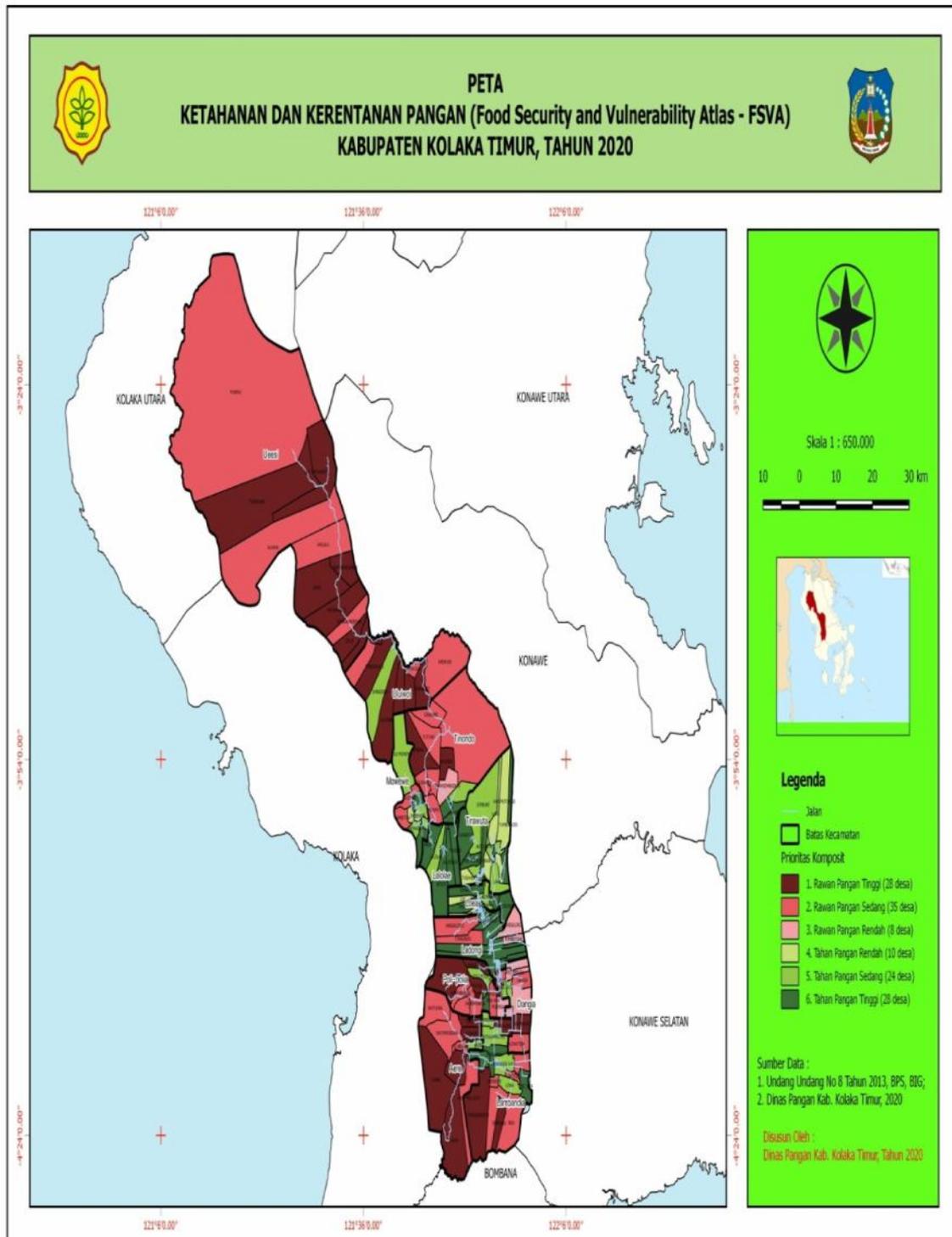
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

Kerawanan Pangan di Kabupaten Kolaka Timur dapat terjadi pada daerah-daerah yang jauh dari sumber-sumber produksi utamanya di Kecamatan Ueesi dan Kecamatan Uluiwoi ini disebabkan karena sarana infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah tersebut kurang memadai.



Gambar 2-18. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kolaka timur Tahun 2020



Sumber : Dinas Pangan Kab. Kolaka Timur Tahun 2020



Tabel 2-52. Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) Kab. Kolaka Timur pada Tahun 2020

No.	Kecamatan	Rawan Pangan Tinggi (Desa)	Rawan Pangan Sedang (Desa)	Rawan Pangan Rendah (Desa)	Tahan pangan Rendah (Desa)	Tahan Pangan Sedang (Desa)	Tahan Pangan Tinggi (Desa)
		1	2	3	4	5	6
1	AERE	5	4	0	0	2	0
2	LAMBANDIA	3	5	0	0	4	3
3	POLI-POLIA	4	4	1	0	2	1
4	DANGIA	1	5	4	0	2	0
5	LADONGI	0	2	2	0	0	6
6	LOEA	0	0	0	3	1	5
7	TIRAWUTA	0	0	0	5	6	5
8	LALOLAE	0	0	0	0	1	4
9	MOWEWE	0	2	0	2	4	2
10	TINONDO	2	6	1	0	1	2
11	ULUIWOI	6	3	0	0	1	0
12	UEESI	7	4	0	0	0	0
Jumlah		28	35	8	10	24	28

Sumber : Dinas Pangan Kab. Kolaka Timur Tahun 2020

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) Kab. Kolaka Timur pada Tahun 2020 adalah : Rawan Pangan Tinggi 28 Desa, Rawan Pangan Sedang 35 Desa, Rawan Pangan Rendah 8 Desa, Tahan Pangan Rendah 10 Desa, Tahan Pangan Sedang 24 Desa dan Tahan Pangan Tinggi Sebanyak 28 Desa.

Pencegahan rawan pangan yang telah dilakukan di Kabupaten Kolaka Timur, sebagai berikut:

1. Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan.
2. Pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses menuju ke sumber-sumber produksi pangan.
3. Penyusunan peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan sebagai acuan dalam penentuan program.

Penanggulangan Kerawanan Pangan, antara lain :

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat/petani melalui Pembinaan pada masyarakat.



2. Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh instansi lain untuk intervensi penanganan rawan pangan kronis (kemiskinan) melalui Dinas Sosial yaitu dengan bantuan sosial/bantuan pangan non tunai.

C. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan dipandang dari beberapa aspek diantaranya kelembagaan dan kebijakan yaitu pemangku kepentingan dan peraturan dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan. Permasalahan pengelolaan sampah saat ini mendorong pemerintah membuat peraturan mengenai pengelolaan sampah salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga melakukan sosialisasi, diseminasi, penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

Sementara berdasarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah pada 2025 pemerintah menargetkan sampah akan berkurang sebesar 30 % dan tertangani sebesar 70 %. Untuk mewujudkan pemenuhan target tersebut Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melakukan upaya Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui indikator yang terukur dan dapat tercapai.

Adapun indikator pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(Permen LHK No. P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018) adalah:

1. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



Kegiatan pengumpulan sampah di Kabupaten Kolaka Timur dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Pada saat pengumpulan, terhadap sampah yang sudah terpilah tidak boleh lagi dilakukan pencampuran kembali.

Dalam pelaksanaan pengumpulan sampah, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya di Kabupaten Kolaka Timur dalam melakukan pengumpulan sampah harus menyediakan:

1. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, yaitu tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
2. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
3. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Potensi timbulan sampah akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur ke depan bila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan diatas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan Dari Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), perlu pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya dengan pelaksanaan uji coba/pengembangan dari replikasi reduce (pembatasan timbulan sampah), reuse (pemanfaatan kembali sampah) dan recycle (pendauran ulang) (3R) skala kawasan di permukiman. Hal ini juga untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah di kemudian hari.

Untuk itu perlu terus dikembangkan pengelolaan sampah secara terpadu dengan konsep berbasis masyarakat (3R) di Kabupaten Kolaka Timur, dan diharapkan proses pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat secara



signifikan dapat mengurangi volume sampah khususnya di Kabupaten Kolaka Timur.

D. Catatan Sipil

Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e-KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua tercatat dalam database kependudukan. Sampai dengan akhir tahun 2020 untuk Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2-53. Rekapitulasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020

Kabupaten	Jml Wajib KTP	Jumlah			Jumlah				Akta Kelahiran			
		Perekaman	%	Sisa	Wajib K.I.A	Cetak K.I.A	%	Sisa	Wajib Akta 0-18	Memiliki Akta 0-18	%	Sisa
Kolaka Timur	88,763	83,569	94,15	5.194	45.668	8.530	18,68	37.138	49.126	46.130	93,90	2.996

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kolaka Timur.

E. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan pengembangan regulasi desa/kelurahan. Sebagian besar Desa di Kabupaten kolaka Timur merupakan Desa berkembang dan tertinggal, perkembangan Desa di Kabupaten Kolaka Timur sampai tahun 2020 tampak pada tabel berikut :



Tabel 2-54. Jumlah dan status perkembang Desa di Kolaka Timur

No	Kategori Desa	Jumlah
1	Desa Maju	6
2	Desa Berkembang	68
3	Tertinggal	42
4	Sangat Tertinggal	1
	Jumlah Desa	117

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kolaka Timur.

F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pelayanan Umum Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang digambarkan dari beberapa indikator terkait dengan keluarga berencana dan sejahtera untuk menurunkan jumlah penduduk khususnya Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2-55. Jumlah PUS, Target, dan realisasi Akseptor KB Baru Menurut Kecamatan di Kolaka Timur tahun 2020

Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Target	Akseptor KB Baru	Persentase
Aere	2.429	477	385	80,71
Lambandia	4.245	958	980	102,30
Poli-polia	1.812	249	310	124,50
Dangia	2.152	218	230	105,50
Ladongi	3.257	422	494	117,06
Loea	1.682	70	138	197,14
Tirawuta	3.613	649	660	101,69
Lalolae	982	119	229	192,44
Mowewe	1.533	213	247	115,96
Tinondo	1.659	289	194	67,13
Uluwoi	1.484	174	169	97,13
Ueesi	1263	167	147	88,02
Kolaka Timur	26.111	4.005	4.183	104,44

Sumber Data : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021



Tabel 2-56. Jumlah Peserta KB aktif menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020

Kec.	PUS	Peserta KB Aktif							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntik	Pil	Jml
Aere	2.429	1	5	-	31	60	856	603	1.556
Lambandia	4.245	7	39	1	23	442	1.293	951	2.756
Poli-polia	1.812	25	62	1	24	179	547	523	1.361
Dangia	2.152	8	10	2	48	159	900	700	1.827
Ladongi	3.257	198	102	14	26	828	1.086	533	2.787
Loea	1.682	82	47	39	6	222	578	514	1.488
Tirawuta	3.613	31	44	15	21	265	1.232	998	2.606
Lalolae	982	5	3	5	20	196	301	302	832
Mowewe	1.533	8	47	122	-	214	480	271	1.142
Tinondo	1.659	17	2	12	9	206	672	372	1.290
Uluwoi	1.484	5	2	5	5	221	601	362	1.201
Ueesi	1263	5	2	5	5	221	529	336	1.103
Koltim	26.111	392	365	221	218	3.213	9.075	6.465	19.949

Sumber Data : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021

G. Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, juga menunjukkan proporsi penduduk yang aktif bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja relatif telah mendapatkan pekerjaan, dimana tingkat pengangguran di usia ini cenderung lebih kecil pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini juga disebabkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Kolaka Timur mempunyai lahan sendiri yang digunakan untuk bercocok tanam sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Data mengenai ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 2-57 berikut ini:



Tabel 2-57. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang di Tamatkan dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah angkatan Kerja	Persentase bekerja terhadap angkatan kerja
SD	27.123	438	27.561	98,41
SMP	13.596	785	14.381	94,54
SLTA	23.111	894	24.005	96,28
Perguruan Tinggi	12.030	460	12.490	96,32
Jumlah	75.860	2.577	78.437	96,71

Pendidikan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
SD	9.332	36.893	74,71
SMP	7.273	21.654	66,41
SLTA	5.263	2.268	82,02
Perguruan Tinggi	671	13.161	94,90
Jumlah	22.539	100.976	77,68

Sumber Data : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

Tabel 2-58. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Bekerja	46.237	29.623	75.860
Pengangguran Terbuka	1.479	1.107	2.577
Jumlah	47.707	30.730	78.437

Sumber Data : BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

H. Perhubungan

Jalan merupakan sarana perhubungan yang dilalui angkutan darat dimana sangat memegang peranan penting dalam memperlancar hubungan kegiatan perekonomian baik antara satu daerah ke daerah lainnya. Kondisi jalan yang baik akan mempermudah mobilitas penduduk dan memperlancar transportasi memindahkan barang dalam hubungan kegiatan ekonomi dan sosial lainnya. Sebaliknya bilamana kondisi jalan kurang baik maka penduduk akan mendapat



kesulitan dalam hubungan kegiatan ekonomi maupun aktifitas lainnya. Pada tahun 2019, untuk panjang jalan Kabupaten Kolaka Timur yaitu sepanjang 1.036,70 Km yang terdiri dari jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Capaian kinerja Pariwisata Kolaka Timur dijabarkan pada tabel berikut :



Tabel 2-59. Data Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Kabupaten Kolaka Timur

No	Kunjungan Wisatawan Mancanegara & Nusantara	Objek Wisata/Tourism Object																Jumlah Total Kunjungan Wisatawan	
		Objek Wisata Air Terjun Tetewa		Objek Wisata Air Terjun Karemotingge		Taman Wisata Pemancingan Bendungan Roko-roko		Objek Wisata Hutan Pinus Puncak Wesalo		Objek Wisata Air Terjun Taore		Objek Wisata Baros Farm House		Puncak Selfi Mowewe		Puncak Hutan Pinus Sorombipi			
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
1	Tahun 2019	6.786	-	8.807	-	12.700	-	70.890	10	5.078	-	16.900	5	19.038	10	10.986	-	151.185	25
2	Tahun 2020	5.708	-	6.805	-	10.408	-	20.887	5	4.077	-	13.670	4	18.096	9	8.875	-	88.526	18

Sumber : Dinas Pariwisata Kolaka Timur



2.3.2.2 Pertanian

Fokus pembangunan di sektor pertanian adalah peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama yaitu tanaman pangan dan perkebunan. Tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan tanaman perkebunan meliputi kakao, kopi, kemiri, kelapa dan lada.

Tabel 2-60. Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Padi Sawah menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

Kecamatan	Luas Tanaman (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
Lambangia	7.052	7.052	305.224	4,33
Ladongi	5.406	5.117	224.078	4,33
Tirawuta	1.376	1.356	58.666	4,33
Mowewe	1.943	2.242	97.012	4,33
Uluiwoi	-	-	-	-
Tinondo	2.376	1.937	83.851	4,33
Lalolae	783	760	32.875	4,33
Poli-polia	1.130	1.210	52.364	4,33
Loea	2.725	2.591	112.134	4,33
Aere	411	411	17.779	4,33
Dangia	723	723	31.274	4,33
Ueesi	-	-	-	-
Jumlah	23.924	23.458	1.015.258	4.33

Sumber: Dinas Pertanian Kolaka Timur 2020

Tabel 2-61. Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Jagung menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
Lambangia	533	390	15.413	3,95
Ladongi	190	215	8.493	3,95
Tirawuta	62	63	2.500	3,95
Mowewe	25	3	119	3,95
Uluiwoi	1.308	307	12.127	3,95
Tinondo	236	177	6.992	3,95
Lalolae	146	130	5.135	3,95
Poli-polia	36	34	1.343	3,95
Loea	36	47	1.857	3,95
Aere	110	77	3.038	3,95
Dangia	555	605	23.898	3,95
Ueesi	1.153	233	9.204	3,95
Jumlah	4.390	2.281	90.115	3,95

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka Timur 2020



Tabel 2-62. Luas lahan dan Produksi Komoditi Perkebunan dan Hortikultura di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

TANAMAN PERKEBUNAN				
No	Komoditi	Luas Lahan (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/ha)
1.	Kakao	60.328,03	21.788,87	513,01
2.	Kopi	1.625,15	2.222,20	2.215,33
3.	Kelapa Dalam	2.407,68	7.416,49	4.133,82
4.	Kelapa Sawit	399,10	878,60	2.696,74
5.	Lada	4.033,65	1.839,44	711,04
6.	Cengkeh	2.681,55	6.567	4.249,11
TANAMAN HORTIKULTURA				
1.	Bawang merah	43	6	12
2.	Cabai besar	213	54	162
3.	Cabai rawit	377	89	261
4.	Kubis	17	5	15
5.	Tomat	287	87	174
6.	Kacang panjang	259	95	376
7.	Bawang daun	114	38	76
8.	Ketimun	155	55	159
9.	Terung	330	53	53
10.	Semangka	38	12	36
11.	Petsai	113	63	63
12.	Kangkung	186	100	500
13.	Bayam	149	92	184

Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Kolaka Timur 2021



2.3.2.3 Perikanan

Fokus pembangunan di sektor Perikanan yaitu Potensi Budidaya Perikanan darat.

Tabel 2-63. Potensi Budidaya dan Luas Kolam Perikanan Darat Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Potensi Budidaya (Ha)		Luas Terolah (Ha) Kolam	
		2019	2020	2019	2020
1	Aere	13	13	5,72	5,72
2	Lambandia	18	18	4,05	4,05
3	Poli Polia	30	30	16,5	16,5
4	Dangia	39	39	17,63	23,12
5	Ladongi	43	43	13,39	24,1
6	Loea	12	12	9,74	9,74
7	Tirawuta	15	15	15,19	15,19
8	Lalolae	18	18	1,85	1,85
9	Mowewe	21	21	13,23	14,6
10	Tinondo	36	36	10,6	10,6
11	Uluiwoi	15	15	3,72	3,72
12	Ueesi	12	12	2	2
	Jumlah	272	272	113,62	131,19

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020.

2.3.2.4 Kehutanan

Fokus pembangunan sektor kehutanan diarahkan untuk menciptakan kelestarian kawasan hutan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat, disisi lain pemanfaatan kawasan hutan diupayakan sesuai dengan standar dan norma Kementerian Kehutanan tentang pengelolaan hutan terpadu. Luas kawasan hutan yang ditetapkan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2-64 dibawah ini:

Tabel 2-64. Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan dan Jenis Hutan di Kabupaten Kolaka Timur (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Kawasan Hutan				Total
	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Konservasi	
Aere	2.748,65	5.302,40	7.988,20	8.437,14	24.476,39
Lambandia	-	-	-	4.766,40	4.766,40
Poli-Polia	2.685,65	621,64	2.300,94	-	5.608,23
Dangia	-	-	-	1.902,52	1.902,52
Ladongi	1.817,17	446,45	2.622,27	2.251,39	7.137,28



Loea	973,49	-	2.677,82	1.228,41	4.879,72
Tirawuta	7.605,30	-	6.389,68	395,83	14.390,81
Lalolae	1.383,69	-	4.888,78	-	6.272,47
Mowewe	5.683,81	-	3.355,79	-	9.039,60
Tinondo	20.994,21	-	17.599,38	-	38.593,59
Uluiwoi	13.861,68	-	8.771,29	-	22.632,97
Ueesi	79.302,54	52,12	7.434,18	-	86.788,84
Kolaka Timur	137.056,19	6.422,61	64.028,33	18.981,69	226.488,82

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur 2021

Luas kawasan yang telah ditetapkan dibagi menurut beberapa jenis hutan sebagai berikut:

Tabel 2-65. Luas Fungsi Kawasan Hutan Kabupaten Kolaka Timur

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persen %
1.	Hutan Lindung	176.59,78	44,24
2.	Taman Nasional	23.058	5,78
3.	Hutan Produksi	13.202,55	3,31
4.	Hutan Produksi Terbatas	106.937,28	26,79
5.	Hutan Produksi Konversi	800,05	0,20
6.	Areal Penggunaan Lain	78.582,80	19,69
	Jumlah	399.180	100,00

Sumber : Peta Pemutakhiran Kawasan Hutan Tahun 2019 & Perda No. 4 Tahun 2020 tentang RTRW Kab. Kolaka Timur Tahun 2020-2040.

2.3.2.5 Transmigrasi

Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu daerah penerima warga transmigrasi di Sulawesi Tenggara. Namun seiring dengan bertambahnya penduduk dan pemekaran daerah, maka ketersediaan lahan untuk permukiman transmigrasi semakin berkurang sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan transmigran. Keadaan permukiman transmigrasi sejak tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2-66. Jumlah Transmigrasi Menurut Jenis di Kabupaten Kolaka Timur

Tahun	Umum		Swakaesa Mandiri		Jumlah	
	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
2016	75	265	-	-	75	265
2017	75	270	-	-	75	270
2018	25	81	-	-	25	81
2019	50	175	-	-	50	175
2020	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur 2021

Tabel 2-67. Jumlah Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan di Kabupaten Kolaka Timur

Tahun	Kecamatan Ueesi	
	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
2016	75	265
2017	75	270
2018	25	81
2019	50	175
2020	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka timur 2021

2.3.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.



Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan merupakan target pencapaian mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka menghadirkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Melalui penerapan SPM, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan pokok dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal Pendidikan bahwa Standar Pelayanan Pendidikan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Standar Pelayanan Pendidikan Minimal Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

2.3.3.1 Target Pencapaian SPM

A. Bidang Pendidikan

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama tahun 2019 yaitu, sebagai berikut:

Tabel 2-68. Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

NO	URUSAN DALAM SPM	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Pendidikan	1) Pendidikan Anak Usia	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	100



		Dini;	dalam pendidikan PAUD	%
		2) Pendidikan Dasar; dan	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %
		3) Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2019.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM pada bidang pendidikan ini sendiri antara lain:

Tabel 2-69. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

NO	URUSAN DALAM SPM	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan	1) Pendidikan Anak Usia Dini;	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	60,96%
		2) Pendidikan Dasar; dan	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	79,56%
		3) Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan disajikan dalam Tabel 2-70 dibawah ini:



Tabel 2-70. Permasalahan yang ada di SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur

NO	URUSAN DALAM SPM	JENIS PELAYANAN DASAR	NO	PERMASALAHAN
1	2	3	4	5
1	Pendidikan	1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2) Pendidikan Dasar; 3) Pendidikan Kesetaraan	1.	Ruang belajar ; Jumlah kebutuhan ruang belajar belum seluruhnya terpenuhi namun saat ini sudah tidak ditemukan lagi di mana satu ruang belajar disekat untuk digunakan oleh rombongan belajar. Namun demikian, rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas baik berat maupun sedang masih dibutuhkan demi kelayakan ruang kelas dan keamanan siswa dalam belajar.
			2.	Perpustakaan; Secara ideal, satu sekolah baik SD maupun SMP memiliki satu ruang/bangunan perpustakaan dimana sekolah menyimpan buku-buku dan siswa/guru dapat melakukan kegiatan literasi. Namun karena keterbatasan anggaran, Dinas Pendidikan Kab. Kolaka Timur melakukan pembangunan dan rehabilitasi ruang perpustakaan secara bertahap.
			3.	Buku pelajaran dan Buku referensi koleksi Perpustakaan Sekolah; Sebagaimana jumlah perpustakaan yang sangat minim, demikian juga dengan jumlah buku bacaan koleksi perpustakaan. Penyediaan buku koleksi perpustakaan harus pula diikuti dengan pembangunan gedung/ruang perpustakaan. Ketersediaan perpustakaan dan bukubacaan dapat menambah meningkatkan kemampuan literasi siswa.
			4.	Kantor/Ruang Guru ; Ruang guru merupakan bagian yang vital bagi sekolah dimana guru dapat berkumpul dan mempersiapkan materi pelajaran. Saat ini, pembangunan kantor /ruang guru menjadi dan akan terus menjadi prioritas dan diharapkan setiap sekolah pada akhirnya akan memiliki satu ruang guru masing-masing.

			<p>5. Laboratorium; Pengadaan laboratorium beserta peralatannya dianggap mendesak untuk dilakukan mengingat pentingnya ketersediaan ruang laboratorium sebagai sarana belajar bagi siswa demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur. Penambahan laboratorium baik IPA maupun komputer akan menjadi prioritas.</p> <p>6. Sanitasi sekolah; Salah satu masalah klasik gedung sekolah adalah tidak tersedianya atau rusaknya sarana sanitasi sekolah meliputi sarana air bersih dan jamban/WC siswa dan guru. Demi menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman bagi warga sekolah, Dinas Pendidikan Kab. Kolaka Timur akan terus mengusahakan penyediaan sarana sanitasi sekolah.</p> <p>7. Tenaga Pengajar (guru) dan Tenaga Kependidikan; Salah satu permasalahan utama pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur adalah ketersediaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan banyak diisi oleh tenaga honorer dengan proses seleksi yang tidak memadai karena kurangnya jumlah pengajar/guru PNS.</p>
--	--	--	--

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2019.



Dan dari beberapa permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Kolaka Timur tersebut, ada beberapa solusi sebagai alternatif atau opsi pemecahannya, yaitu :

Tabel 2-71. Solusi Pemecahan Masalah SPM di Bidang Pendidikan

NO	URUSAN DALAM SPM	JENIS PELAYANAN DASAR	NO	SOLUSI
1	2	3	4	5
1	Pendidikan	1) Pendidikan Anak Usia Dini;	1.	Ruang belajar ;
		2) Pendidikan Dasar;		Pemenuhan jumlah kebutuhan ruang belajar dan rehabilitasi Ruang kelas baik berat maupun sedang terus menerus dianggarkan pada APBD Kabupaten Kolaka Timur dengan sumber dana DAU dan/atau DAK.
		3) Pendidikan Kesetaraan	2.	Perpustakaan;
				Walau dengan minimnya anggaran, Dinas Pendidikan Kab. Kolaka Timur tetap melakukan pembangunan dan rehabilitasi ruang perpustakaan secara bertahap.
			3.	Buku pelajaran dan Buku referensi koleksi Perpustakaan Sekolah;
				Penyediaan buku koleksi perpustakaan harus pula diikuti dengan pembangunan gedung/ruang perpustakaan. Karena dengan ketersediaan perpustakaan dan buku bacaan dapat menambah meningkatkan kemampuan literasi siswa.
			4.	Kantor/Ruang Guru;
				Saat ini, pembangunan kantor /ruang guru menjadi dan akan terus menjadi prioritas dan diharapkan setiap sekolah pada akhirnya akan memiliki satu



				ruang guru masing-masing.
			5.	Laboratorium; Penambahan laboratorium baik IPA maupun komputer akan menjadi prioritas.
			6.	Sanitasi sekolah; Demi menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman bagi warga sekolah, Dinas Pendidikan Kab. Kolaka Timur akan terus mengusahakan penyediaan sarana sanitasi sekolah.
			7.	Tenaga Pengajar (guru) dan Tenaga Kependidikan; Melakukan perekrutan untuk tenaga pengajar dan tenaga kependidikan dengan proses seleksi yang memadai.

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, 2019



B. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri :

- Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
- Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi, agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan terdiri atas :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita;
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, produktif, dan usia lanjut;



- Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, diabetes melitus; orang dengan gangguan jiwa berat, dan orang terduga tuberkulosis;
- Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

2. Target Pencapaian Indikator dan Nilai SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 2-72. Target Pencapaian SPM di Bidang Kesehatan

NO	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
4	Pelayanan kesehatan balita	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	100	2019	Dinkes Kab. Koltim
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human ImmunodeficiencyVirus)	100	2019	Dinkes Kab. Koltim

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 2-73. Realisasi Pencapaian SPM di Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	REALISASI (%)
1	2	3
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	80 %
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	86 %
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	90 %
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	50 %
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	57 %
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	64 %
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	74 %
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HYPERTENSI	
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	45 %
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MILITUS	
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	153 %
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA(ODGJ) BERAT	
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	73 %



11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	63 %
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS IMMUNODEFICIENCY VIRUS	
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	66 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

4. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Kesehatan

Permasalahan :

- Data sasaran yang tidak jelas menyebabkan sasaran tidak dapat dicapai.
- Puskesmas melayani penduduk yang tersebar luas, dengan fasilitas dan infrastruktur yang kurang baik (air, listrik, bangunan) berkaitan dengan infrastruktur, prasarana/sarana dan SDM.
- Dukungan sumber daya manusia yang kurang optimal sesuai dengan kompetensi (berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan).
- Hampir semua Puskesmas belum memenuhi standar sesuai dengan amanat Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019.

Solusi/ upaya yang dilakukan:

- Menetapkan data sasaran yang valid berdasarkan koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program.
- Peningkatan pelayanan kesehatan dengan Pendekatan Keluarga (PIS- PK).
- Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak.
- Peningkatan sarana prasarana Puskesmas.
- Peningkatan mutu tenaga kesehatan.
- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui Akreditasi.
- Peningkatan tata kelola informasi kesehatan.
- Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan berbasis kinerja.
- Melaksanakan program-program inovasi di tiap Puskesmas.



Adapun standar ketenagaan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-74. Standar Ketenagaan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

STANDAR KETENAGAAN MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 43 TAHUN 2019														STANDAR KETENAGAAN MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 43 TAHUN 2019																		
NO	PUSKESMAS	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promkes	Sanitarian	Nutrisionis	Farmasi	Lap. Medik	SIK	Keuangan	Tata usaha	Pekarya	JUMLAH	NO	PUSKESMAS	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promkes	Sanitarian	Nutrisionis	Farmasi	Lap. Medik	SIK	Adm. Keuangan	Tata usaha	Pekarya	JUMLAH	
1	Lambangia	2	1	8	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	20	1	Lambangia	2	1	8	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	20
2	Aere	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	2	Aere	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
3	Poli-Polia	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	3	Poli-Polia	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
4	Dangla	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	4	Dangla	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
5	Ladongi	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	5	Ladongi	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
6	Loea	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	6	Loea	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
7	Tirawuta	2	1	8	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	20	7	Tirawuta	2	1	8	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	20
8	Tinondo	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	8	Tinondo	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
9	Lalolae	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	9	Lalolae	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
10	Mowewe	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	10	Mowewe	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
11	Uluiwoi	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	11	Uluiwoi	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
12	Ueesi	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	12	Ueesi	1	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
TOTAL																TOTAL	14	5	62	108	3	4	10	10	3	0	0	6	8	233		

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Jenis pelayanan dasar pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan yang berkaitan dengan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2019 di Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2-75. Target Pencapaian SPM di Bidang PU dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Target		
1	2	3	4	5	6	7
I	Sumber Daya Air	Penyediaan kebutuhan pokok Air minum sehari-hari.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari.	2000 KK	2019	Berdasarkan atas target minimal kebutuhan air bersih di tiap



						kabupaten/ kota
II	Penyehatan Lingkungan	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1000 KK	2019	Dinas PU, penataan Ruang dan Perhubungan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, 2019

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-76. Realisasi Pencapaian SPM di Bidang PU dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan kebutuhan pokok Air minum sehari-hari.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari –hari.	1526 KK	2019
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	790 KK	2019

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, 2019

4. Permasalahan yang dihadapi dan solusi.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pemerintah kabupaten Kolaka Timur terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal adalah kurangnya koordinasi antar sektor yang terkait, sehingga menghambat kinerja pencapaian SPM.

Adapun solusi yang dapat dilakukan terkait masalah ini adalah dengan melakukan koordinasi yang lebih dan kerjasama yang harus selalu diperkuat untuk melancarkan pencapaian SPM ini.



D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
- Rehabilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM Kabupaten Kolaka Timur

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 85 %.

Tabel 2-77. Target Pencapaian SPM di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Cakupan jumlah rumah yang layak huni bagi korban bencana	85%	2019
2.	Rehabilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.	Cakupan jumlah Rehabilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	85%	2019

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2-78. Realisasi Pencapaian SPM di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal Indikator	Sasaran dalam Tahun	Target dalam Tahun	Jumlah absolut	
						%
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Cakupan jumlah rumah yang layak huni bagi korban bencana	40	85%	0	0



	bagi					
	korban bencana					
2.	Rehabilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.	Cakupan jumlah Rehabilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	40	85%	0	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

4. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka Timur terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- a. Urusan dan program yang telah ditargetkan belum dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran dalam hal ini APBD Kab. Kolaka Timur.
- b. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
- c. Belum sinerginya upaya implementasi standar pelayanan minimal.

Adapun solusi yang tepat untuk pemenuhan pelayanan dasar standar pelayanan minimal yaitu perencanaan program dan kegiatan yang matang baik secara perencanaan maupun pemenuhan. Hal ini dapat dicapai dengan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran sesuai target yang akan dicapai. Selain itu pembekalan pemahaman akan permasalahan standar pelayanan minimal perlu digalakkan agar tercipta koordinasi antar pihak terkait.

E. BIDANG BENCANA

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- Pelayanan informasi rawan bencana.



- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM

Target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang bencana Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-79. Target Pencapaian SPM di Bidang Bencana

No	Program	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian SPM (Tahun)
		Indikator	Nilai (%)	
1	2	3	4	5
1.	Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawanbencana	100 %	2019
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	2019
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2019
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Pemadam Kebakaran ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk x 100% jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	100 %	2019
5.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100 %	2019

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Koltim, 2019



3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-80. Realisasi Pencapaian SPM di Bidang Bencana

No	Program	No	Standar Pelayanan Minimal	Capaian Kinerja		
			Indikator	Lokasi	Jumlah (Jiwa)	Total
1	2	3	4	5		
1.	Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Ladongi Ueesi Uluiwoi Aula Bupati	2.550 4.223 1.560 1.200	9.533 Jiwa
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Uluiwoi	5.454 Jw	5.454 Jiwa
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Ueesi Uluiwoi Dangia Ladongi Tirawuta	2.505 3.275 7.289 5.340 1.700	20.109 Jiwa
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	4.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Pemadam Kebakaran ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk x 100% jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	29/29x100%	100%	
5.	Waktu tanggap (responsetime) penanganan kebakaran	5.	Jumlah waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	34,4 menit	34,4 menit	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Koltim, 2019



4. Permasalahan dan Solusi

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Bencana, yaitu :

- Jumlah PNS dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih minim/kurang.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya anggaran kegiatan operasional dalam mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.
- Masih kurangnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/instansi terkait.

Sedangkan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- Mengadakan perekrutan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan.
- Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan bidang urusan Bencana.

F. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, sosial dan budaya, maka gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut

:



- Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota;
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM Kabupaten Kolaka Timur

Satpol PP Kabupaten Kolaka Timur telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kolaka Timur dari segi penganggarnya pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-81. Indikator dan Nilai SPM

No	Program	Standar pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian SPM (Tahun)	Satuan Kerja/Instansi Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Cakupan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kab/kota	55 %	2019	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3x patroli dalam sehari	2019	Satuan Polisi Pamong Praja
		3. Cakupan rasio Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kab/kota	4 orang setiap Desa dan Kelurahan	2019	Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber : Satpol-PP Kab. Koltim, 2019



Adapun indikator dan nilai SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2-82. Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Target dan Capaiannya

No	Indikator Kinerja SPM Standar pelayanan Minimal Indikator	Target	Capaian	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kab/kota	100 %	50 %	
	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	90 %	50 %	
	Cakupan rasio Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kab/kota	90 %	50 %	

Sumber : Satpol-PP Kab. Koltim, 2019

3. Realisasi pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat oleh satpol PP Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2019 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2-83. Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Target dan Capaiannya

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun 2019
1	2	3	4
1	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	1). Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kab/kota: a. Jumlah pelanggaran Perda dan /atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan. b. Jumlah pelanggaran Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan dan/ataudipantau	2 1



	2). Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:	
	a. Banyaknya kelompok patroli dikalikan 2 kali patroli dalam sehari.	4
	b. Banyaknya kelompok Kecamatan (jumlah Kecamatan).	12
	3). Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kab/kota:	
	a. Jumlah Satlinmas.	266
	b. Jumlah Desa/Kelurahan	133

Sumber : Satpol-PP Kab. Koltim, 2019



Berdasarkan Target capaian SPM diatas, maka capaian target SPM disajikan pada table berikut:

Tabel 2-84. Hasil capaian standar pelayanan minimal ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KABUPATEN	PENGHITUNGAN		TARGET NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota	3 kasus pelanggaran yang ditangani	$\frac{\text{Jml Pelanggaran Perda yang ditangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\%$	100 %
		2. Cakupan patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	4 kelompok Di 12 Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Patroli}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 3$	$\frac{4 \text{ klp} \times 3}{12} = 1$	3 x Patroli dalam sehari
		3. Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten /Kota	266 Orang Laporan bidang tibumtranmas tahun 2019	$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}$	$\frac{266}{133} = 2$	1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya

Sumber : Satpol-PP Kab. Koltim, 2019

Keterangan :

- Data Bidang Penegakan Perda SatpolPP.
- Data Bidang Tibumtranmas SatpolPP.
- Data Bidang Linmas SatpolPP.



Salah satu gambaran pemenuhan indikator SPM bidang ketentraman Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota:

Pada tahun 2019 data dari bidang Penegakan Perda Satpol-PP telah terjadi pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan sebanyak 2 kasus.

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/dipantau}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pada tahun 2019 data dari bidang tibumtransmas kelompok patroli sebanyak 4 kelompok berpatroli wilayah kecamatan 1 kali sehari di 12 kecamatan dan patroli tiap-tiap pos dilaksanakan 3 kali dalam sehari. Rasio kelompok patroli:

$$\frac{\text{Kelompok patroli dikali 3 patroli dalam sehari}}{\text{Kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)}}$$

$$\frac{4}{12} \times \frac{3}{1} = 1$$

- c. Cakupan rasio petugas LINMAS Rasio Jumlah Linmas per-RT Menghitung rasio Linmas per – Desa/Kelurahan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} = \frac{266}{133} = 2$$



4. Permasalahan dan Solusi.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang ketentraman Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yaitu :

- Jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP yang minim/kurang memadai.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.
- Produk hukum seperti Peraturan Daerah yang ada saat ini masih terbatas dan masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat.
- Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/instansi terkait.

Sedangkan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.
- Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyesuaikan PERDA yang dibutuhkan.
- Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



G. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM pusat yaitu kepada Kementerian Sosial, dimana kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2-85. Target Pencapaian Indikator dan Nilai SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai (%)	
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	2019
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	Persentase penyandang anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	2019
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.	Persentase penyandang Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	2019
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase penyandang tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	2019
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100 %	2019

Sumber : Dinas Sosial Kab. Koltim, 2019



3. Realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar bidang sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2019 tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan sebagai berikut:

Tabel 2-86. Realisasi Pencapaian Indikator dan Nilai SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Ket
		Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	50 %	2019	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	Persentase penyandang anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	82 %	2019	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.	Persentase penyandang Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100 %	2019	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.	Persentase penyandang tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	-	2019	Tidak ada gelandangan & pengemis
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.	100 %	2019	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Koltim, 2019

4. Permasalahan dan Solusi

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial selama tahun 2019 antara lain adalah :

- Masih kurangnya penanganan penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
- Masih kurangnya penanganan penyandang anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.



- Jumlah PNS dalam lingkup Dinas Sosial yang masih minim/kurang. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan untuk mendukung pelaksanaan SPM.
- Produk hukum seperti Peraturan Daerah tentang penanganan bencana belum ada.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- Solusi dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan upaya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta melaksanakan kegiatan pelayanan/rehabilitasi kesejahteraan sosial, baik yang bersifat pelayanan publik diantaranya, pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), maupun pemberian bantuan langsung serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat stimulant untuk usaha ekonomi produktif para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Mengadakan perekrutan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan.
- Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan bidang urusan Bencana.



Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-87. Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

No	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Anak balita terlantar	-	Orang
2	Anak terlantar	35	Orang
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	5	Orang
4	Anak jalanan	-	Orang
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	124	Orang
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	5	Orang
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	97	Orang
9	Penyandang Cacat / Disabilitas	657	Orang
10	Tuna Susila	-	Orang
11	Gelandangan	-	Orang
12	Pengemis	-	Orang
13	Pemulung	2	Orang
14	Kelompok Minoritas	-	Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-	Orang
16	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	-	Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	Orang
18	Korban Trafficking	-	Orang
19	Korban Tindak Kekerasan	5	Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	Orang
21	Korban Bencana Alam	2131	Orang
22	Korban Bencana Sosial	81	Orang
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	214	Orang
24	Fakir Miskin	11.365	Orang
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	Orang
26	Komunitas Adat Terpencil	-	Orang
Jumlah		14.726	Orang

Sumber : Dinas Sosial Kab. Koltim, 2019



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kabupaten Kolaka Timur selain mempunyai letak yang strategis dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah terutama disektor pertanian, tampak dari kontribusinya yang hampir mencapai setengahnya dari total perekonomian Kabupaten Kolaka Timur, dengan besaran mencapai 42,06persen pada tahun 2019. Kabupaten Kolaka Timur mempunyai wilayah seluas 3.634,74 Km² dan terbagi menjadi 12 Kecamatan yaitu: Kecamatan Ladongi, Lambandia, Tirawuta, Mowewe, Uluiwoi, Tinondo, Lalolae, Poli-Polia, Aere, Dangia, Loea dan Ueesi.

Kabupaten Kolaka Timur mempunyai potensi sumber daya manusia yang cukup besar di Sulawesi Tenggara. Penduduk Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 133.324 jiwa yang terdiri atas 68.484 jiwa penduduk laki-laki dan 64.480 jiwa penduduk perempuan. Dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 1,88 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 mencapai 37 jiwa/Km

Salah satu indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) memegang peranan yang sangat penting adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) karena indikator tersebut secara tidak langsung dapat menggambarkan tingkat kemahalan barang-barang konstruksi di Kabupaten Kolaka Timur. Angka IKK adalah jenis indeks spasial yang menunjukkan perbandingan antara dua atau beberapa wilayah dalam satu kurun waktu.

Tabel 2-88. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019

Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019
Buton	101,91	97,23	105,06	104,05
Muna	101,81	101,93	102,86	103,54
Konawe	95,25	96,83	97,92	100,10
Kolaka	93,21	91,30	95,67	93,89
Konawe Selatan	96,33	91,12	95,12	94,97
Bombana	101,51	96,52	98,43	96,55
Wakatobi	111,65	109,58	108,48	106,13
Kolaka Utara	102,53	101,42	103,97	99,33
Buton Utara	112,53	114,33	109,09	110,32



Konawe Utara	98,06	88,93	98,64	100,48
Kolaka Timur	89,94	91,53	90,93	92,38
Konawe Kepulauan	103,01	106,15	107,09	104,97
Muna Barat	107,20	105,68	108,97	107,49
Buton Tengah	105,55	106,29	105,42	105,60
Buton Selatan	111,22	103,16	108,61	110,55
Kota Kendari	97,76	92,65	93,03	91,45
Kota Bau-Bau	107,79	105,47	107,00	105,76

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020.

Tabel diatas menunjukkan IKK Kabupaten Kolaka Timur sebesar 92,38 persen pada tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang mempengaruhi nilai IKK Kabupaten Kolaka Timur, diantaranya:

1. Kondisi geografi, Kabupaten Kolaka Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Kolaka yang dikenal sebagai jalur pintu masuk arus barang dari dan ke Sulawesi Tenggara melalui pelabuhan kolaka. Kondisi ini juga ditunjang oleh infrastruktur jalan yang memadai sebagai jembatan yang memperlancar proses distribusi barang dari dan ke Kolaka Timur.
2. Tingkat kemahalan harga barang/bahan bangunan, sewa alat dan balas jasa pekerja sector konstruksi. Keberadaan supplier yang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan konstruksi semakin banyak jumlahnya di Kabupaten Kolaka Timur seiring meningkatnya pembangunan.
3. Pemakaian barang-barang konstruksi yang berasal dari luar Kabupaten Kolaka Timur, misalnya pasir, sudah cenderung menurun bila dibandingkan dengan bahan-bahan konstruksi yang berasal dan dihasilkan di luar kabupaten ini. Bangunan konstruksi memerlukan berbagai macam jenis barang yang saling melengkapi mulai dari pasir, batu, batu-bata, kayu, besi, semen, kaca, pipa, seng, aspal dan sebagainya hingga ke penggunaan peralatan berat. Diantara barang-barang konstruksi tersebut beberapa diantaranya dapat dihasilkan Di Kabupaten Kolaka sendiri seperti pasir, batu dan kayu.



Struktur perekonomian suatu wilayah tercermin dari kontribusi nilai tambah yang tercipta dari masing-masing kategori. Kategori yang menjadi ciri khas dari suatu wilayah akan memiliki kontribusi yang dominan, kemudian diikuti oleh kategori lain dengan kontribusi yang lebih kecil. Dimaksudkan dengan sektor yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap nilai PDRB disuatu wilayah. Selama lima tahun terakhir Struktur ekonomi Kabupaten Kolaka Timur masih ditopang oleh empat kategori lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Pertambangan dan Penggalian.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019, Perekonomian kabupaten Kolaka Timur masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi dari sektor Pertanian mencapai 42,06 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan 13,75 persen dan konstruksi 11,78 persen. Secara umum, perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui distribusi tiap sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan distribusi tiap sektor dapat diperoleh struktur ekonomi di wilayah tersebut. Berikut disajikan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2015-2019.

Tabel 2-89. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen) 2016-2020

Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Buton	4,74	4,93	5,04	4,12	-0,54
Muna	6,08	5,02	5,16	5,41	0,07
Konawe	5,53	5,21	10,70	11,84	6,42
Kolaka	5,13	10,38	5,84	6,14	-3,40
Konawe Selatan	6,95	6,69	5,66	5,69	-2,22
Bombana	5,41	6,54	5,83	6,99	0,56
Wakatobi	7,97	5,96	6,49	6,60	0,76
Kolaka Utara	7,67	6,03	6,59	6,10	0,40
Buton Utara	6,04	6,24	5,85	5,69	0,99



Konawe Utara	5,64	6,00	6,38	6,41	-0,72
Kolaka Timur	7,40	5,11	4,77	5,91	-0,31
Konawe Kepulauan	7,82	7,10	7,42	7,36	-0,63
Muna Barat	7,21	5,31	6,62	6,79	0,42
Buton Tengah	8,08	6,47	5,83	6,26	3,07
Buton Selatan	7,16	6,98	5,48	5,94	-0,71
Kota Kendari	9,01	6,38	6,08	6,48	-1,30
Kota Bau-Bau	8,04	6,87	6,71	6,59	-0,81
Sulawesi Tenggara	6,88	6,76	6,40	6,50	-0,65

Sumber: Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2021.

Perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dari tahun 2016 sampai tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang positif, terkecuali pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif dengan total pertumbuhan sebesar 22,88 persen. Pertumbuhan terbesar pada tahun 2016 (7,40 persen), dan sebaliknya yang terkecil pada tahun 2020 (-0,31 persen). Perlambatan laju pertumbuhan tahun 2020 sebagian besar disebabkan oleh stagnannya perekonomian pada sektor tanaman pangan dan hortikultura, dimana sektor ini tidak sama sekali tumbuh dan beberapa sektor yang bahkan nilai pertumbuhannya negatif. Hal tersebut tentunya tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian ditahun berikutnya. Pada tahun 2018 perekonomian tetap tumbuh meskipun menurun dari pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kolaka Timur melambat (5,91 persen), hal ini disebabkan oleh adanya bencana banjir pada pertengahan tahun yang mengakibatkan banyak petani utamanya petani padi sawah mengalami gagal panen. Perlambatan pertumbuhan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2020. Pola perekonomian di Indonesia secara umum sangat terpengaruh oleh pandemi yang terjadi.



Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel. 2-90. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	-	-	4,77%	5,91%	-0,31%		
1.1.1.2	PDRB per kapita	-	-	31,39%	33,21%	-		
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf	-	94,81%	94,4%	94,9%	95,0%	97	Belum tercapai (<)
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	-	-	7,18	7,35	7,56	7,68	Melampaui (>)
1.2.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	-	-	-	12,15	12,41	12,75	Belum tercapai (<)
1.2.1.4	Angka Harapan Hidup	-	71,66	71,99	72,33	-	72,77	Belum tercapai (<)
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1.	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun)	-	-	13.224	12.602	12.940	13.451	Belum tercapai (<)
2.1.1.1.1.	Rasio Murid terhadap Guru (TK)	-	-	-	-	15,94%	1:15	
2.1.1.1.1.	Rasio Murid terhadap Guru (SD)	-	-	-	-	9,73%	1:20	
2.1.1.1.1.	APM	-	-	96,13%	99,19%	98,73%	100	Belum tercapai (<)
2.1.1.1.1.	APK	-	-	116,45%	100,17%	101,48%	100	Melampaui (>)
2.1.1.1.1.	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun)	-	-	5.448	5.256	5.347	7.406	Belum tercapai (<)
2.1.1.1.1.	Rasio Murid terhadap Guru (SMP)	-	-	-	-	10,33%	1:36	
2.1.1.1.1.	APM	-	-	74,68%	76,95%	84,54%		
2.1.1.1.1.	APK	-	-	82,76%	98,35%	101,40%	100	Melampaui (>)
2.1.1.1.1.	Angka partisipasi sekolah (16-18 Tahun)	-	-	5.150	5.102	3.978	4030	Melampaui (>)
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Jumlah Fasilitas Kesehatan	12 Pusk, 17 Pustu	12 Pusk, 17 Pustu	12 Pusk, 17 Pustu	12 Puks, 17 Pustu, 11 Polindes, 153 Posyandu, 69 Poskesdes	12 Puskesmas	12 Puskesmas	Sesuai (=)
2.1.3	Jumlah Tenaga Medis (Dokter)	-	-	-	19 Orang	16 Orang	16 Orang	Sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.3.1	Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan dan Perawat)	-	-	-	181 Orang	330 Orang	132 Orang	Melampaui (>)
2.1.3.2	Jumlah Tenaga Non Medis	-	-	22 Orang	14 Orang	42 Orang	62 Orang	Melampaui (>)
2.1.3.3	Jumlah Kasus Penyakit	-	-	-	-	-		
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	-	-	4,48	4,03	4,2	4,8	Melampaui (>)
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	-	-	42,27%	42,06%	42,49%	42,36%	Melampaui (>)
2.2.1.3	Luas Lahan Sawah Irigasi (Tehnis)	-	-	12.985,5Ha	12.985,5Ha	13.485,5Ha	16.000Ha	Belum tercapai (<)
2.2.1.4	Luas Lahan Sawah Pengairan (Tadah Hujan)	-	-	1.715 Ha	1.715 Ha	1.819 Ha	2.000Ha	Belum tercapai (<)
2.2.1.5	Luas Lahan Kakao	-	-	-	63.693,2 Ha	60.328,03 Ha		
2.2.1.6	Jumlah Produksi Kakao	-	-	-	28.354,7 Kg	21.788,87 Kg		
2.2.1.7	Jumlah Produktifitas Kakao	-	-	-	445,18 Kg	513,01 Kg		
2.2.2	Perikanan							
2.2.2.1	Luas Potensi Budidaya (Ha)	-	-	310,35 Ha	254,43 Ha	272,00 Ha	250Ha	Melampaui (>)
2.2.2.2	Luas Terolah (Ha) Kolam	-	-	169,54 Ha	113,62 Ha	131,19 Ha	200Ha	Belum tercapai (<)
2.2.3	Kehutanan							
2.2.3.1	Luas Hutan Produksi Biasa (HPB)	-	-	-	-	6.422,61 Ha		
2.2.3.2	Luas Hutan Produksi Terbatas (HPT)	-	-	-	-	64.028,33 Ha		
2.2.3.3	Luas Hutan Lindung (HL)	-	-	-	-	137.056,19 Ha		
2.2.3.4	Luas Hutan Konservasi	-	-	-	-	18.981,69 Ha		
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	-	-	2.673.119,36	2.864.590,36	2.919.265,45		
3.1.1.2	Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita (LNPR)	-	-	33.830,46	19.370.453,00	37.669,59		
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai Tukar Petani			95,22%	93,46%	96,36%	100%	Belum tercapai (<)
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Panjang jalan (Km) di Aspal	-	22,680	34,12 Km	49,72 Km	77,392	1036,7	Belum tercapai (<)
3.2.1.2	Panjang jalan (Km) Kerikil	-	1.014.020	1.002,58 Km	986,98 Km	959,308		
3.2.1.3	Kondisi Jalan (Baik)	-	22,680	22,68	35,85	21,305	1036,7	Belum tercapai (<)
3.2.1.4	Kondisi Jalan (Sedang)	-	263,738	263,74	291,36	827,440	1036,7	Belum tercapai (<)
3.2.1.5	Kondisi Jalan (Rusak Ringan)	-	373,487	373,48	389,09	165,165		
3.2.1.6	Kondisi Jalan (Rusak Berat)	-	376,795	376,80	320,40	22,790		
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	-	100	100	Sesuai (=)
3.2.2.2	Luas wilayah produktif	-	-	-	-	-		



BAB III

Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah diarahkan untuk menjamin ketersediaan anggaran bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sementara itu pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah.

Gambaran Keuangan Daerah menyajikan informasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam mengelola keuangan daerah pada periode 2016-2020 atau satu periode kepemimpinan kepala daerah. Informasi ini mencakup kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Bagian ini juga merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam memproyeksikan kondisi keuangan daerah 2021-2026.



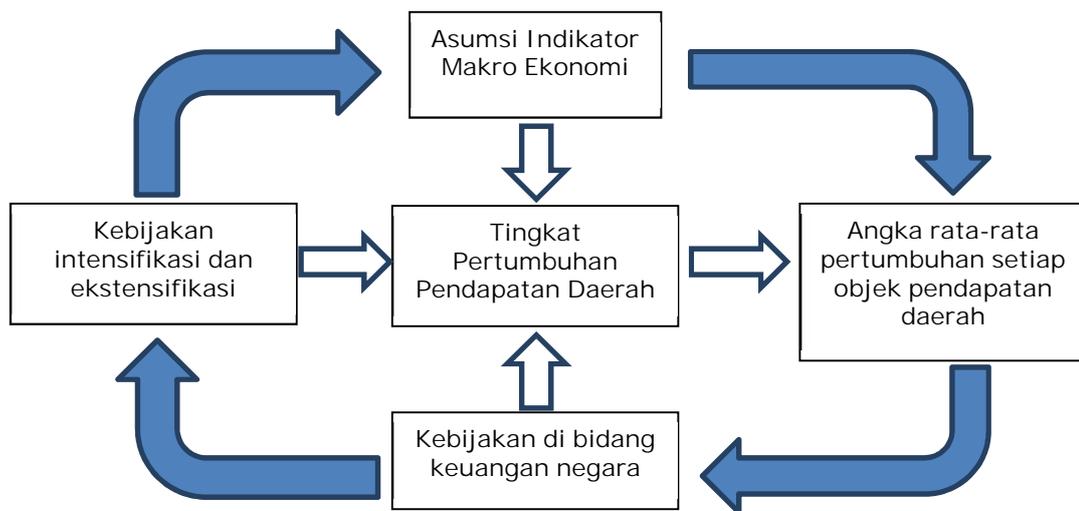
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya bermakna sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- (1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- (3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- (4) Kebijakan di bidang keuangan negara.

Gambaran kapasitas keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3-1. Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah



Gambar tersebut menunjukkan bahwa, pendapatan daerah pada dasarnya ditunjang oleh tiga faktor utama, yaitu Kebijakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi, Indikator Makro Ekonomi, dan



Kebijakan Keuangan Negara. Hasil dari ketiga kebijakan tersebut adalah terlaksananya pembangunan dari faktor pembangun ini berdampak pada tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah, jika tingkat pertumbuhan daerah terus menerus mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Tujuan utama Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk memacu daerah agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan yang lebih baik yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan semakin berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Kemampuan daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari PAD, menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan APBD dan kemandirian suatu daerah.



Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020

NO	URAIAN	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rata-rata Realisasi Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan	645,452,028,184.00	658,749,595,060.00	651,289,077,999.00	721,903,610,481.00	725,508,528,879.00	3.07
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15,406,678,172.00	34,381,357,159.00	38,827,555,752.00	25,097,174,195.00	25,211,579,665.00	25.30
1.1.1.	Pajak Daerah	3,233,410,158.00	4,264,580,185.00	6,268,300,941.00	5,426,792,934.00	5,386,243,648.00	16.18
1.1.2.	Retribusi Daerah	1,256,797,159.00	1,655,898,626.00	1,835,088,874.00	2,280,684,560.00	1,670,343,965.00	10.02
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	767,960,788.00	1,650,675,654.00	2,094,787,934.00	3,960,189,800.00	6,957,607,955.00	76.65
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	10,148,510,067.00	26,810,202,694.00	28,629,378,003.00	13,429,506,901.00	11,197,384,097.00	25.31
1.2.	Dana Perimbangan	511,621,437,613.00	524,073,129,041.00	516,096,340,429.00	564,930,058,899.00	634,185,774,002.00	5.66
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,861,555,489.00	8,483,555,527.00	15,616,344,092.00	18,545,269,998.00	32,270,810,812.00	30.46
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	404,289,270,000.00	401,256,422,000.00	402,711,812,000.00	418,519,936,000.00	383,189,558,000.00	-1.23
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	83,992,302,000.00	114,333,151,514.00	97,768,184,337.00	127,864,852,901.00	122,043,239,190.00	11.97
1.2.4.	Dana Insentif Daerah (DID)					26,793,690,000.00	0
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	118,423,912,399.00	100,295,108,860.00	96,365,181,818.00	131,876,377,387.00	22,666,870,000.00	-16.297
1.3.1.	Hibah	-	-	-	20,139,681,094.00	22,667,970,000.00	3.14



1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**)	7,678,357,099.00	9,214,708,860.00	11,753,554,818.00	15,674,328,293.00	16,650,615,212.00	21.79
1.3.4.	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	108,570,555,300.00	-	-	-	-	0
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,175,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	0
1.3.6.	Pendapatan Dana Desa	-	91,021,036,000.00	84,611,627,000.00	96,012,368,000.00	96,682,166,000.00	0.00
	Pendapatan Dana Kapitasi		59,364,000.00				0
2	Belanja	621,375,305,820.00	669,561,764,858.00	634,456,705,076.20	707,382,881,827.00	720,588,570,040.00	3.97
2.1	Belanja Tidak Langsung	285,738,268,867.00	293,709,182,799.00	291,271,278,660.00	325,956,111,545.00	393,013,101,482.00	8.61
2.1.1.	Belanja Pegawai	161,456,041,170.00	154,454,944,702.00	161,931,853,060.00	178,910,878,345.00	181,943,128,782.00	3.17
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-				0
2.1.3.	Belanja Subsidi	500,000,000.00	1,000,000,000.00				0.00
2.1.4.	Belanja Hibah	5,715,921,466.00	4,217,978,497.00	2,617,885,000.00	3,762,400,000.00	50,885,866,600.00	308.02
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	267,500,000.00	-			190,350,000.00	-25
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	-	-				
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	116,376,608,600.00	134,036,259,600.00	126,221,540,600.00	140,082,833,200.00	136,769,743,400.00	4.49



2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,422,197,631.00	-	500,000,000.00	3,150,000,000.00	23,224,012,700.00	266.82
2.1.9.	Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Keagamaan				50,000,000.00		-25.000
2.2	Belanja Langsung	335,637,036,953.00	375,852,582,059.00	343,185,426,416.20	381,426,770,282.00	327,575,468,558.00	0.08
2.2.1.	Belanja Pegawai	16,915,505,917.00	10,637,022,994.00	10,050,572,350.00	9,752,601,749.00	6,376,928,261.00	-20.05
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105,245,483,981.00	141,850,615,462.00	144,928,682,866.20	154,729,474,347.00	164,007,232,516.00	12.43
2.2.3.	Belanja Modal	213,476,047,055.00	223,364,943,603.00	188,206,171,200.00	216,944,694,186.00	157,191,307,781.00	-5.85
3.	Pembiayaan Neto	18,972,397,489.30	36,926,545,228.30	16,862,006,746.82	29,734,189,869.62	41,565,445,881.44	39.11
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	26,773,408,689.30	43,037,119,853.30	24,374,129,397.30	33,462,514,982.44	44,023,053,836.44	21.56
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7,801,011,200.00	6,110,574,625.00	7,512,122,650.48	3,960,189,800.00	2,457,607,955.00	-20.99

Sumber: BPKPD KolakaTimur



3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016 – 2020 bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2016-2020, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka Timur rata-rata mampu menyumbangkan sebesar 25,30% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara posisi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 5,66% dari total pendapatan daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 25,31%. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan daerah selama lima tahun terakhir sebesar 3,07% Kinerja Pendapatan daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016-2020 secara rinci disajikan pada tabel 3.2 berikut:



Tabel 3.2 Anggaran dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016-2020.

NO	URAIAN	Anggaran Tahun 2016 (RP)	Anggaran Tahun 2017 (RP)	Anggaran Tahun 2018 (RP)	Anggaran Tahun 2019 (RP)	Anggaran Tahun 2020 (RP)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Pendapatan	650,125,994,344.00	660,842,389,123.40	657,904,755,632.48	724,128,440,971.48	726,664,702,783.48	2.90
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	15,655,822,942.00	36,107,387,129.40	35,654,084,473.00	21,287,629,268.00	25,275,010,848.00	26.95
1.1.1.	Pajak Daerah	3,045,347,204.00	3,987,081,924.40	3,836,197,337.00	4,571,997,337.00	4,481,997,337.00	11.09
1.1.2.	Retribusi Daerah	1,620,499,999.00	2,305,675,660.00	1,841,193,126.00	2,389,193,126.00	2,319,000,000.00	12.24
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	1,650,000,000.00	1,650,675,654.00	2,094,787,934.00	3,960,189,800.00	6,957,607,955.00	47.92
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	9,339,975,739.00	28,163,953,891.00	27,881,906,076.00	10,366,249,005.00	11,516,405,556.00	37.20
1.2.	Dana Perimbangan	530,547,056,489.00	528,883,745,688.00	517,139,388,600.00	568,263,590,712.00	564,113,837,280.00	1.66
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,861,555,489.00	11,950,063,688.00	13,421,807,600.00	20,583,470,000.00	29,873,404,822.00	18.54
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	404,289,270,000.00	401,256,422,000.00	402,711,812,000.00	418,519,936,000.00	384,572,762,000.00	-1.14
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	107,396,231,000.00	115,677,260,000.00	101,005,769,000.00	129,160,184,712.00	122,873,980,458.00	4.51
1.2.4.	Dana Insentif Daerah (DID)					26,793,690,000.00	
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	103,923,114,913.00	95,851,256,306.00	105,111,282,559.48	137,275,854,655.48	132,061,295,156.48	7.174
1.3.1.	Hibah	-	-	-	22,853,500,000.00	16,374,521,501.00	-7.09
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	



1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**)	7,961,106,913.00	4,830,220,306.00	20,499,655,559.48	17,740,188,655.48	17,740,188,655.48	67.90
1.3.4.	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	93,700,644,000.00	-	-	-	-	-25
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,261,364,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-50
1.3.6.	Pendapatan Dana Desa	-	91,021,036,000.00	84,611,627,000.00	96,012,368,000.00	96,682,166,000.00	1.78
2	Belanja	668,922,235,631.30	697,780,934,351.70	676,507,008,412.30	753,862,630,841.10	768,230,148,664.92	3.65
2.1	Belanja Tidak Langsung	295,087,820,179.96	301,728,225,355.84	307,720,355,964.87	332,967,518,252.10	421,663,006,439.84	9.77
2.1.1.	Belanja Pegawai	170,265,945,179.96	161,357,988,555.84	178,056,566,204.87	182,861,276,656.10	191,738,486,022.05	3.17
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0
2.1.3.	Belanja Subsidi	500,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	0
2.1.4.	Belanja Hibah	6,043,000,000.00	4,738,800,000.00	2,708,400,000.00	3,851,800,000.00	51,460,048,600.00	303.45
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	267,500,000.00	-	-	-	250,500,000.00	-
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	116,511,375,000.00	134,131,436,800.00	126,455,389,760.00	140,082,833,200.00	136,769,743,400.00	4.45
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	6,121,608,396.00	41,444,228,417.79	408.67



	Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Keagamaan				50,000,000.00		
2.2	Belanja Langsung	373,834,415,451.34	396,052,708,995.86	368,786,652,447.43	420,895,112,589.00	346,567,142,225.08	-1.118
2.2.1.	Belanja Pegawai	18,392,299,500.00	11,467,460,303.00	10,655,687,000.00	10,754,627,744.00	6,965,534,000.00	-19.76
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113,858,949,950.00	148,542,229,236.86	159,919,645,654.00	171,136,909,648.00	175,662,969,577.44	11.95
2.2.3.	Belanja Modal	241,583,166,001.34	236,043,019,456.00	198,211,319,793.43	239,003,575,197.00	163,938,638,647.64	-7.287
3.	Pembiayaan Neto	18,796,241,287.30	36,938,545,228.30	18,602,252,779.82	29,734,189,869.62	41,565,445,881.44	36.63
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	26,765,072,925.30	43,049,119,853.30	26,114,375,430.30	33,694,379,669.62	44,023,053,836.44	20.30
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7,968,831,638.00	6,110,574,625.00	7,512,122,650.48	3,960,189,800.00	2,457,607,955.00	-21.40

Sumber: BPKPD KolakaTimur



3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Timur cenderung mengalami penurunan, meskipun kontribusi terhadap pendapatan Kabupaten Kolaka Timur secara proporsional terhitung ada tetapi dalam nominal kecil. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan 56,64% sedangkan 2017-2020 mengalami penurunan rata-rata 9,31%, jika melihat rata-rata pertumbuhan 2016-2020 angka pertumbuhannya masih positif. Artinya dari sisi daya tumbuh sudah besar, hanya kontribusinya ke Pendapatan Daerah masih relatif kecil atau belum terhitung maksimal. Penerimaan dari Pajak Daerah tumbuh rata-rata sebesar 11,09% pertahun, Retribusi Daerah memiliki rata-rata 12,24% per tahun dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tumbuh rata-rata 37,20% per tahun.

3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 sebesar 81,61%, Tahun 2017 sebesar 80,03%, Tahun 2018 sebesar 78,60% , Tahun 2019 sebesar 78,48%, Tahun 2020 sebesar 77,63%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten



Kolaka Timur pada Dana dalam pendanaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

3.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam struktur APBD Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari dana pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan dana desa. Proporsi rata-rata pertumbuhan lain-lain Pendapatan Yang Sah tahun 2016-2020 sebesar 7,174%.

3.1.1.2. BELANJA DAERAH

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kolaka Timur. Sementara itu dalam alokasi anggaran pada berbagai bidang dan program dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat.



3.1.2 Neraca

Neraca Daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (Perusahaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci sebagaimana tergambar dalam tabel 3.4.



Tabel 3-3 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas						
1.1.1.1.	Kas di Kas Daerah	-					
1.1.1.1.1.	Kas di Bendahara Umum Daerah	43,364,654,106.30	24,375,840,525.71	33,587,281,877.23	40,630,964,157.05	47,190,759,510.05	7.78
1.1.1.1.2.	Kas di Bendahara FKTP	238,210,987.00	507,080,067.00	224,251,145.80	276,080,008.80	58,172,015.80	0.32
1.1.1.2.	Kas di Bendahara Penerima	36,440,882.00	-	500.00	-	0.00	(66.67)
1.1.1.3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	747,908,198.00	135,406,629.00	62,984,718.00	48,025,000.00	1,813,507.00	(63.84)
	Kas di Bendahara BOS	756,356,086.00	537,310,986.00	262,872,369.00	4,008,516,775.27	181,639,203.00	312.35
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	199,057,455.00	3,228,230.00	3,360,000.00	(23.57)
	Kas di Bendahara Gugus Tugas Covid					221,486,125.00	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	0.00	-
1.1.2	Piutang	-	-	-	-	0.00	-
1.1.2.1	Piutang Pajak Daerah	5,783,227,691.00	5,890,335,459.00	5,886,675,132.00	5,929,489,838.00	6,179,082,612.00	1.68
	Piutang Transfer - Bagi Hasil Pajak Daerah	-	2,336,713,782.00	3,948,058,611.00	5,128,336,269.00	(5,423,760,476.55)	(26.73)
1.1.2.2	Piutang Hasil Pengelollan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,650,675,654.00	2,094,787,934.00	3,967,097,517.00	6,957,607,955.00	7,564,131,249.00	50.10
1.1.2.3.	Piutang Lainnya	18,701,000.00	18,701,000.00	-	-	154,128,000.00	(25.00)
	Penyisihan Piutang	(4,349,975,432.42)	(4,773,171,073.28)	(5,053,049,640.56)	(5,343,709,338.07)	0.00	(19.66)
	Beban Dibayar dimuka	177,083,333.00	94,532,967.03	5,833,333.33	-	0.00	(60.11)



1.1.3	Persediaan	2,523,239,253.83	5,289,155,472.29	6,503,517,119.12	7,056,345,696.38	7,258,787,422.60	35.99
	JUMLAH ASET LANCAR	50,946,521,758.71	36,506,693,748.75	49,594,580,136.92	64,694,884,591.43	63,389,599,167.90	8.98
							-
	INVESTASI JANGKA PANJANG						-
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						-
	Dana Bergulir	-	-	-	-	878,922,500.00	-
	Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir					(878,922,500.00)	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen						-
	Investasi Jangka Panjang Permanen						-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6,958,970,000.00	13,069,574,625.00	20,581,697,275.48	43,894,251,612.62	45,843,827,706.37	65.75
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	6,958,970,000.00	13,069,574,625.00	20,581,697,275.48	43,894,251,612.62	45,843,827,706.37	65.75
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	6,958,970,000.00	13,069,574,625.00	20,581,697,275.48	43,894,251,612.62	45,843,827,706.37	65.75
1.2	ASET TETAP						
1.2.1	Tanah	20,956,859,326.00	28,139,191,826.00	28,870,440,431.00	66,203,281,326.00	66,241,226,927.00	41.56
1.2.2	Peralatan dan mesin	103,917,995,832.00	135,196,335,350.00	184,421,468,994.10	186,153,825,679.72	224,782,277,279.53	22.05
1.2.3	Gedung dan bangunan	226,903,522,480.00	356,558,067,376.00	447,429,691,274.80	509,442,224,201.54	567,196,307,465.54	26.96
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	274,514,257,599.90	436,295,387,295.90	516,731,979,849.90	610,579,687,991.90	666,741,790,248.90	26.18
1.2.5	Aset tetap lainnya	2,317,202,894.00	6,687,555,034.00	21,331,035,207.70	18,294,821,004.70	20,714,990,861.70	101.64
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	47,959,518,616.00	30,806,944,913.00	16,962,860,959.00	17,570,373,138.00	17,395,654,204.00	(19.53)
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	(123,545,168,938.56)	(169,557,998,328.00)	(257,926,821,172.50)	(329,081,714,808.04)	(410,999,513,249.29)	35.46
	JUMLAH ASET TETAP	553,024,187,809.34	824,125,483,466.90	957,820,655,544.00	1,079,162,498,533.82	1,152,072,733,737.38	21.17
1.3	ASET LAINNYA						
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	-



1.3.3	Kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-			
1.3.4	Aset tak berwujud	-	-	1,335,610,000.00	2,225,154,000.00	2,009,441,000.00	14.23
1.3.5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	(67,169,566.91)	(136,421,767.07)	25.78
1.3.6	Aset Rusak Berat	-	-	-	10,535,231,951.00	11,527,379,800.00	2.35
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	-	-	-	(8,449,458,949.00)	(9,122,238,284.00)	1.99
1.3.8	Aset Tidak Ditemukan/Hilang	-	-	-	8,976,069,716.00	8,272,430,374.00	(1.96)
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Ditemukan/Hilang	-	-	-	(8,669,295,248.00)	(8,579,931,960.00)	(0.26)
1.3.10	Aset Tetap yang Akan Dihilangkan	-	-	-	6,700,994,196.00	6,700,437,196.00	(0.00)
1.3.11	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Akan Dihilangkan	-	-	-	(866,827,203.00)	(866,827,203.00)	-
1.3.12	Aset Lain-lain	-	995,976,540.00	1,927,451,912.00	2,728,215,116.00	1,856,022,616.00	25.77
	JUMLAH ASET LAINNYA	-	995,976,540.00	3,263,061,912.00	13,112,914,012.09	11,660,291,771.93	129.60
	JUMLAH ASET DAERAH	610,929,679,568.05	874,697,728,380.65	1,031,259,994,868.40	1,200,864,548,749.96	1,272,966,452,383.58	20.88
							-
2.	KEWAJIBAN						-
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						-
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	1,306,083,007.00	526,510,047.41	642,068,395.41	943,760,334.68	507,001,345.41	(9.26)
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Utang Beban	2,157,410,240.00	164,345,714.00	-	525,091,695.00	529,521,240.00	(47.88)
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	1,044,942,938.00	2,577,926,798.00	956,077,938.00	6,816,346,997.00	569,368,709.00	151.27
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,508,436,185.00	3,268,782,559.41	1,598,146,333.41	8,285,199,026.68	1,605,891,294.41	64.80
3.	EKUITAS	606,421,243,383.05	871,428,945,821.24	1,029,661,848,534.99	1,192,579,349,723.28	1,271,360,561,089.17	21.07
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	610,929,679,568.05	874,697,728,380.65	1,031,259,994,868.40	1,200,864,548,749.96	1,272,966,452,383.58	20.88

Sumber: BPKPD KolakaTimur



3.1.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pada tahun 2016 Kabupaten Kolaka Timur memiliki aset daerah senilai Rp 610.929.679.568,05, Tahun 2017 sebesar Rp 874.697.728.380,65, Tahun 2018 sebesar Rp 1.031.259.994.868,40, Tahun 2019 sebesar Rp 1.200.864.548.749,96, Tahun 2020 sebesar Rp 1.272.966.291.771,93, Sedangkan nilai pertumbuhan aset tahun 2016-2020 mencapai 20,88%.

1. Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar untuk Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020 mencapai Rp 63.389.599.167,90 dengan pertumbuhan sebesar 8,98% pertahun dari tahun 2016.
2. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat social dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Kabupaten Kolaka Timur, rata-rata investasi jangka panjang tumbuh 65,75% dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, investasi jangka panjang baru sebesar Rp 6.958.970.000,00,-. Namun tahun 2020 mencapai Rp 45.843.827.706,37 Investasi jangka panjang ini didominasi oleh investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.



3. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pemerintahan. Aset tetap Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016 senilai Rp 553.024.187.809,34 meningkat menjadi sebesar Rp 1.152.072.733.737,38 pada tahun 2020 atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 21,17% Yang terdiri dari: Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya.
4. Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dalam rangka pembiayaan pembangunan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan sampai tahun 2020 pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tidak memiliki Dana Cadangan.
5. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2017 memiliki aset lainnya sebesar Rp 995.976.540,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp 11.660.291.771,93 pada tahun 2020 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 129,60% dari tahun ke tahun.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dimasa depan yang berasal dari kewajiban berjalan entitas tertentu untuk menyediakan jasa pada entitas lainnya dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lampau.

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten



Kolaka Timur pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 4.508.436.185,00,- dan menurun menjadi sebesar Rp 1.605.891.294,41 pada tahun 2020 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 64,80% dari tahun ke tahun. Kewajiban jangka pendek ini terdiri atas Utang Perhitungan pihak ke tiga, Utang beban dan Utang Jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016 mencapai Rp 606.421.243.383,05 mengalami pertumbuhan setiap tahun hingga pada tahun 2020, yaitu senilai Rp 1.271.360.561.089,17 atau pertumbuhan 21,07% dari tahun ke tahun.

3.1.2.4 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Rasio cepat (Quick Ratio).



Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Sedang Rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 3-4 Rasio Likuiditas Tahun 2016-2020

No.	Rasio Likuiditas	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Rasio lancar (current ratio)	8,85	8,95	3,22	12,81	39,47
2.	Rasio cepat (quick ratio)	9,31	10,47	3,71	14,37	34,95

Sumber: BPKPD KolakaTimur

Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016 sebesar 8,85% sedangkan di tahun 2017 sebesar 8,95%. Nilai Rasio Lancar pada tahun 2019 sampai pada tingkat 12,81%. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan objek-objek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan



mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dalam alokasi anggaran pada berbagai bidang dan program dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, Prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan Anggaran pemerintah daerah terbagi dalam komponen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah jenis belanja yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Adapun belanja tidak langsung atau belanja aparatur merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait.

Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam kelompok belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung, meliputi belanja: (1) gaji dan tunjangan, (2) tambahan penghasilan, (3) penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, dan (4) belanja pemungutan pajak daerah. Sedangkan alokasi belanja langsung, meliputi belanja : (1) honorarium PNS, (2) uang lembur, (3) beasiswa pendidikan PNS, (4) kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS, (5) premi asuransi kesehatan, (6) makanan dan minuman pegawai, (7)



pakaian dinas dan atributnya, (8) pakaian khusus dan hari-hari tertentu, (9) perjalanan dinas, (10) perjalanan pindah tugas, (11) pemulangan pegawai, dan (12) belanja modal (kantor, mobil dinas, mebeleur, peralatan dan perlengkapan, dll).

Alokasi belanja aparatur tersebut menjamin kelancaran dan terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik untuk layanan publik maupun untuk penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3-5. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kolaka Timur

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2018	280,102,916,248.87	684,019,131,062.78	40.95
2.	Tahun Anggaran 2019	297,242,154,891.10	757,822,820,641.10	39.22
3.	Tahun Anggaran 2020	280,315,364,596.05	768,230,148,664.92	36.49

Sumber: BPKPD Kabupaten Kolaka Timur

Proporsi Alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2018-2020 cenderung menurun Tahun 2018 sebesar 40,95%, ditahun 2019 turun menjadi 39,22%, sedangkan Tahun 2020 tetap mengalami penurunan sebesar 36,49%, Penurunan belanja ini merupakan gambaran kebijakan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah pemerintah daerah sebagai upaya untuk lebih mengedepankan alokasi belanja



pembangunan daerah untuk pemenuhan layanan masyarakat secara langsung, baik terkait urusan wajib layanan dasar maupun menyangkut urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan pemerintah daerah yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Difisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah diakibatkan karena adanya selisih antara pendapatan dan belanja. Bilamana terjadi surplus anggaran maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan dan sebaliknya jika terjadi defisit anggaran maka dibiayai dari penerimaan pembiayaan daerah, Tahun 2018 APBD Kabupaten Kolaka Timur mengalami defisit sebesar Rp 9.320.250.272,32, pada tahun 2019 sebesar Rp 10.560.538.854. dan begitu pula pada Tahun 2020 sebesar Rp Rp 2.630.989.578 Struktur anggaran pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2018-2020 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 7.512.122.650,48,- pada tahun 2019 sebesar Rp 3.960.189.800,- sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 2.457.607.955,-.



Tabel 3-6. Tabel Surplus/Defisit Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	Proporsi Penutup Defisit Riil Anggaran		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	33.694.379.669,62	44.023.053.836,44	46.654.043.414,44
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan	-	-	
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	
6.	Penerimaan Piutang Daerah			

Sumber: BPKPD KolakaTimur

Tabel 3-7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	651.289.077.999,00	721.903.610.481,00	721.462.256.825,00
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	634.456.705.076,20	707.382.881.827,00	716.373.659.292,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.512.122.650,48	3.960.189.800,00	2.457.607.955,00
	Defisit riil	9.320.250.272,32	10.560.538.854,00	2.630.989.578,00

Sumber: BPKPD KolakaTimur



Tabel 3-8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	2018		2019		2020**)	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	33.694.379.669,62	100%	44.023.053.836,44	100%	46.654.043.414,44	100%
2	Pelampauan penerimaan PAD	3.173.471.279,00	9%	-	0%	-	0%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(1.043.048.171,00)	-3%	-	0%	183.460.722,00	0,39%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(8.746.100.741,48)	-26%	-	0%	-	0%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	40.310.057.303,10	120%	37.206.706.839,44	85%	51.856.489.372,92	111,15%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0%	6.816.346.997,00	15%	2.211.312.120,00	4,74%
7	Kegiatan lanjutan	-	0%	-	0%	-	

Sumber: BPKPD Kolaka Timur

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perkiraan penganggaran untuk melekaskan pembangunan di daerah untuk lima tahun ke depan yaitu pada tahun 2021-2026. Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perkiraan kerangka pendanaan 2021-2026 didasari pada asumsi makro ekonomi dan pertimbangan kondisi sosial yang relevan sebagai faktor determinan penganggaran yang diproyeksikan dalam lima tahun ke depan.

3.3.1 Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat Kolaka Timur lima tahun ke depan memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik sebagai kondisi sosial ekonomi yang diinginkan maupun sebagai faktor determinan dalam mengkreasikan potensi pendapatan daerah yang



mampu diperoleh ke depan. Artinya, indikator-indikator dimaksud selain menggambarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah, juga menggambarkan kondisi yang menunjukkan sejumlah peluang bagi pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerah ke depan. Kondisi keuangan daerah Kabupaten Kolaka Timur lima tahun ke depan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi Kabupaten Kolaka Timur nantinya. Kondisi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah juga akan memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kondisi makro ekonomi yang baik secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat periode 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat periode 2021-2026 Kabupaten Kolaka Timur

No.	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63
2.	Tingkat Pengangguran (%)	3,25	3,15	3,10	3,05	3,00	2,95
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	13,47	13,40	13,30	13,10	12,95	12,80
4.	Inflasi (%)	1,8-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5	2-3,5
5.	Indeks Pembangunan Manusia	67,02	67,10	67,18	67,21	67,24	67,30

Pertumbuhan ekonomi Kolaka Timur untuk lima tahun ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten. Dengan kondisi ekonomi yang stabil dan meningkat, maka diasumsikan pula bahwa kondisi tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap



penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan serta mengendalikan inflasi yang mendukung terciptanya stabilitas harga-harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi.

Indikator makro ekonomi daerah yang terkendali di posisi meningkat dan menurun, akan berpengaruh positif terhadap keuangan rumah tangga dan masyarakat. Jika kemampuan masyarakat meningkat maka kapasitas keuangan Kabupaten Kolaka Timur juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini, angka mempengaruhi pencapaian tingkat indeks pembangunan manusia (IPM). IPM Kolaka Timur juga diasumsikan akan terus membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi makro.

3.3.2. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.3.2.1. PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi pendapatan dihitung berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama Kabupaten Kolaka Timur selama tahun 2016-2020, berdasarkan analisa pendapatan selama lima tahun sebelumnya tersebut diperoleh rata-rata laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Kolaka Timur yang cenderung meningkat di atas 3,07% hal ini sangat dimungkinkan Karena kabupaten Kolaka Timur merupakan daerah yang terus berkembang.



Dalam Upaya untuk mencapai target pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur maka akan fokus pada langkah-langkah peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat dan peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, dengan asumsi menaikkan pertumbuhan rata-rata pendapatan 5% disetiap tahunnya dengan tetap optimis perbaikan Ekonomi Nasional dan Daerah walaupun disumber pendapatan pajak daerah dan retribusi diproyeksikan akan mengalami penurunan minus -25,55% s.d -29,73% pada tahun 2022 dikarenakan dampak pandemi Covid-19, dengan harapan di tahun 2023 ada tren positif naik sampai 35,50% s.d 45%, disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3-10 Proyeksi Pendapatan Daerah 2021-2026

Uraian Pendapatan	Proyeksi pertumbuhan (%)	Tahun2021	Tahun2022	Tahun2023	Tahun2024	Tahun2025	Tahun2026
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
I. PENDAPATAN		724,636,482,358.00	763,527,465,608.90	804,743,498,734	848,462,389,333	894,881,637,505	944,221,411,873
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH		25,342,863,703	28,812,096,021	32,803,295,767	37,401,876,775	42,708,168,915	48,840,144,320
- Pajak Daerah	-29.73% s.d 45%	4,777,997,337	3,357,421,703	4,868,261,469	7,266,736,700	8,356,747,205	9,610,259,286
- Retribusi Daerah	-25.55 s.d 35.50%	1,688,000,000	1,256,800,000	1,702,964,000	2,246,728,000	2,471,400,800	2,718,540,880
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20% s.d 35.50%	6,960,460,810	8,352,552,972	11,317,709,277	12,027,676,280	14,433,211,536	17,319,853,843
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	-3% s.d 35.50%	11,916,405,556	12,108,046,112	16,406,402,482	15,860,735,795	17,446,809,375	19,191,490,312
B. PENDAPATAN TRANSFER		676,440,118,655	710,262,124,588	745,775,230,817	783,063,992,358	822,217,191,976	863,328,051,575
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.5% s.d 7%	658,699,930,000	681,754,427,550	726,216,672,825	762,527,506,466	800,653,881,790	840,686,575,879
- Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.5% s.d 7%	17,740,188,655	18,361,095,258	19,558,557,992	20,536,485,892	21,563,310,186	22,641,475,696
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		22,853,500,000	24,453,245,000	26,164,972,150	27,996,520,201	29,956,276,615	32,053,215,978
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	7%	22,853,500,000	24,453,245,000	26,164,972,150	27,996,520,201	29,956,276,615	32,053,215,978

Sumber : BPKPD 2021 (diolah)



3.3.2.2 BELANJA DAERAH

Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja dan pembiayaan yang bersifat wajib dan bersifat mengikat, serta menjadi prioritas utama dalam pengeluaran Kabupaten Kolaka Timur dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi yang terdiri dari belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dengan perkiraan pertumbuhan antara 4% - 7%.
2. Belanja Modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya perkiraan pertumbuhan 5% - 10%.
3. Belanja Tak Terduga, diproyeksi pertumbuhan sebesar 5% pertahun.
4. Belanja Transfer, terdiri Belanja Bantuan Keuangan diproyeksi pertumbuhan 5% pertahun.
5. Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang terdiri Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Penyertaan Modal Daerah, diproyeksi pertumbuhan 3%-5%

Proyeksi belanja daerah tahun 2021-2026 Kabupaten Kolaka Timur disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 3-11. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026.

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	BELANJA OPERASI		403.149.968.795	429.115.538.725	456.766.630.525	486.213.438.452	517.573.408.230	550.971.717.149
	Belanja Pegawai	6%	208.004.543.010	220.484.815.591	233.713.904.526	247.736.738.798	262.600.943.125	278.356.999.713
	Belanja Barang dan Jasa	7%	188.866.010.585	202.086.631.326	216.232.695.519	231.368.984.205	247.564.813.099	264.894.350.016
	Belanja Hibah	4%	4.929.415.200	5.126.591.808	5.331.655.480	5.544.921.700	5.766.718.568	5.997.387.310
	Belanja Bunga		34.812.650.000	37.296.000.000	37.296.000.000	37.296.000.000	37.296.000.000	37.296.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	5%	1.350.000.000	1.417.500.000	1.488.375.000	1.562.793.750	1.640.933.438	1.722.980.109
B	BELANJA MODAL		186.214.718.063	201.802.165.868	218.768.830.527	237.241.690.509	257.359.735.775	279.275.124.748
	Belanja Modal Tanah	8%	3.158.120.000	3.410.769.600	3.683.631.168	3.978.321.661	4.296.587.394	4.640.314.386
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5%	32.620.376.780	34.251.395.619	35.963.965.400	37.762.163.670	39.650.271.853	41.632.785.446
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7%	43.219.758.727	46.245.141.838	49.482.301.767	52.946.062.890	56.652.287.293	60.617.947.403
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10%	106.351.462.556	116.986.608.812	128.685.269.693	141.553.796.662	155.709.176.328	171.280.093.961
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5%	865.000.000	908.250.000	953.662.500	1.001.345.625	1.051.412.906	1.103.983.552
C	BELANJA TIDAK TERDUGA		3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750	3.828.844.688
	Belanja Tidak Terduga	5%	3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750	3.828.844.688
D	BELANJA TRANSFER		139.271.795.500	146.235.385.275	153.547.154.539	161.224.512.266	169.285.737.879	177.750.024.773



	Belanja Bantuan Keuangan	5%	139.271.795.500	146.235.385.275	153.547.154.539	161.224.512.266	169.285.737.879	177.750.024.773
F	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		10.000.000.000	10.300.000.000	10.609.000.000	10.927.270.000	11.255.088.100	11.592.740.743
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3%	10.000.000.000	10.300.000.000	10.609.000.000	10.927.270.000	11.255.088.100	11.592.740.743
	Penerimaan Pinjaman Daerah		401.000.000.000	0	0	0	0	0
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750	3.828.844.688
	Penyertaan Modal Daerah	5%	3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750	3.828.844.688
	JUMLAH (A + B + C + D)		731.636.482.358	780.303.089.868	832.390.115.591	888.152.516.227	947.865.400.634	1.011.825.711.358

Sumber : BPKPD 2021 (diolah)



3.3.3. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan keuangan daerah Kolaka Timur untuk lima tahun kedepan memaparkan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Kolaka Timur selama periode 2022-2026 yang akan datang dengan berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah disajikan sebagai berikut:



Tabel 3-12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	763.527.465.608,9	804.743.498.734	848.462.389.333	894.881.637.505	944.221.411.873
2.	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan anggaran	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	763.527.465.608,9	804.743.498.734	848.462.389.333	894.881.637.505	944.221.411.873
	Dikurangi:					
4.	Belanja Tidak Langsung	232.212.294.137,52	246.145.031.785,77	260.913.733.692,92	276.568.557.714,50	293.162.671.177,36
5.	Pengeluaran Pembiayaan	3.150.000.000	3.307.500.000	3.472.875.000	3.646.518.750	3.828.844.688
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	528.165.171.471,38	555.290.966.948,23	584.075.780.640,08	614.666.561.040,51	647.229.896.007,64

Sumber: BPKPD 2021 (diolah)



Tabel 3-13 Kerangka Pendanaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022-2026

No.	Jenis Dana	Alokasi				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Prioritas I (SPM)	317.216.001.985,71	333.507.754.749,11	350.795.913.852,43	369.168.736.560,93	388.726.275.542,19
2.	Prioritas II (Visi dan Misi)	210.949.169.485,67	221.783.212.199,12	233.279.866.787,65	245.497.824.479,58	258.503.620.465,45
	Total	528.165.171.471,38	555.290.966.948,23	584.075.780.640,08	614.666.561.040,51	647.229.896.007,64

Sumber: BPKPD 2021 (diolah)



Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, ditetapkan prioritas penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan skala prioritas yaitu:

1. Prioritas I, merupakan Pendanaan yang dialokasikan untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang juga menunjang Pencapaian Target SPM yakni sebesar 60,06%;
2. Prioritas II, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pemenuhan visi dan misi kepala daerah yakni sebesar 39,94%. Jika dalam pemenuhan pokok visi dan misi ini masuk kategori urusan wajib Pelayanan dasar maka dikelompokkan dalam prioritas I.



BAB IV

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan sangat terkait dengan gambaran umum kondisi daerah. Hal ini disebabkan karena permasalahan pembangunan yang disajikan adalah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Gambaran umum kondisi daerah menjadi data pertimbangan dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan untuk menentukan sasaran dan program prioritas, identifikasi kebijakan nasional dan juga sebagai data untuk penelaahan RPJMD daerah lainnya.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun nasional dalam kurun lima tahun terakhir. Perumusan permasalahan ini menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya, visi dan misi yang telah disusun dan dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan. Secara operasional, visi dan misi tersebut dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.



4.1.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Masih rendahnya akses dan mutu Sarana dan Prasarana pendidikan;
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan;
- Masih tingginya angka putus sekolah.

2. Kesehatan

- Masih tinggi Angka Kematian Ibu;
- Masih tinggi Angka Kematian Bayi;
- Masih tinggi Prevalensi Stunting dan gizi buruk;
- Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi;
- Masih belum optimalnya penanganan stunting;
- Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan serta SDM tenaga kesehatan;
- Masih rendah perilaku hidup bersih dan sehat;
- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit masih kurang;
- Kompetensi nakes sebagai programer dalam bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit belum sesuai



dan memadai;

- Sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit belum memadai;
- Edukasi tentang penyakit masih belum merata dan memadai
- Jejaring lintas sektor dalam mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit masih rendah;
- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Kualitas dan kuantitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang;
- Ketidakesesuaian sarana Gedung Fasyankes yang sesuai Permenkes 43 Tahun 2019;
- Sarana penunjang pelayanan medis belum maksimal;
- Fasyankes Prima menuju standar akreditasi belum maksimal;
- Pengelolaan Obat, BMHP dan alat Kesehatan lainnya masih perlu di tingkatkan;
- Belum maksimalnya peran serta lintas sektor lainnya dalam penanganan masalah kesehatan;
- Goals Kesehatan belum maksimal dan tidak berbanding lurus antara pendanaan kesehatan;
- Evaluasi dari berbagai sektor pendukung capaian dan target kesehatan mulai dari Perencanaan, Proses, Output dan Outcome perlu di tingkatkan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Panjang jalan tidak teraspal 959.308 km atau 92,53%;
- Jalan kerikil/tanah cepat mengalami perubahan kondisi sehingga sangat memerlukan penanganan;
- Sulitnya akses untuk pembangunan jembatan khususnya diwilayah utara sehingga mengakibatkan biaya konstruksi menjadi lebih tinggi;



- Masih kurangnya peralatan alat berat untuk melaksanakan pemeliharaan jalan;
- Tidak tersedianya peralatan laboratorium dalam rangka pengawasan mutu pekerjaan jalan dan jembatan;
- kurangnya SDM yang ahli dalam bidang jalan dan jembatan;
- Ketersediaan sumber air pada semua daerah irigasi tidak merata;
- Akibat banjir sebagian besar daerah irigasi mengalami kerusakan sehingga pada jaringan-jaringan primer, sekunder dan tersier terhambat;
- Masih adanya bendung pada daerah irigasi mengalami kerusakan sehingga supplay air ke persawahan menjadi terhambat;
- Masih rendahnya biaya operasional irigasi;
- Kurangnya tenaga operasional disetiap wilayah pengamat pengairan;
- Indeks pertanaman yang belum merata pada setiap daerah irigasi;
- Kurangnya bangunan pendukung bangunan ukur pada semua bendung;
- Belum adanya moda transportasi umum;
- Belum tersedianya alat penunjang untuk menjalankan tugas secara efektif, kendaraan operasional waldalalin;
- Belum tersedianya gedung pengujian beserta alatnya;
- Belum adanya terminal tipe C yang lokasinya berdampingan dengan gedung pengujian;
- Belum optimalnya pengelolaan SPAM;
- Belum optimalnya pengelolaan Sanitasi;



- Belum tersedianya Perda Rencana Detail Tata Ruang, RDTR OSS dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis;
- Pemanfaatan dan pengendalian serta penertiban penataan ruang belum optimal.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2.295 KK;
- Rasio elektrifikasi Kabupaten (RE) 79%;
- Jumlah rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN (mandiri) sebanyak 6.311 KK;
- Kesiapan anggaran untuk program pemenuhan Standar Pelayanan Minimal masih minim;
- Penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD masih tumpang tindih dengan SKPD induk;
- Ketersediaan Dokumen pencapaian program perumahan dan kawasan permukiman masih minim.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan-Peraturan Daerah yang berlaku di Kab. Kolaka Timur;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan Peraturan-Peraturan Daerah yang berlaku;
- Kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana belum optimal;
- Kurangnya edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat.



6. Sosial

- Pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat miskin yang masih kurang;
- Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial yang masih kurang;
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum valid secara keseluruhan;
- Keterbatasan pendampingan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- Keterbatasan SDM dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Penanganan terhadap bencana yang belum responsif;
- Masih kurangnya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- Belum terbentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa dan Kelurahan;
- Belum optimalnya tim penanggulangan kemiskinan;
- Belum optimalnya kerjasama dengan wirausaha kepada PMKS untuk membuka lapangan kerja;
- Belum optimalnya verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui kegiatan updating atau pemutakhiran data.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- Rendahnya calon tenaga kerja yang memiliki keahlian;



- Masih perlu dilakukan penyempurnaan pengembangan program-program pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;
- Keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- Balai latihan kerja milik pemerintah belum ada;
- Perlu adanya pengakuan dan komitmen bersama berkaitan dengan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja;
- Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial;
- Masih kurangnya penganggaran yang bersumber dari APBN dan APBD.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang;
- Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal;
- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
- Perempuan banyak menjadi objek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;



3. Pangan

- Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras;
- Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman;
- Belum tersedianya infrastruktur Cadangan Pangan Daerah;
- Minimnya pengetahuan tentang mutu dan keamanan pangan baik pelaku usaha maupun tenaga pengawas dan Ketersediaan alat uji bahan pangan yang belum tersedia.

4. Pertanahan

- Kebutuhan lahan untuk kepentingan umum yang cukup tinggi;
- Masih adanya konflik dan sengketa pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

- Pengelolaan sampah belum maksimal dikarenakan sarana dan prasana di TPA belum memadai dalam memenuhi syarat pengelolaan sampah pada umumnya;
- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku kegiatan/usaha dalam pengelolaan dan lingkungan hidup;
- Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum maksimal.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen



kependudukan dan pencatatan sipil;

- Adanya ketidaksesuaian data/identitas penduduk antara database kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/Akta Nikah dan dokumen lainnya;
- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan perangkat teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya tepat waktu.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kelembagaan desa yang belum berjalan efektif;
- Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa masih rendah;
- Minimnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Kurangnya pembinaan dan pembentukan posyantek Desa;
- Belum maksimalnya pengelolaan BUMDesa/pasar desa;
- Kelembagaan PKK dan Kader PKK perlu ditingkatkan;
- Kelembagaan Adat dan pengelola Adat perlu ditingkatkan;
- Belum optimalnya perencanaan pengembangan peningkatan status Desa Mandiri.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
- Tingkat partisipasi KB masih rendah;
- Petugas Keluarga Berencana masih kurang;



- Pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum optimal
- Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber-KB cukup tinggi;
- Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga belum optimal.

9. Perhubungan

- Belum adanya gedung pengujian kendaraan bermotor dimana telah tersedia tenaga penguji;
- Belum adanya moda transportasi umum yang tersedia;
- Masih kurangnya SDM perhubungan;
- Belum tersedianya alat penunjang operasional waldalalin;
- Perlunya dibangun terminal tipe C yang lokasinya berdampingan dengan gedung pengujian; dan
- Minimnya alokasi anggaran pengelolaan program kegiatan perhubungan.

10. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pengelolaan layanan persandian dan kebijakan pemerintah;
- Belum meratanya akses Jaringan Komunikasi di Daerah Terpencil;
- Pengelolaan jaringan internet dan intranet belum optimal;
- Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang kominfo dan Persandian;
- Terbatasnya dukungan infrastruktur teknologi



informasi untuk mendukung e-Government; dan

- Penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya optimal.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Pemahaman masyarakat mengenai koperasi masih kurang;
- Kemampuan manajerial pengurus koperasi masih kurang;
- Pemahaman masyarakat mengenai bidang usaha yang masuk kategori UMKM masih kurang;
- Koordinasi dengan instansi terkait mengenai pendataan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- Anggaran untuk pendataan, pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang minim.

12. Penanaman Modal

- Informasi terkait potensi investasi di Kolaka Timur belum memadai;
- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan lingkup DPMPTSP belum memadai;
- Belum tersedianya mall pelayanan publik;
- Realisasi investasi masih rendah;
- Kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal masih rendah;
- Belum terselenggaranya kegiatan promosi



penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- Belum adanya sarana prasarana olahraga;
- Belum optimalnya pengembangan bakat dan kreativitas kepemudaan;
- Kurangnya ketersediaan tenaga keolahragaan yang bersertifikat;
- Kurang aktifnya organisasi kepemudaan;
- Belum tersedianya pengembangan kewirausahaan pemuda.

14. Statistik

- Pengelolaan data center belum optimal.

15. Persandian

- Pengamanan sistem informasi program pemerintah belum efektif.

16. Kebudayaan

- Rendahnya kearifan budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan;
- Pengelolaan bangunan cagar budaya sebagai catatan perkembangan sejarah belum maksimal;
- Keterbatasan sumber daya manusia pengelola cagar budaya dan budaya lokal, dan belum optimalnya jejaring kerja dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

17. Perpustakaan

- Belum tersedianya Gedung Perpustakaan Daerah;



- Terbatasnya Bahan Pustaka Perpustakaan;
- Rendahnya Budaya Gemar Membaca;
- Kurangnya Tenaga Pustakawan.

18. Kearsipan

- Belum tersedianya Gedung Depo Arsip Daerah;
- Akuisisi Arsip yang tidak maksimal;
- Kurangnya Tenaga Arsiparis;
- Sarana pengelolaan Arsip yang belum memadai.

C. Urusan Pilihan Pemerintahan

1. Kelautan dan Perikanan

- Kurangnya sumberdaya manusia penyuluh perikanan di Kab. Kolaka Timur;
- Potensi Perikanan Budidaya yang sangat besar namun belum menuju kearah skala produksi/industri perikanan budidaya;
- Prasarana dan sarana perikanan tangkap bagi para nelayan di Kab. Kolaka Timur masih tergolong kurang; dan
- Kurangnya Pelatihan untuk menumbuh kembangkan industri hasil olahan perikanan.

2. Pariwisata

- Akses dan Pembangunan infrastruktur di lokasi destinasi wisata belum memadai;



- Promosi destinasi pariwisata Kolaka Timur belum maksimal;
- Masih rendahnya Kualitas SDM dan sistem pemasaran pariwisata belum terintegrasi.

3. Pertanian

- Ketersediaan Data Base tentang Kebutuhan pembangunan pertanian di Kab. Kolaka Timur masih belum optimal;
- Masih kurangnya Alat dan Mesin Pertanian untuk menunjang kegiatan pertanian baik Pra Panen, masa tanam dan Pasca Panen;
- Masih belum optimalnya pemanfaatan pada lahan pertanian pasca panen untuk komoditas pertanian jangka pendek;
- Harga Komoditas pertanian yang masih tergolong rendah;
- Masih kurangnya unit pengelola/tempat produksi pupuk organik;
- Masih kurangnya penggunaan pupuk organik;
- Belum adanya kerjasama daerah dengan perusahaan industri pengolahan hasil pertanian;
- Tidak terkontrolnya lalulintas ternak di wilayah Kab. Kolaka Timur;
- Kurangnya tenaga teknis lapangan peternakan;
- SDM Petani masih belum merata;
- Harga Pasar Produk Hortikultura yang tidak stabil;



- Harga Produk perkebunan masih rendah dibandingkan dengan daerah lain;
- Penggunaan Pupuk kimia masih tinggi;
- Penggunaan pupuk organik masih kurang;
- Alih Lahan Perkebunan untuk kebutuhan lain yang terus terjadi;
- Kurangnya koordinasi antar lembaga untuk memasarkan produk pertanian.

4. Kehutanan

- Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan.

5. Energi dan Sumber daya Mineral

- Belum adanya pengelolaan sumber daya alam;
- Belum optimalnya eksplorasi sumber daya mineral.

6. Perdagangan

- Unit Metrologi Legal (UML) Belum terbentuk di Kab. Kolaka Timur;
- SDM Kemetrologian (Penera, Pengawas tera, dll) belum tersedia;
- Penggunaan UTTP belum sesuai dengan standar;
- Pelaksanaan tera atau tera ulang masih bekerjasama dengan Kabupaten lain;
- Pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat belum terkelola dengan baik;
- Pengelolaan pasar harus sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan;



- Perlindungan konsumen belum terlaksana dengan baik yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang membidangi perdagangan;
- Pemeliharaan fisik maupun sarana dan prasarana pasar rakyat tidak pernah dilaksanakan;
- Perlu dilaksanakan sosialisasi dan pengawasan tentang penggunaan UTTP dipasar-pasar rakyat yang ada di Kecamatan;
- Belum ada rencana induk tentang pengembangan pasar Kabupaten.

7. Perindustrian

- Masih rendahnya SDM Industri;
- Tantangan lingkungan industri yang sangat dinamis terkait dengan penerapan industri 4.0;
- Belum tersedianya data dan informasi khususnya data industri yang akurat, lengkap dan mutakhir;
- Masih lemahnya kapasitas dalam pengelolaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh OPD secara menyeluruh terhadap outcome/impact dan melibatkan analisis mendalam terhadap data dan kualitas dan capaian kinerja;
- Belum tersedianya sentra IKM;
- Masih kurangnya dukungan anggaran pada bidang industri sehingga capaian program dan kegiatan bidang industri masih bersifat rutinitas;
- Belum adanya pemetaan wilayah sentra industri pada daerah daerah tertentu;
- Belum adanya regulasi dalam bentuk Perda yang



mengatur kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

8. Transmigrasi

- Pengembangan konektivitas melalui penyediaan infrastruktur wilayah dari kawasan pusat pelayanan kesub kawasan penempatan transmigrasi belum maksimal;
- Pembukaan lahan baru sector pertanian, perkebunan dan peternakan pada kawasan penempatan baru belum memadai;
- Perlunya penyiapan lahan penempatan oleh Pemerintah Daerah baik untuk kebutuhan permukiman maupun lahan pertanian dan perkebunan;
- Masih kurangnya penganggaran yang bersumber dari APBN dan APBD.

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- Ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi pembangunan belum memadai;
- Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya proses evaluasi perencanaan pembangunan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah;
- Sinkronisasi perencanaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal.

2. Keuangan



- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dibandingkan potensinya;
- Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
- Kualitas SDM aparat pengelola pajak masih rendah;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sektor Pelayanan Publik belum optimal.

3. Kepegawaian

- Belum optimalnya pelaksanaan Merit Sistem;
- Pengisian jabatan belum berbasis Manajemen Kinerja dan Kompetensi;
- Belum Optimalnya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang mendukung interlink pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
- Rasio ASN di Kabupaten Kolaka Timur yang mengikuti Diklat;
- Belum optimalnya pelaksanaan Kode Etik dan Disiplin ASN;
- Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi aturan Kepegawaian;
- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum berdasarkan Beban Kerja dan Tempat Tugas.

4. Pendidikan dan Pelatihan



- Rendahnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Kompeten dan Profesional;
- Belum optimalnya pengembangan kompetensi aparatur.

5. Penelitian dan Pengembangan

- Belum optimalnya penganggaran Penelitian dan Pengembangan;
- Belum optimalnya dokumen hasil penelitian digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Kurangnya SDM dalam penelitian dan pengkajian.

6. Pengawasan

- Konsistensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam Pelaksanaan Peta Pengawasan yang telah ditentukan masih diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan peta pengawasan;
- Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang rendah;
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil pengawasan, sehingga diperlukan adanya ekspos hasil pengawasan demi terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Belum meratanya tingkat kompetensi teknis sumber daya manusia pengawasan, sehingga diperlukan adanya keikutsertaan aparat pengawas dalam berbagai diklat atau bimbingan teknis yang berkenaan;
- Sistem dan prosedur kerja pengawasan dan standar kendali mutu belum sepenuhnya



dilaksanakan sehingga perlu adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk menerapkannya disetiap penugasan;

- Kurangnya jumlah anggaran pelaksanaan pemeriksaan sehingga pelaksanaan pengawasan belum optimal.

7. Fungsi Lainnya

Sekretariat Daerah

- Pemahaman dan perhatian terhadap perencanaan dan pelaporan Kinerja masih rendah;
- Kontrol terhadap kualitas pelayanan publik belum maksimal;
- Persentase Regulasi tentang ketatalaksanaan masing-masing perangkat daerah masih rendah;
- Pemahaman stakeholder terhadap pentingnya analisis jabatan masih kurang;
- Masih banyaknya jabatan struktural yang belum terisi di semua Perangkat Daerah, hingga pelaksanaan tugas dan fungsi tidak optimal;
- Kurangnya OPD mengarsipkan produk hukum daerah baik produk hukum teknis OPD maupun produk hukum secara umum;
- OPD membuat produk hukum kegiatan teknis kurang berkoordinasi dengan bagian hukum;
- Pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan yang mendukung usaha-usaha ekonomi masyarakat pedesaan belum memadai;



- Penguatan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan dan kemudahan dalam memperoleh modal usaha;
- Kurangnya koordinasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan potensi sumber daya alam Kab. Kolaka Timur;
- Kurang Optimalnya melibatkan konsultan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan antara provinsi, kabupaten belum optimal;
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bidang Keprotokolan baik tingkat pendidikan maupun pengetahuannya tentang Bidang Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
- Masih dibutuhkannya tenaga dan peralatan untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan pengoorganisasian pelaksanaan tugas Prangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Protokoler, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi;
- Masih terbatasnya sarana penunjang berupa kendaraan oprasional dan perlengkapan kerja untuk mobilisasi pelaksanaan kegiatan;
- Peningkatan koordinasi dan sinergi antara Satuan Prangkat Daerah yang belum optimal dalam rangka penyelenggaraan kegiatan baik dalam waktu pelaksanaan maupun pada materi kegiatan (naskah sambutan/pidato) yang sering terlambat disampaikan;



- Proses pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan waktu Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan;
- Kurangnya SDM pengelola pengadaan barang dan jasa;
- Koordinasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menuju Central Of Excelent belum terintegrasi dengan baik;
- Belum optimalnya ULP sebagai pusat pengadaan barang dan jasa, yang seharusnya tidak tersebar di OPD sebagai pejabat pengadaan;
- Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- Belum optimalnya laporan kinerja perangkat daerah;
- Pembinaan evaluasi kinerja perangkat daerah belum maksimal;
- Belum optimalnya koordinasi Forkopimda;
- Belum optimalnya Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- Perlunya Penguatan Kelembagaan Baznas, LPTQ, MUI, PHBI, BKMT, Muhammadiyah, NU, BPIH, FKG-TPO, Wahdah Islamiah, Organisasi Hindu, Kristen dan Katolik;
- Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Iman dan Guru Mengaji serta Pendeta, Pemangku dan Pasriaman.

Sekretariat DPRD

- Kurangnya dukungan keahlian yang berkompeten dalam membantu DPRD menyelesaikan produk



hukum daerah;

- Kurang optimalnya dukungan pelayanan administrasi DPRD yang tepat waktu;
- Kurangnya dukungan teknis yang memadai dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

8. Kewilayahan

Kecamatan

- Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk memaksimalkan Pelayanan di Kecamatan;
- Belum optimalnya pelayanan publik kecamatan;
- Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan;
- Belum optimalnya koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- Kurang Optimalnya Infrastruktur Dasar di Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- Masih belum meratanya Jaringan Telekomunikasi dan Listrik;
- Pengembangan infrastruktur konektivitas jalan antar wilayah ibu kota kecamatan belum optimal;



4.2 Isu-Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis Global

A. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia.

Diharapkan terbentuknya pasar tunggal tersebut mendorong negara-negara di ASEAN untuk mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang kuat dalam menghadapi arus persaingan secara global. Meskipun adanya MEA sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra, perdebatan tersebut cenderung mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota dalam menghadapi iklim ekonomi baru di wilayah Asia Tenggara. Dalam menunjang tujuan MEA tersebut, setidaknya ada empat fokus utama yang dijalankan pada era pasar bebas ini sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

Beberapa Sektor yang menjadi Peluang bagi Indonesia dalam MEA



Sebenarnya adanya MEA memberi peluang bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang potensial.

Tentu saja hal tersebut sejalan dengan ASEAN Economic Community Blueprint yang intinya adalah MEA sangat diperlukan dalam mengurangi kesenjangan antarnegara ASEAN. MEA juga dapat digunakan sebagai jembatan dalam membangun rantai suplai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara non-ASEAN.

Kesempatan baik tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan. Dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor-impor sehingga bisa meningkatkan gross domestic product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). Karena itu, Indonesia sanggup berkompetisi dengan produk-produk unggulannya di perikanan, pertanian, dan perkebunan.

Pengembangan Sektor Investasi dan SDM Perlu Menjadi Prioritas

Selain sektor jasa dan sumber daya alam, Pemerintah juga fokus dalam mengembangkan sektor investasi dan SDM. Di sektor investasi, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar maka diprediksi akan sangat mudah untuk meningkatkan masuknya Foreign Direct Investment (FDI). Masuknya FDI ini bakal mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan SDM.



Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi serta jumlah populasinya yang tinggi juga. Di bidang ini banyak sekali para pengusaha yang melirik investasi, termasuk properti. Sebagai lahan investasi yang sangat potensial, masyarakat Indonesia bisa mengambil kesempatan emas tersebut untuk memanfaatkan aliran modal asing.

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan Indonesia juga memiliki kesempatan yang sangat besar karena dengan jumlah populasi yang dimiliki akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apalagi jika mereka sudah memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Ini juga menjadi kabar baik bagi para wirausaha karena mereka akan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja yang lebih berkompeten dari berbagai negara di wilayah Asia Tenggara.

Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Seiring dengan terciptanya peluang-peluang bisnis yang telah disebutkan di atas, ternyata setiap peluang tersebut juga memiliki risikonya masing-masing. Risiko tersebut bukan menjadi titik akhir yang tidak bisa diatasi. Akan tetapi, lebih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meminimalkan berbagai kemungkinan yang terjadi setiap adanya peluang bisnis tersebut. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi dengan adanya peluang-peluang yang telah disebutkan di atas.

Tantangan di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa

Arus perdagangan bebas entah itu barang maupun jasa akan memunculkan competition risk. Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Hal ini mengakibatkan munculnya produk-produk luar



yang beragam dalam jumlah banyak ke Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus. Industri lokal pun akan terancam akibat hal tersebut. Efek besar yang ditimbulkan adalah adanya defisit neraca perdagangan.

Oleh karena itu, para pelaku usaha khususnya para produsen menciptakan produk yang memiliki standar terbaik sehingga produk lokal tetap memiliki kualitas. Pada sektor ini, yang memiliki peluang besar adalah para pelaku UMKM. Mulai dari diberlakukannya MEA sejak awal Januari 2016, Pemerintah telah bekerja keras melalui Balai Riset dan Standarisasi Industri (Baristand) di bawah komando Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam melakukan sosialisasi dan melakukan peningkatan kualitas SDM.

Tantangan di Bidang Investasi

Pada sektor ini, Indonesia terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena adanya exploitation risk. Sebabnya, Indonesia kurang memiliki aturan dan regulasi yang ketat sehingga sektor-sektor riil semisal pertambangan mudah saja dikelola negara asing. Untuk yang satu ini, tentunya tidak banyak yang bisa diperbuat masyarakat. Padahal, Pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mencegah adanya eksploitasi alam yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing.

Tantangan di Bidang Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa. Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mengingat standar upah yang berlaku di Indonesia masih tergolong kecil sehingga tenaga kerja asing masih enggan untuk bekerja di sini. Malah sebaliknya, tenaga



kerja Indonesia lebih memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih layak.

Tantangan di Bidang UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran dan fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN. UMKM Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan. Kebanyakan kualitas produk UKM Indonesia belum memenuhi standar. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Pertama, biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi. Kedua, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dan perlu sesegera mungkin diupayakan solusinya, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha sendiri.

B. Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang



kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain:

- a. melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional.
- b. melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi.
- c. melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs.
- d. menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan
- e. mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.

Untuk menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Dalam implementasinya, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga



diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah universality. Prinsip ini mendorong penerapan SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi SDGs akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integration. Prinsip ini mengandung makna bahwa SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi khususnya terkait dengan penyusunan program dan kegiatan serta penganggarannya. Prinsip terakhir adalah “No One Left Behind” yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Beberapa aspek penting terkait dengan persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia antara lain pemetaan kesesuaian antara SDGs dengan prioritas pembangunan nasional dan pemetaan ketersediaan indikator SDGs di Indonesia. Kesesuaian Antara SDGs dan Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas pembangunan nasional jangka menengah Indonesia telah didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun RPJMN 2015-2019 disusun pada tahun 2014, banyak dari target SDGs yang sudah tercakup dalam prioritas pembangunan nasional. Dari sebanyak 169 target yang ada di SDGs, sekitar 57 persen (96 target SDGs) telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Pencapaian target SDGs bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun wajib pula diikuti oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) dengan harapan agar



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs pada tahun 2030 nantinya dapat tercapai. Selain itu, agar SDGs dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, maka sangat perlu mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, mewajibkan pengintegrasian SDGs dalam dokumen perencanaan, meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan jangka pendek atau perencanaan tahunan (RKPD dan Renja PD).

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDG's sebagai berikut:

- Tujuan 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan
- Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
- Tujuan 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern



- Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- Tujuan 11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14. Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
- Tujuan 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua



Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

C. Pandemi Covid 19

Pembangunan ke depan dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid 19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan mengalami peningkatan. Kinerja nilai tambah sektoril, industri dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil optimal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid 19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak dalam mencapai herd immunity. Dampak pandemi Covid 19 masih mungkin berlanjut sampai batas waktu yang belum diketahui, karena itu berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif maupun kuratif termasuk pelaksanaan vaksinasi perlu terus dilanjutkan. Pandemi Covid 19 juga perlu dipandang sebagai momentum penguatan sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut jenis SPM yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas:

1. Pendidikan
 - a. Pendidikan menengah
 - b. Pendidikan khusus
2. Kesehatan
 - a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
 - b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi



- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
- 5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi
- 6. Sosial
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi;

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

- 1. Pengumpulan data



2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

2. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut contoh laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi

Isu-isu strategis berdasarkan penelaahan dari gambaran kondisi daerah, isu global, dan nasional sebagai berikut:

a. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya merupakan isu daerah atau nasional, bahkan merupakan isu global yang menjadi kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2015. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs)) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

TPB/SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universalitas, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang



pun yang terlewatkan atau “No one is Left Behind.” Salah satu yang menjadi tujuan utama Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kemiskinan, berdasarkan komitmen global bahwa kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty).

Jumlah penduduk miskin Sulawesi Tenggara (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tenggara pada bulan Maret 2018 adalah 307,10 ribu orang (11,63 persen), berkurang sebesar 6,1 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang berjumlah 313,16 ribu orang (11,97 persen). Selama periode September 2017 - Maret 2018, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 4,5 ribu orang namun terjadi peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,03 poin dari 14,74 persen periode September 2017 menjadi 14,77 persen pada periode Maret 2018, sementara di daerah perkotaan berkurang 1,6 ribu orang atau menurun 0,57 poin dari periode September 2017 (7,14 persen) menjadi 6,56 persen pada periode Maret 2018. tersebut pula persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,34 poin, dari 11,97 persen menjadi 11,63 persen.

Pada bulan Maret 2017, sebagian besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan yakni 268,96 ribu orang (81,08 persen) dari total penduduk miskin di Sulawesi Tenggara, dan pada bulan September 2017 penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan berjumlah 245,19 ribu orang (78,30 persen) dari total penduduk miskin. Selama periode lima tahun terakhir (September 2013-2017) penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,76 persen. Masih tingginya persentase penduduk miskin di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh petani) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil). Hal ini disebabkan



antara lain belum berkembangnya kelembagaan kelompok petani dan nelayan.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2017, IPM Sulawesi Tenggara telah mencapai 69,86. Angka ini meningkat sebesar 0,55 poin dibandingkan dengan IPM Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 yang sebesar 69,31, namun angka tersebut masih berada di bawah angka nasional sebesar 70,81. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara telah mencapai level "sedang". IPM Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 tumbuh sebesar 0,79 persen dibandingkan tahun 2016.

Selama periode 2016 hingga 2017, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 70,47 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,36 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,46 tahun, meningkat 0,14 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 9.094 juta rupiah pada tahun 2017, meningkat Rp. 223 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu ukuran mengenai pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan ukuran yang menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dihitung pada usia 7 tahun HLS Sulawesi Tenggara di tahun 2017 mencapai 13,36



tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Ukuran lain mengenai pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS di Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 tercatat sebesar 8,46 tahun. Ini berarti hingga tahun 2017, secara rata-rata penduduk Sulawesi Tenggara usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II). Meningkatnya angka RLS dan HLS ini tentunya seiring dengan memadainya fasilitas pendidikan. Kedepan, fasilitas pendidikan harus semakin baik karena di lembaga itulah akan melahirkan manusia yang menjadi masa depan bangsa.

Dari sisi tenaga pengajar, pada jenjang pendidikan SD di Sulawesi Tenggara untuk tahun ajaran 2017/2018, seorang guru tercatat rata-rata mengajar 14 orang murid. Semakin tinggi jenjang pendidikan, beban seorang guru tercatat semakin sedikit. Untuk jenjang SMP dan SMA, seorang guru rata-rata mengajar 11 hingga 12 orang murid. Dengan rasio yang cukup rendah tersebut, seorang guru dapat membagi perhatian yang besar terhadap perkembangan belajar tiap murid. Untuk perbandingan jumlah sekolah dengan murid tiap jenjang sekolah, pada jenjang SD mencapai 124 murid per sekolah. Pada jenjang SMP dan SMA tercatat lebih banyak, yaitu masing-masing 160 murid dan 223 murid per sekolah. Rasio murid dan sekolah ini berkaitan dengan kemampuan daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah yang seimbang bisa membantu berlangsungnya proses belajar mengajar yang baik.

Di bidang kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan ditujukan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan dan mendorong masyarakat untuk mengutamakan fasilitas kesehatan modern sebagai pilihan pengobatan. Layanan kesehatan di Sulawesi Tenggara ditopang oleh 31 rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, 279 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),



serta fasilitas kesehatan lainnya. Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Di Sulawesi Tenggara, puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang dominan menjadi rujukan penduduk untuk berobat jalan, yaitu mencapai 50,45 persen untuk tahun 2017. Secara rata-rata, setiap Puskesmas harus melayani sekitar 9,33 ribu penduduk. Perlu dicatat pula, masih ada sekitar 4 persen penduduk yang memilih untuk berobat jalan ke pengobatan tradisional. Indikator yang juga berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan adalah persentase penolong kelahiran terakhir oleh tenaga medis (dokter, bidan dan tenaga medis lain). Indikator ini pada tahun 2017 mencapai 99,47 persen, atau meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sehingga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melahirkan dengan dibantu tenaga medis juga meningkat.

Indikator kesehatan lainnya ialah banyaknya balita yang terimunisasi campak menurun dari tahun 2016 (74,56 persen) menjadi 71,87 persen pada tahun 2017. Imunisasi ini untuk kekebalan tubuh balita saat ini agar tumbuh sehat hingga dewasa. Adapun penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di tahun 2017 ialah 24,10 persen, menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat saat lahir.

AHH merupakan ukuran yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam pembangunan manusia. Dengan AHH Sulawesi Tenggara 70,47 tahun pada tahun 2017, dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir diharapkan hidup sampai mencapai umur 70 tahun. Semakin meningkatnya AHH mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat juga



semakin membaik. Meskipun AHH semakin meningkat namun angka kesakitan dan kematian masih cukup tinggi, sehingga perlu tetap fokus pada penanganan kesehatan masyarakat.

Pada sisi lain, setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63 persen dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 90 persen dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti: Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke.

Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan, prevalensi tertinggi untuk penyakit Kardiovaskuler di Indonesia adalah PJK, yakni sebesar 1,5 persen atau 2.650.340 orang. Dari prevalensi tersebut, angka tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,4 persen atau 137.130 orang) dan terendah di Provinsi Riau (0,3 persen atau 12.321 orang), untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 1,7 persen atau 26.170 orang. Sementara total wilayah timur Indonesia 2,2 persen atau 635.754 orang. angka tersebut mencapai 23,98 persen dari total seluruh Indonesia sebesar 2.650.340 orang.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah timur Indonesia berpotensi besar penyumbang penderita penyakit jantung di Indonesia. Sementara belum ada Rumah Sakit Khusus yang menangani jantung bertempat di wilayah timur Indonesia. Dari alasan yang dikemukakan tersebut, maka salah satu isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan yaitu penyediaan Rumah Sakit Khusus Jantung di



Sulawesi Tenggara yang dapat menjadi Rumah Sakit rujukan pasien penderita jantung untuk kawasan timur Indonesia.

Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan seharusnya mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

c. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Ekonomi Sulawesi Tenggara dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2017 mencapai angka 6,81 persen, dan sampai dengan triwulan II 2018 ekonomi Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 6,1% (yoy), mengalami akselerasi pertumbuhan dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya yang sebesar 5,8% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian didorong oleh akselerasi yang terjadi pada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara itu dari sisi penawaran, akselerasi pada lapangan usaha utama seperti lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha konstruksi mendorong pertumbuhan perekonomian yang terjadi. Memasuki triwulan III 2018, perkembangan beberapa indikator ekonomi di Sulawesi Tenggara mengindikasikan arah pertumbuhan dengan tren meningkat dan diperkirakan mampu tumbuh pada kisaran 6,3% - 6,7% (yoy). Sektor ekonomi yang diperkirakan akan mengalami



peningkatan kinerja yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, Lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha industri pengolahan.

d. Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pembangunan berkelanjutan merupakan isu krusial yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RPJMD. Isu pembangunan berkelanjutan merupakan isu TPB/SDGs yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan hutan, berbagai permasalahan masih terjadi seperti tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari.



e. Tata Kelola Pemerintahan

Titik krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah keterbukaan informasi dan transparansi publik, akuntabilitas kinerja pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kebijakan, dan adanya koordinasi antara pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan dalam mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat mengimplementasikannya pada semua struktur pemerintahan, meliputi: akuntabilitas kinerja pembangunan dibangun dimulai dari proses perencanaan partisipatif dan terukur, penganggaran, implementasi, evaluasi hingga pelaporan kinerja. Beberapa indikator atau parameter pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin meningkat hingga target yang ingin dicapai bernilai A. Target tersebut dapat tercapai jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten terhadap siklus manajemen tersebut. Penilaian hasil pengelolaan keuangan negara berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus dipertahankan pada penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mendapatkan opini WTP tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja tersebut tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin pesat agar memudahkan proses kerja untuk memperoleh capaian kinerja yang optimal dan mendukung e-government.



Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas, mampu menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang pesat dalam menunjang kinerja individu dan lembaganya, disamping kelembagaan yang tertata dengan baik. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai dengan penempatan ASN pada posisi yang tepat dan mampu produktif dan berkinerja baik pada instansi kerjanya. Penataan kelembagaan yang baik akan mampu bekerja secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan penguatan kelembagaan mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

f. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah

Pembangunan infrastruktur diyakini akan memiliki multiplier effect yang signifikan bagi ekonomi masyarakat. Saat ini, pembangunan infrastruktur masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sumber daya air serta perumahan sehat menjadi isu penting menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang – bidang lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang



telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2017 sepanjang 12.316 km, yang terdiri dari 1.498 km jalan nasional, 1.009 km jalan provinsi, dan 9.809 km jalan kabupaten/kota. Sedangkan Proporsi panjang jaringan jalan kondisi mantap dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2017 mencapai 71,88 persen. Meskipun aspek ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat-pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan

Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari – hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Namun demikian rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian perlu ditingkatkan yaitu hanya mencapai 69 persen pada tahun 2017.



4.2.4. Isu - Isu Strategis Daerah

Pada bagian ini menjelaskan isu-isu strategis berdasarkan penelaahan dari gambaran kondisi daerah, isu global, nasional dan Provinsi maka diidentifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dalam beberapa tahun kedepan, sebagai berikut:

a. Penanggulangan Kemiskinan

Pada dasarnya TPB/SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universalitas, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau "No one is Left Behind." Salah satu yang menjadi tujuan utama Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kemiskinan, berdasarkan komitmen global bahwa kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty).

Kemiskinan memang masih menjadi permasalahan suatu wilayah dan menjadi hal yang kompleks karena melibatkan banyak dimensi kehidupan, Data Dinas Sosial Kab. Kolaka Timur Tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan 4,887 KK atau 13,86%, sedangkan berdasarkan status kesejahteraan keluarga Sangat Miskin 1,810 KK atau 5,12%, Miskin 3,077 KK atau 8,71%, Hampir Miskin 3,161 KK atau 8,95%, Rentan Miskin 4,637 KK atau 13,13%, Menuju Middle Class 4,784 KK atau 13,54%.

Isu Kerawanan pangan menjadi salah satu perhatian penanggulan kemiskinan dimana suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu



tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial.

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena: (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

Kerawanan Pangan di Kabupaten Kolaka Timur dapat terjadi pada daerah-daerah yang jauh dari sumber-sumber produksi utamanya di Kecamatan Ueesi dan Kecamatan Uluiwoi ini disebabkan karena sarana infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah tersebut kurang memadai.

Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) Kab. Kolaka Timur pada Tahun 2020, Rawan Pangan Tinggi 28 Desa, Rawan Pangan Sedang 35 Desa,



Rawan Pangan Rendah 8 Desa, Tahan Pangan Rendah 10 Desa, Tahan Pangan Sedang 24 Desa dan Tahan Pangan Tinggi Sebanyak 28 Desa.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara umum pembangunan manusia di Kolaka Timur selama periode 2016-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kolaka Timur mencapai 63.60. Telah terjadi kenaikan sebesar 0.95 basis poin menjadi 64.55 pada 2017. Pada tahun 2018 IPM Kolaka Timur meningkat sebesar 0.98 basis poin menjadi 65.53, pada tahun 2020 mengalami kenaikan 67,02 dibandingkan tahun 2019 66,49. Kabupaten Kolaka Timur dari Tahun 2016-2020 mengalami naikan terus menerus.

Peningkatan angka IPM tidak terlepas dari peran pemerintah untuk terus menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan merata, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penyediaan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat Kolaka Timur. Peningkatan angka IPM merupakan gabungan dari meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan dan standar hidup serta Memperkuat sumber daya manusia dengan fasilitas/sarana dan penegakan hukum untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan data BPS Tahun 2019 angka harapan hidup 71,99 Tahun, harapan lama sekolah 11,89 Tahun, rata-rata lama sekolah 7,18 Tahun.

Pada bidang pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, relevansi pendidikan yakni dengan



pendekatan atau strategis peningkatan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Pengelolaan pendidikan yang berkualitas bertujuan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan zaman agar berdaya guna dan berhasil guna. Pada angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2016 adalah sebesar 14.372 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar. pada jenjang Sekolah Menengah Pertama angka partisipasi sekolah sebesar 5.529 dan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 4.739. Hampir semua anak usia 7-12 tahun sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. tingginya angka partisipasi sekolah pada kelompok umur ini di pengaruhi oleh program pemerintah pendidikan gratis untuk semua. Tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah cenderung menurun di semua angka partisipasi sekolah hingga tahun 2020 menjadi 12.940 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar, 5.347 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan 3.978 pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2020 mengalami penurunan 98,73 dibandingkan pada tahun 2019 99,19 kelompok umur Sekolah Dasar (SD) sedangkan kelompok umur Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami kenaikan 84,54 dibandingkan tahun 2019 76,95.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia produktif, dimana kabupaten kolaka timur sangat mengupayakan pengendalian penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah kecamatan kabupaten kolaka timur serta memaksimalkan pelayan jaminan



sosial bagi masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia, keberhasilan pembangunan kesehatan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan dilakukan dengan 3 induk indikator umum yaitu indikator input dan proses yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor pendukung kesehatan; indikator antara yang berhubungan dengan keadaan lingkungan, perilaku hidup sehat, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan; indikator derajat kesehatan yang berhubungan dengan mortalitas, morbiditas dan status gizi. Untuk membantu menunjang pembangunan bidang kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur memberikan pelayanan kesehatan melalui BPJS dan Kartu Sehat Daerah bagi Daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin.

Hasil rekapitulasi data dari rekapan Puskesmas, jumlah penduduk yang telah memanfaatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Jaminan Kesehatan bagi keluarga miskin integrasi ke KIS selama tahun 2019 sebanyak 77,335 jiwa atau 58%, baik pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas maupun pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit, sedangkan pada tahun 2020 kepesertaan BPJS pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas 33,723 dan pelayan kesehatan rujukan 1,861.

a. Puskesmas

Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur berjumlah 12 dari 12 Kecamatan, yang terdiri dari 10 Puskesmas Non rawat Inap dan 2 Puskesmas rawat inap.



b. Puskesmas Pembantu (Pustu)

Untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, selain kegiatan pelayanan di Puskesmas Induk yang berada di Wilayah Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur juga memiliki Puskesmas Pembantu sebanyak 17 buah.

c. Polindes (Pondok Bersalin Desa)

Polindes didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Jumlah Polindes yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur memiliki 11 buah Pondok Bersalin Desa

d. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)

Selain Polindes, Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur juga memiliki 69 Pos Kesehatan Desa yang merupakan wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai resiko dan masalah kesehatan.

e. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur juga memiliki 153 Posyandu yang berada di semua desa/kelurahan. Pemanfaatan Posyandu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Angka rasio posyandu perjumlah balita terus naik dari tahun ketahun. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan



kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahan agerakan reproduksi keluarga sejahtera.

c. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Secara umum, perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui distribusi tiap sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019, Perekonomian kabupaten Kolaka Timur masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi dari sektor Pertanian mencapai 42,06 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan 13,75 persen dan konstruksi 11,78 persen. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah wilayah tersebut, khususnya dalam bidang ekonomi.

Di tahun 2019, perekonomian Kabupaten Kolaka Timur secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 5,63, terjadi peningkatan produksi di beberapa sektor lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mampu tumbuh 5,95 persen, dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai 1,63 persen. Kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mencapai 8,65 persen, jika dibandingkan tahun 2018 mencapai 5,70 persen, dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 9,65 persen, dibandingkan tahun 2018 mencapai 6,88 persen, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten kolaka timur turun minus -0,31 akibat dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi semua sektor-sektor perekonomian.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, maka Kabupaten Kolaka Timur mengalami kecenderungan perkembangan lahan



yang cukup dinamis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. salah satu unggulan komoditi kakao menjadi perhatian khusus di kabupaten kolaka timur dengan luas lahan 63.693,2 Ha, Produksi 28.354,7 Ton, Produktivitas 445,176.3 Kg/Ha, untuk luas lahan komoditi kopi 1.389 Ha, Kelapa 2.456,9 Ha, Kelapa Sawit 463,1 Ha, luas lahan tamanan hortikultura (Bawang merah, Cabai besar, Cabai rawit, Kubis, Tomat, Kacang panjang, Bawang daun, Ketimun, Sawi, Semangka) 678 Ha sedangkan perkembangan pola penggunaan lahan sawah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020, seluruh kecamatan sebesar 15.304,5 Ha, lahan tanam jagung 10.909,50 Ha, potensi perikanan air tawar yang terolah 131.19 Ha.

Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Besar menjadi peran mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan usaha di kabupaten kolaka timur berdasarkan data BPS produksi pertahun industri penggilingan padi Rp. 389,150,000/tahun, industri roti dan sejenisnya Rp. 12.000.000/tahun, industri gula merah Rp. 322,080,000/tahun, industri tempe Rp. 56,750,000/tahun, industri kerupuk Rp. 17,000,000/tahun, industri batu bata tanah liat Rp. 1,244,750,000/tahun, industri tenunan Rp. 3.000.000/tahun, industri komponen bahan bangunan Rp. 248,500,000/tahun, industri kerajinan lainnya Rp. 63,000,000/tahun, industri pengolahan lainnya (sagu) Rp. 45,000,000/tahun.

Sektor Pariwisata menjadi perhatian khusus kabupaten kolaka timur yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang tersebar diberbagai wilayah kabupaten kolaka timur sehingga bisa menjadi daya tarik turis



domestik berkunjung, serta pengembangan cakar budaya salah satu perhatian pemerintah kabupaten kolaka timur yang akan dilestarikan, Kabupaten Kolaka Timur memiliki 21 Destinasi Wisata Alam (Non Bahari) yang berpotensi untuk menjadi atraksi wisata yang bisa dikembangkan antara lain : Tetewa Water Park, Puncak Wesalo, Puncak Sorombibi, Air Terjun Mondokey, Air Terjun Lalolae, Puncak Simbune, Air Terjun Karemotingge, Rawa Koloimba, Air Terjun Puumberi, Air Terjun Ambapa, Air Terjun Aere, Air Terjun Ameroro, Rawa Tinondo, Batu Tapal Kapal (ulumowewe), Air Terjun Ulu Lambo, Air Terjun Ueesi, Air Terjun Tetewa, Air Terjun Taore, Air Terjun Menggura, Puncak Mowewe, Agrowisata Pegunungan Mondokey.

d. Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pembangunan berkelanjutan merupakan isu krusial yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RPJMD. Isu pembangunan berkelanjutan merupakan isu TPB/SDGs yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.



Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Kab. Kolaka Timur, disebabkan oleh pengelolaan air yang belum optimal, terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam pengelolaan hutan, berbagai permasalahan masih terjadi seperti tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari.

Meningkatnya kejadian bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan). Masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi banjir, kekeringan, longsor yang belum optimal, hal ini disebabkan koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/ lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat, Serta meningkatkan pengelolaan sampah yang belum maksimal guna mendukung pembangunan sarana dan prasana di TPA yang belum memadai dalam memenuhi syarat pengelolaan sampah pada umumnya.

e. Tata Kelola Pemerintahan

Titik krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah keterbukaan informasi dan transparansi publik, akuntabilitas kinerja



pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kebijakan, dan adanya koordinasi antara pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan dalam mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta meningkatkan standar pelayanan masyarakat (SPM), Pemerintah Kab. Kolaka Timur diharapkan dapat mengimplementasikannya pada semua struktur pemerintahan, meliputi: akuntabilitas kinerja pembangunan dibangun dimulai dari proses perencanaan partisipatif dan terukur, penganggaran, implementasi, evaluasi hingga pelaporan kinerja. Beberapa indikator atau parameter pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin meningkat hingga target yang ingin dicapai bernilai B. Target tersebut dapat tercapai jika Pemerintah Kab. Kolaka Timur konsisten terhadap siklus manajemen tersebut. Penilaian hasil pengelolaan keuangan negara berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus dipertahankan pada penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mendapatkan opini WTP tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja tersebut tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin pesat agar memudahkan proses kerja untuk memperoleh capaian kinerja yang optimal, mendukung e-government dan penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan prima.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas, mampu



menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang pesat dalam menunjang kinerja individu dan lembaganya, disamping kelembagaan yang tertata dengan baik. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai dengan penempatan ASN pada posisi yang tepat dan mampu produktif dan berkinerja baik pada instansi kerjanya. Penataan kelembagaan yang baik akan mampu bekerja secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan penguatan kelembagaan mulai dari kelembagaan tingkat kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Koordinasi yang dilakukan meliputi : upaya menjaga keamanan wilayah tetap kondusif dalam kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat serta norma hukum yang berlaku. Upaya lain yang harus dilakukan yaitu menekan kriminalitas dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga dengan situasi yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sejuk, rasa aman, kehidupan masyarakat yang harmonis, perlindungan terhadap hak-hak sipil terjaga dan program-program pembangunan di Kolaka Timur dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target.

f. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Wilayah

Pembangunan infrastruktur diyakini akan memiliki multiplier effect yang signifikan bagi ekonomi masyarakat. Saat ini, pembangunan infrastruktur masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.



Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sumber daya air serta perumahan sehat menjadi isu penting menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan umum, dan bidang – bidang lainnya. Pemerintah Kab. Kolaka Timur terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Kabupaten Kolaka Timur dengan beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat–pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan, panjang jalan negara 50km, jalan provinsi 67,90 km, jalan kabupaten 1036,70 km, dengan status kondisi jalan : baik 21,305 km atau 2,06% kondisi sedang 827,440 km atau 79,81%, kondisi rusak ringan 165,165 km atau 15,93%, kondisi rusak berat 22,780 km atau 2,20% , untuk panjang jalan aspal 77,392 km atau 7,47%, panjang jalan tidak aspal 959,308 km atau 92,53%, yang perlu menjadi perhatian kedepan untuk bisa terealisasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dibidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk



kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pengairan persawahan sehingga dapat memenuhi jaringan-jaringan primer, sekunder, tersier pertumbuhan produksi padi.

Setelah penetapan Perda RTRW Kabupaten Kolaka Timur, bidang penataan ruang akan difokuskan pada penyusunan RDTR Perkotaan Tirawuta dan RTR Kawasan Strategis berbasis OSS untuk mengintegrasikan perencanaan dan pembinaan penataan ruang daerah sehingga memudahkan pelayanan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta dapat menjadi acuan dalam penertiban penataan ruang di Kolaka Timur.

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat menjadi suatu prioritas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas dan distribusi barang lintas daerah. Tidak hanya pemenuhan kuantitas sarana dan prasarana saja namun peningkatan kualitas yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana perhubungan secara maksimal.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi Kabupaten Kolaka Timur yang ingin diwujudkan dalam akhir periode 5 (lima) tahun kedepan, Visi daerah menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, merefleksikan kekuatan dan potensi daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan Kolaka Timur yang hendak dicapai periode tahun 2021-2026 adalah :

“ SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA
TIMUR YANG AGAMIS, MAJU MANDIRI DAN
BERKEADILAN”

Penjelasan Visi sebagai berikut :

Sejahtera : Diartikan bahwa masyarakat Kolaka Timur memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang prima baik fisik maupun non fisik.

Masyarakat : Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada



kehidupan kolektif. Serta Masyarakat juga adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif.

Kolaka Timur : Kolaka Timur terletak di daratan Tenggara Pulau Sulawesi, dengan Seluruh wilayah merupakan Daratan, yang secara geografis terletak dibagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, memanjang dari Utara ke Selatan diantara 3°00'-4°30' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 121°45'-124°06' Bujur Timur.

Agamis : Diartikan bahwa masyarakat Kolaka Timur diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang dianut secara baik dan benar.

Maju : Diartikan bahwa masyarakat Kolaka Timur cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan.

Mandiri : Diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kolaka Timur, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan yang hakiki dalam penyelenggaraan Otonomi daerah.

Berkeadilan : Diartikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur secara merata dan berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan dan mengembangkan keadaan menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan agar kekayaan



alam dan hasil pembangunan yang meliputi segala aspek dapat dinikmati seluruh masyarakat.

5.2 Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

- Misi pertama, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal;
- Misi Kedua, Peningkatan Akseibilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- Misi Ketiga, Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif;
- Misi Keempat, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat;
- Misi Kelima, Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan, Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha;
- Misi Keenam, Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
- Misi Ketujuh, Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya;
- Misi Delapan, Mengembangkan Potensi Wisata;
- Misi Sembilan, Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib;
- Misi Sepuluh, Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;



Secara singkat maksud pelaksanaan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal;

Misi ini dimaksudkan untuk melakukan Pembinaan keagamaan serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama secara benar. Meningkatkan kompetensi guru, Meningkatkan kemampuan siswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Beasiswa bagi Siswa kurang mampu yang berprestasi, dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui muatan lokal mata pelajaran “Budi Pekerti”

2. Peningkatan Akseibilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Misi ini untuk menjamin kesehatan bagi Ibu dan anak. Meningkatkan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis. melaksanakan program dan kegiatan intervensi gizi keluarga sasaran rumah tangga 1.000 HPK (hari pertama kehidupan) dapat berjalan maksimal.

3. Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan penataan kawasan ibu kota lebih baik dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Tercapainya pemerataan pembangunan jalan dan jembatan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kolaka Timur dari pelosok hingga ke ibu kota Kabupaten.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas aparatur sipil negara. Penataan Standar Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih Profesional dalam Penataan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Menetapkan Fakta Integritas bebas dari perilaku Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).



5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Penguatan kapasitas penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga kompetensinya dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Meningkatkan dan mengembangkan Industri kecil menengah dan Koperasi. Mendorong iklim investasi dan kemitraan usaha yang kondusif dengan cara memudahkan perizinan dengan mempersingkat jalur birokrasi pada saat dalam proses perizinan usaha kecil, menengah maupun besar. Lebih aktif melakukan promosi produk unggulan daerah. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, utamanya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

6. Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;

Misi ini dimaksudkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat mewujudkan Desa berkembang, maju dan mandiri, dengan memberikan bantuan stimulus pembangunan di tiap Desa pertahun dengan harapan Kolaka Timur terlepas dari adanya wilayah Desa tertinggal, serta untuk meningkatkan solidaritas, toleransi dan kesejahteraan masyarakat.

7. Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya;

Misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, serta penyediaan sarana prasarana pembinaan generasi muda yang memadai, Pembinaan Atlet berprestasi Mendorong kreativitas seni budaya, menghidupkan dan melestarikan adat budaya dan kearifan lokal.

8. Mengembangkan Potensi Wisata;

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan sektor Pariwisata daerah melalui atraksi, amenities dan aksesibilitas, sehingga dapat meningkatkan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berefek pada ekonomi masyarakat sekitar.



9. Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib;

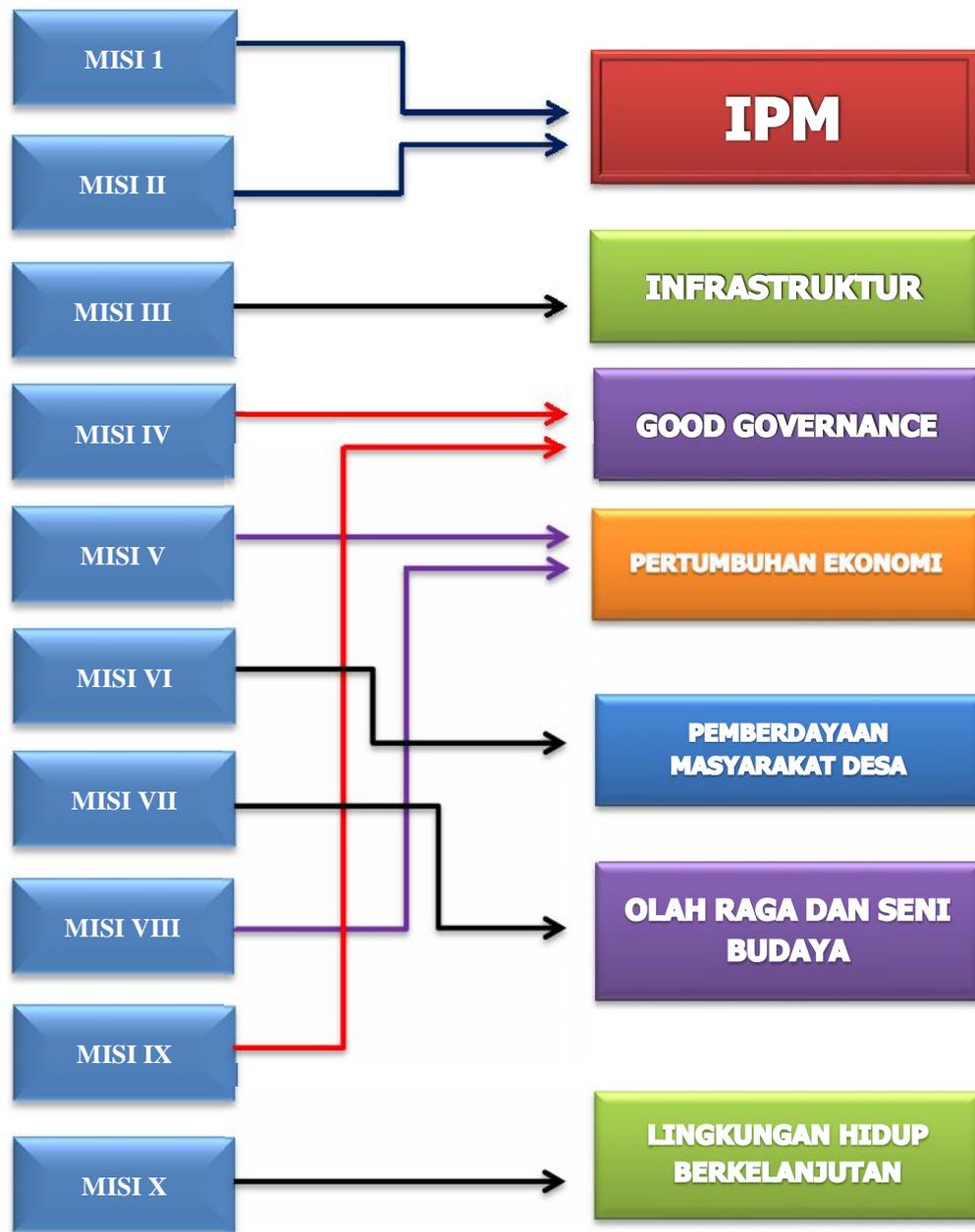
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan toleransi Kehidupan Umat Beragama, menciptakan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat, menghilangkan sekat-sekat antar suku, agama, ras dan golongan. Memperkuat Lembaga keagamaan dan kebudayaan guna membentengi masyarakat dari upaya-upaya provokasi yang mengarah pada konflik sara. Mewujudkan masyarakat yang lebih religius, sehingga perilaku sadar hukum pada masyarakat selalu tertanam pada pribadi atau kelompok dalam bersosialisasi, serta memperkuat peran pemberdayaan gender, perlindungan anak untuk terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan, serta meningkatkan peran masyarakat dan seluruh elemen-elemen terkait dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga pemilihan fungsi lingkungan hidup melalui upaya Konservasi dan Rehabilitasi, terhadap pengendalian dampak pembangunan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kesadaran hukum masyarakat bisa tercapai.



Untuk mewujudkan Misi pada periode lima (5) tahun kedepan, misi satu (1) sampai misi sepuluh (10) tidak terlepas dari saling berkaitan antara misi lainnya, digambarkan pada bagan berikut:



Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

RPJPD KAB. KOLAKA TAHUN 2005-2025	RPJMD KAB. KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026
VISI :	VISI :
KABUPATEN KOLAKA SEBAGAI DAERAH PERJUANGAN YANG AMAN, MAJU, BERBUDAYA, RELIGIUS, DEMOKRATIS, ADIL DAN SEJAHTERA	SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA TIMUR YANG AGAMIS, MAJU MANDIRI DAN BERKEADILAN
MISI :	MISI :
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, Masyarakat dan Aparatur	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Adil dan Sejahtera	2. Peningkatan Aksebilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan	3. Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Memadai	4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat
5. Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha
6. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Demokratis	6. Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat
7. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Optimal dan Berkelanjutan.	7. Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya
	8. Mengembangkan Potensi Wisata
	9. Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib
	10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat



Tabel 5.2 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

RPJMD PROV. SULTRA TAHUN 2018-2023	RPJMD KAB. KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026
VISI :	VISI :
TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT	SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA TIMUR YANG AGAMIS, MAJU MANDIRI DAN BERKEADILAN
MISI :	MISI :
1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Agar dapat Berdaulat dan Aman dalam Bidang Ekonomi, Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Politik, serta Iman dan Takwa	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal
2. Memajukan Daya Saing Wilayah melalui Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Investasi	2. Peningkatan Akseibilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Provinsi yang Modern, Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (Good Village Governance) serta Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan	3. Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif
4. Meningkatkan Konektivitas dan Kemitraan Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur, Sosial Ekonomi	4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat
	5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha
	6. Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat
	7. Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya
	8. Mengembangkan Potensi Wisata
	9. Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib
	10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat



5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan RPJMD dirumuskan dengan mengacu pada misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah yang dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran RPJMD menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan kedalam sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN.

Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Tabel 5.3 Keterkaitan Misi - Tujuan - Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	Meningkatnya mutu pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.
2	Peningkatan Akseibilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.	Tercapainya Pemerataan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3	Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif	Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan



			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis Spm
5	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Daya Saing Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Masyarakat
			Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian
6	Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Solidaritas, Toleransi Dan Kesejahteraan Masyarakat
7	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya	Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pemuda Berprestasi Di Bidang Olahraga Dan Seni Budaya
8	Mengembangkan Potensi Wisata	Mengembangkan Potensi Wisata Unggulan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah Melalui Atraksi, Amenitas Dan Aksesibilitas
9	Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib	Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Terciptanya Hubungan Yang Harmonis Antar Umat Beragama Dan Kelompok Sosial
10	Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan.	Terkendalinya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan tahun 2026 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut :

Misi 1

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan sasaran pada :



a. Pembinaan keagamaan

1. Meningkatkan kapasitas pemahaman dan pengamalan ajaran Agama.
2. Meningkatkan peran Lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
3. Bantuan Pembangunan sarana rumah Ibadah dan Ormas keagamaan
4. Tersedianya Honorarium Imam dan Pembina TPQ

b. Pendidikan

1. Meningkatkan kompetensi, Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru.
2. Jaminan penuntasan pendidikan wajib belajar 9 tahun.
3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Beasiswa bagi Siswa kurang mampu yang berprestasi
5. Menanamkan dan membumikan nilai-nilai budi pekerti melalui muatan lokal mata pelajaran "Budi Pekerti"

MISI 2

Peningkatan Akseibilitas, Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan kesehatan bagi Ibu dan anak.
2. Meningkatkan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis
5. Membangun Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

MISI 3

Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik
Yang Memadai dan Efektif;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, dengan sasaran pada :

1. Pembangunan jalan dan jembatan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kolaka Timur dari pelosok hingga ke ibu kota Kabupaten serta Pembangunan Irigasi.



2. Tersedianya pemenuhan Air Bersih Masyarakat
3. Pembangunan infrastruktur pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta meningkatkan kualitas produksinya.
4. Penataan kawasan ibu kota Kabupaten Kolaka Timur.

MISI 4

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Transparan Melayani Masyarakat;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan sasaran pada :

1. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.
2. Penataan Standar Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Profesionalitas Birokrasi yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Menetapkan Fakta Integritas bebas Pungli dan KKN.
5. Mutasi dan Promosi Jabatan Berbasis Kinerja, asas Keadilan dan manfaat.

MISI 5

Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan UMKM, Koperasi dan Pelaku Usaha;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perekonomian daerah, dengan sasaran pada :

1. Penguatan kapasitas penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
2. Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani
3. Meningkatkan dan mengembangkan Industri kecil menengah dan Koperasi
4. Mendorong iklim investasi dan kemitraan usaha yang kondusif dengan cara memudahkan perizinan dan mempersingkat jalur birokrasi serta menghilangkan praktek pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan usaha kecil, menengah maupun besar.



5. Promosi produk unggulan daerah
6. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi masyarakat, utamanya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

MISI 6

Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan sasaran pada :

1. Bantuan Stimulus Pembangunan di tiap Desa pertahun
2. Peningkatan Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan BPD
3. Menjadikan Desa lebih Berdaya dan Otonom

MISI 7

Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dengan penyediaan dana pembinaan generasi muda
2. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
3. Pembinaan Atlet berprestasi
4. Mendorong kreatifitas seni budaya, menghidupkan dan melestarikan adat budaya dan kearifan lokal

MISI 8

Mengembangkan Potensi Wisata;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pengembangan potensi wisata unggulan daerah, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan akses infrastruktur pariwisata
2. Mengembangkan destinasi wisata
3. Meningkatkan manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan Masyarakat



MISI 9

Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan hubungan sosial kemasyarakatan, dengan sasaran pada :

1. Mengembangkan Toleransi Kehidupan Umat Beragama melalui Dialog
2. Menciptakan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat, untuk menghilangkan sekat-sekat antar suku, agama, ras dan golongan.
3. Menguatkan Lembaga keagamaan dan kebudayaan sebagai bagian dari perekat keanekaragaman masyarakat guna membentengi masyarakat dari upaya-upaya provokasi yang mengarah pada konflik antar masyarakat.
4. Meningkatkan Proses Pembangunan Khusus di Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), yang lebih Religius, dengan memberikan Insentif bagi Tokoh Agama yang ada di Kolaka Timur seperti Imam Mesjid, Pendeta, Sulinggih, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Tenaga Pengajar Pesraman dan Bhikkhu.
5. Mewujudkan penegakkan hukum, memperkuat peran pemberdayaan gender, perlindungan anak untuk terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

MISI 10

Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan peran masyarakat dan seluruh elemen-elemen terkait dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sehingga kesadaran hukum masyarakat bisa tercapai.
2. Pemilihan fungsi lingkungan hidup melalui upaya Konservasi dan Rehabilitasi.
3. Meminimalisir / mengendalikan dampak pembangunan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup.



Tabel 5.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 - 2026

VISI : SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA TIMUR YANG AGAMIS, MAJU MANDIRI DAN BERKEADILAN												
No.	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR	
1	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS AJARAN AGAMA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) SERTA BUDAYA LOKAL	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	NILAI	67,02	67,10	67,18	67,21	67,24	67,30	67,30	
		MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL.	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	TAHUN	7,18	7,40	7,50	7,60	7,80	8,10	8,10	
			HARAPAN LAMA SEKOLAH	Tahun	11,89	11,95	12,00	12,00	13,9	13,9	13,9	
2	PENINGKATAN AKSEBILITAS, PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT.	ANGKA USIA HARAPAN HIDUP	TAHUN	72,33	72,60	72,70	72,80	72,85	72,90	72,90	



		TERCAPAINYA PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN	CAKUPAN KARTU SEHAT DAERAH BAGI MASYARAKAT MISKIN	PERSEN	25.00	45.00	60.00	70.00	75.00	85.00	85.00
		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN	ANGKA KESAKITAN	PERSEN	55	50	45	40	35	30	30
3	PERCEPATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN EFEKTIF	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERKUALITAS	PRESENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	PERSEN	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
		MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR JALAN	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN	PERSEN	7.47	11.64	13.96	16.28	18.60	20.92	20.92
		MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR	CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI	PERSEN	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00



4	PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN TRANSPARAN MELAYANI MASYARAKAT	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	NILAI	C	C	C	C	B	B	B
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			NILAI SAKIP	KATEGORI	CC	CC	CC	CC	B	B	B
		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DASAR BERBASIS SPM	PRESENTASE PENERAPAN SPM	PERSEN	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00
5	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PENGUATAN UMKM, KOPERASI DAN PELAKU USAHA	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH	PRESENTASE PENDUDUK KEMISKINAN	PERSEN	13,47	13,40	13,30	13,10	12,95	12,80	12,80
			LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	NILAI	-0,31	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63



		MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN MASYARAKAT	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	PERSEN	3,25	3,15	3,10	3,05	3,00	2,95	2,95
			GINI RATIO	NILAI	0,3606	0,3601	0,3598	0,3592	0,3588	0,3582	0,3582
		MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	PEREN	42,06	42,16	42,27	42,36	42,46	42,53	42,53
			SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	SKOR	80	81	82	83	84	85	85
6	PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	INDEKS DESA MEMBANGUN	NILAI	0,57	0,61	0,63	0,66	0,67	0,68	0,68
		MENINGKATNYA SOLIDARITAS, TOLERANSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	INDEKS KETAHANAN SOSIAL	NILAI	0,579	0,620	0,630	0,650	0,675	0,685	0,685



			INDEKS KETAHANAN EKONOMI	NILAI	0,579	0,622	0,637	0,670	0,675	0,692	0,692
7	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA	MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	TINGKAT PARTISIPASI ORGANISASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN	PERSEN	20.00	25.00	30.00	35.00	37.00	38.00	38.00
		MENINGKATNYA PEMUDA BERPRESTASI DI BIDANG OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA	JUMLAH PRESTASI MINIMAL PADA LEVEL PROVINSI	JUMLAH	0	2	3	3	4	4	4
8	MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA	MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA UNGGULAN DAERAH	PENINGKATAN PAD SEKTOR PARIWISATA	PERSEN	0,00	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.50
		MENINGKATNYA DAYA TARIK PARIWISATA DAERAH MELALUI ATRAKSI, AMENITAS DAN AKSESIBILITAS	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	ORANG	500	550	600	650	700	800	800
9	TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI DAN TERTIB	MEWUJUDKAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	NILAI	75.00	77.00	78.00	80.00	83.00	85.00	85.00



		TERCIPTANYA HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTAR UMAT BERAGAMA DAN KELOMPOK SOSIAL	KONFLIK SARA	KASUS	0	0	0	0	0	0	0
10	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA PROFESIONAL, SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	NILAI	58,30	68,35	70,10	72,30	73,20	74,10	74,10
		TERKENDALINYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN	INDEKS KUALITAS UDARA	NILAI	75,20	75,30	75,80	76,40	76,80	78,20	78,20
			INDEKS KUALITAS AIR	NILAI	75,20	75,40	75,60	76,20	76,60	78,30	78,30
			INDEKS TUTUPAN LAHAN	NILAI	50,20	50,40	50,60	50,70	50,80	60,10	60,10



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kolaka Timur. Adapun visi dari Kabupaten Kolaka Timur adalah SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA TIMUR YANG AGAMIS, MAJU MANDIRI DAN BERKEADILAN.

6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi Pembangunan Daerah diuraikan sebagai berikut.



Tabel 6-1 Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Misi Pertama (1) : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	Meningkatnya mutu pendidikan, pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan
		Meningkatkan Pembinaan dan pendampingan pendidikan nonformal dan informal dengan melibatkan partisipasi masyarakat
Misi Dua (2) : Peningkatan Akseibilitas, Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.	Tercapainya Pemerataan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin melalui perluasan jaminan kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan sistem kesehatan
Misi Tiga (3) : Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai dan Efektif		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Infastruktur Jalan	Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
	Meningkatnya Pembangunan Infastruktur Dasar	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana infastruktur dasar



Misi Empat (4) : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan	Penataan organisasi, tata laksana, dan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis SPM	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan berbasis SPM

Misi Lima (5) : Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Daya Saing Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Masyarakat	Pengembangan sektor-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja melalui investasi pemerintah dan swasta
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Misi Enam (6) : Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Solidaritas, Toleransi Dan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan infrastruktur desa dan Meningkatkan kualitas masyarakat desa

Misi Tujuh (7) : Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pemuda Berprestasi Di Bidang Olahraga Dan Seni Budaya	Menumbuhkan budaya olahraga dan kesenian

Misi Delapan (8) : Mengembangkan Potensi Wisata

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengembangkan Potensi Wisata Unggulan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah Melalui Atraksi, Amenitas Dan Aksesibilitas	Pengembangan destinasi pariwisata



Misi Sembilan (9) : Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Terciptanya Hubungan Yang Harmonis Antar Umat Beragama Dan Kelompok Sosial	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Misi Sepuluh (10) : Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan.	Terkendalinya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Pengendalian resiko pencemaran lingkungan hidup



6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan perumusan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026, sebagai berikut:



Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Misi Pertama (1) : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal.							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	Meningkatnya mutu pendidikan, pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.	Peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.	Peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.	Peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.	Peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
		Meningkatkan Pembinaan dan pendampingan pendidikan non formal dan informal dengan melibatkan partisipasi masyarakat	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dengan penekanan pada penguatan akhlak serta nilai-nilai budaya lokal	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dengan penekanan pada penguatan akhlak serta nilai-nilai budaya lokal	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dengan penekanan pada penguatan akhlak serta nilai-nilai budaya lokal	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dengan penekanan pada penguatan akhlak serta nilai-nilai budaya lokal	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dengan penekanan pada penguatan akhlak serta nilai-nilai budaya lokal
Misi Dua (2) : Peningkatan Akseibilitas, Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.	Tercapainya Pemerataan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin melalui perluasan jaminan kesehatan	Peningkatan jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan	Peningkatan jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan	Peningkatan jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan	Peningkatan jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan	Peningkatan jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penguatan sistem kesehatan	Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui Pembangunan/pengembangan puskesmas dan rumah sakit, dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui Pembangunan/pengembangan puskesmas dan rumah sakit, dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya	Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan anak balita, remaja, usia produktif dan usia lanjut, serta Peningkatan perbaikan gizi masyarakat pada anak remaja putri, ibu hamil dan anak balita serta kelompok-kelompok rentan gizi	Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan anak balita, remaja, usia produktif dan usia lanjut, serta Peningkatan perbaikan gizi masyarakat pada anak remaja putri, ibu hamil dan anak balita serta kelompok-kelompok rentan gizi



Misi Tiga (3) : Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai dan Efektif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Jalan	Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan untuk pengembangan interkoneksi antar wilayah.	Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan untuk pengembangan interkoneksi antar wilayah.	Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan untuk pengembangan interkoneksi antar wilayah .	Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan untuk pengembangan interkoneksi antar wilayah .	Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan untuk pengembangan interkoneksi antar wilayah .
	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan/ Peningkatan sarana prasarana infrastruktur dasar	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana transportasi, irigasi, penyediaan air minum dan utilitas umum, serta terintegrasinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana transportasi, irigasi, penyediaan air minum dan utilitas umum, serta terintegrasinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana transportasi, irigasi, penyediaan air minum dan utilitas umum, serta terintegrasinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana transportasi, irigasi, penyediaan air minum dan utilitas umum, serta terintegrasinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Pembangunan/Peningkatan sarana prasarana transportasi, irigasi, penyediaan air minum dan utilitas umum, serta terintegrasinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Misi Empat (4) : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan	Penataan organisasi, tata laksana dan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang profesionalisme.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang profesionalisme.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang profesionalisme.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang profesionalisme.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang profesionalisme.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis SPM	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan berbasis SPM	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan berbasis SPM	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan berbasis SPM	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan berbasis SPM	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan berbasis SPM	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan berbasis SPM



Misi Lima (5) : Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Daya Saing Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Masyarakat	Pengembangan sektor-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja melalui investasi pemerintah dan swasta	Peningkatan/pembangunan sarana prasana infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor Industri, Pertanian, perkebunan, perikanan air tawar, pariwisata, Koperasi dan UMKM	Peningkatan/pembangunan sarana prasana infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor Industri, Pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, Koperasi dan UMKM	Peningkatan/pembangunan sarana prasana infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor Industri, Pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, Koperasi dan UMKM	Peningkatan/pembangunan sarana prasana infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor Industri, Pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, Koperasi dan UMKM	Peningkatan/pembangunan sarana prasana infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor Industri, Pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, Koperasi dan UMKM
	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktifitas Pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui penyuluhan, sarana produksi, kelembagaan, dan pengolahan pasca panen	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui penyuluhan, sarana produksi, kelembagaan, dan pengolahan pasca panen	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui penyuluhan, sarana produksi, kelembagaan, dan pengolahan pasca panen	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui penyuluhan, sarana produksi, kelembagaan, dan pengolahan pasca panen	Peningkatan produksi dan produktivitas melalui penyuluhan, sarana produksi, kelembagaan, dan pengolahan pasca panen

Misi Enam (6) : Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Solidaritas, Toleransi Dan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan infrastruktur desa dan Meningkatkan kualitas masyarakat desa	Pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat melalui bantuan stimulus dan partisipasi masyarakat	Pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat melalui bantuan stimulus dan partisipasi masyarakat	Pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat melalui bantuan stimulus dan partisipasi masyarakat	Pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat melalui bantuan stimulus dan partisipasi masyarakat	Pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat melalui bantuan stimulus dan partisipasi masyarakat

Misi Tujuh (7) : Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pemuda Berprestasi Di Bidang Olahraga Dan Seni Budaya	Menumbuhkan budaya olahraga dan kesenian	Menyelenggarakan kegiatan yang menyalurkan minat dan bakat pemuda dalam olahraga dan kesenian, melalui peningkatan/pembangunan sarana prasarana olahraga dan kesenian	Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui peningkatan/pembangunan sarana prasarana olahraga dan kesenian	Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui peningkatan/pembangunan sarana prasarana olahraga dan kesenian	Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui peningkatan/pembangunan sarana prasarana olahraga dan kesenian	Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui peningkatan/pembangunan sarana prasarana olahraga dan kesenian



Misi Delapan (8) : Mengembangkan Potensi Wisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mengembangkan Potensi Wisata Unggulan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah Melalui Atraksi, Amenitas Dan Aksesibilitas	Pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat, melalui peningkatan/ pembangunan sarana prasarana destinasi pariwisata	Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat, melalui peningkatan/ pembangunan sarana prasarana destinasi pariwisata	Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat, melalui peningkatan/ pembangunan sarana prasarana destinasi pariwisata	Peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dibidang wisata dan mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan	Peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dibidang wisata dan mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan

Misi Sembilan (9) : Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Terciptanya Hubungan Yang Harmonis Antar Umat Beragama Dan Kelompok Sosial	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Peningkatan kelembagaan agama dan sosial masyarakat untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Peningkatan kelembagaan agama dan sosial masyarakat untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Peningkatan kelembagaan agama dan sosial masyarakat untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Peningkatan kelembagaan agama dan sosial masyarakat untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Peningkatan kelembagaan agama dan sosial masyarakat untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Misi Sepuluh (10) : Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan.	Terkendalinya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Pengendalian resiko pencemaran lingkungan hidup	Pengendalian dan pemantauan resiko pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati	Pengendalian dan pemantauan resiko pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati	Pengendalian dan pemantauan resiko pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati	Pengendalian dan pemantauan resiko pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati	Pengendalian dan pemantauan resiko pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati





6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah yang dipilih menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Penentuan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Timur juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Periode 2021-2026.



Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026

KODE		MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB		
						2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp (000)			
						TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)					
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
1		MISI 1 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS AJARAN AGAMA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) SERTA BUDAYA LOKAL																		
1	1		TUJUAN : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING	IPM	NILAI	67,02	67,1	67,18	67,21	67,24	67,3	67,3								
1	1	1	SASARAN : MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL.	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	PERSEN	7,18	7,40	7,50	7,60	7,80	8,10	8,10								
				HARAPAN LAMA SEKOLAH	PERSEN	11,89	11,95	12,00	12,00	13,9	13,9	13,9								
1	1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP	PERSEN	90	100	53,318,387	100	52,055,650	100	55,626,650	100	61,396,650	100	55,451,650	100	277,848,987	DIKMUDORA
1	1	1	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSEN	0	80	260,000	100	841,000	100	311,000	100	381,000	100	311,000	100	2,104,000	DIKMUDORA
1	1	1	3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMAL PENDIDIK	PERSEN	85	100	900,000	100	900,000	100	900,000	100	900,000	100	900,000	100	4,500,000	DIKMUDORA
1	1	1	4	PROGRAM PENGEDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PEMENUHAN PELAYAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSEN	0	70	58,500	100	58,500	100	58,500	100	256,500	100	117,000	100	549,000	DIKMUDORA



1	1	1	5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSENTASE PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSEN	0	0	-	80	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	600,000	DIKMUDORA		
1	1	1	6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTAE PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN (FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL)	PERSEN	0	45	150,000	50	160,000	55	170,000	60	180,000	65	190,000	65	850,000	DPPKB		
1	1	1	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PREDIKAT/PENHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	KATEGORI	-	PRATAMA	100,000	PRATAMA	125,000	PRATAMA	150,000	PRATAMA	175,000	PRATA MA	200,000	PRATA MA	750,000	DPPPA		
1	1	1	8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PELAYANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	PERSEN	80	80	100,000	81	125,000	82	150,000	83	175,000	84	200,000	84	750,000	DPPPA		
1	1	1	9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE KK YANG MENGALAMI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSEN	25	25	100,000	30	125,000	35	150,000	40	175,000	45	200,000	45	750,000	DPPPA		
1	1	1	10	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	MENINGKATNYA MINAT BACA	PERSEN	20	100	150,000	100	151,000	100	150,000	100	200,000	100	200,000	50	851,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
2				MISI 2 PENINGKATAN AKSEBILITAS, PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT																		
2	1			TUJUAN : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT.	ANGKA USIA HARAPAN HIDUP	TAHUN	72,33	72,60		72,70			72,80			72,85			72,90		72,90	
2	1	1		SASARAN 1 : TERCAPAINYA PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN	CAKUPAN KARTU SEHAT DAERAH BAGI MASYARAKAT MISKIN	PERSEN	25	45		60			70			75			85		85	
2	1	1	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	65	70	20,265,717	75	20,429,003	80	16,690,816	85	26,932,975	90	26,279,624	90	110,598,135	DINAS KESEHATAN		
					PERSENTASE JAMINAN KESEHATAN	PERSEN	50	60	5,464,632	70	7,594,057	80	10,788,195	90	15,047,046	100	20,370,609	100	20,370,609			
					PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PERSEN	100	100	3,893,319	100	4,087,985	100	4,292,384	100	4,507,003	100	4,732,354	100	4,732,354,185			
					PERSENTASE SARANA PRASARANA KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG SESUAI STANDAR	PERSEN	60	63		65		70		73		75		75		75		70,687,595
				PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT	PERSEN	64	65	8,653,667	66	8,653,667	67	14,295,938	68	17,663,882	69	21,420,441	69					



5	1	1	2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PEMENUHAN KELUARGA MISKIN DAN PMKS LAINNYA YANG MENDAPATKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	PERSEN	40	45	850,000	50	900,000	55	1,000,000	65	1,200,000	75	1,200,000	75	5,150,000	DINAS SOSIAL
2	1	2		SASARAN 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN	ANGKA KESAKITAN	PERSEN	55	50		45		40		35		30		30		
2	1	2	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA DALAM PENGASUHAN DAN PENDAMPINGAN ANAK, REMAJA DAN LANSIA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER	PERSEN	48	49	100,000	50	110,000	55	120,000	57	130,000	60	140,000	60	600,000	DPPKB
2	1	2	2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB	PERSEN	53.3	57	145,000	60	150,000	65	155,000	70	160,000	75	165,000	75	775,000	DPPKB
2	1	1	3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	65	70	20,265,717	75	20,429,003	80	16,690,816	85	26,932,975	90	26,279,624	90	110,598,135	DINAS KESEHATAN
					PERSENTASE JAMINAN KESEHATAN	PERSEN	50	60	5,464,632	70	7,594,057	80	10,788,195	90	15,047,046	100	20,370,609	100	20,370,609	
					PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PERSEN	100	100	3,893,319	100	4,087,985	100	4,292,384	100	4,507,003	100	4,732,354	100	4,732,354,185	
					PERSENTASE SARANA PRASARANA KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG SESUAI STANDAR	PERSEN	60	63	8,653,667	65	8,653,667	70	14,295,938	73	17,663,882	75	21,420,441	75	70,687,595	RSUD
					PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT	PERSEN	64	65		66		67		68		69				
2	1	2	4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	68	71	2,691,682	74	2,826,266	77	2,967,579	80	3,115,958	83	3,271,756	83	3,271,756,294	DINAS KESEHATAN
					PERSENTASE PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA SESUAI STANDAR RUMAH SAKIT	PERSEN	60	65	4,197,025	65	4,490,816	65	5,029,714	65	6,136,252	65	6,381,702	65	26,235,509	RSUD
2	1	2	5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN PANGAN	PERSEN	65	70	127,270	75	133,633	80	140,315	85	147,330	90	154,697	90	154,697,480	DINAS KESEHATAN



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026**

2	1	2	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT	PERSEN	35	40	146,318	45	153,633	50	161,315	55	169,381	60	177,850	60	177,850,443	DINAS KESEHATAN																					
3																					MISI 3 PERCEPATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN EFEKTIF																				
3	1			TUJUAN : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERKUALITAS	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Persen	45,00	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00																							
3	1	1		SASARAN 1 : MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR JALAN	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN	PERSEN	7.47	11.64		13.96		16.28		18.6		20.92		20.92																							
3	1	1	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN/EMBATAN	KM	225	24	57,200,000	24	57,200,000	24	55,000,000	24	52,800,000	24	52,800,000	125	275,000,000	DINAS PUPR																					
3	1	2		SASARAN 2 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR	CAKUPAN PELAYAN AIR MINUM DAN SANITASI	PERSEN	60,00	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00																							
3	1	2	1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN	PERSEN	60	62	675,000	64	375,000	66	390,000	68	400,000	70	410,000	70	2,250,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN																					
3	1	2	2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UTILITAS UMUM (PSU)	PERSEN	65	68	3,450,000	70	3,750,000	72	5,750,000	74	5,750,000	76	3,750,000	76	22,450,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN																					
3	1	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR KEWENANGAN KABUPATEN	HEKTAR	2200	600	15,500,000	640	15,500,000	665	18,000,000	690	17,000,000	715	15,500,000	3310	81,500,000	DINAS PUPR																					
3	1	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	SR	1200	120	1,200,000	140	1,400,000	140	1,500,000	140	1,400,000	140	1,300,000	680	6,800,000	DINAS PUPR																					
					TERKELOLANYA DAN BERKEMBANGNYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MASYARAKAT	SR	800	120	1,200,000	140	1,400,000	140	1,500,000	140	1,400,000	140	1,300,000	680	6,800,000																						
3	1	2	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	TERKELOLANYA DAN BERKEMBANGNYA SISTEM AIR LIMBAH UNTUK MASYARAKAT	RUMAH	859	100	2,600,000	100	2,600,000	100	2,800,000	100	2,400,000	100	1,000,000	1359	11,400,000	DINAS PUPR																					
					TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM AIR LIMBAH	RUMAH	859	100	2,600,000	100	2,600,000	100	2,800,000	100	2,400,000	100	1,000,000	1359	11,400,000																						
3	1	2	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR DRAINASE KEWENANGAN KABUPATEN	METER	8000	2000	4,000,000	2100	4,000,000	2200	6,000,000	2300	5,400,000	2400	3,400,000	19000	1,315,306,464	DINAS PUPR																					



3	1	2	7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PEMBANGUNAN DAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA GEDUNG KEWENANGAN KABUPATEN	UNIT	92	74	12,600,000	72	12,600,000	74	11,200,000	74	11,200,000	74	10,500,000	371	58,100,000	DINAS PUPR
3	1	2	8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KEWENANGAN PU	UNIT	0	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	10	10,000,000	DINAS PUPR
3	1	2	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENATAAN RUANG	KEGIATAN	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000	DINAS PUPR
3	1	2	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	TERSELENGGARANYA INFRASTRUKTUR DAN MANAJEMEN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	PERSEN	17	18	500,000	20	500,000	21	500,000	23	500,000	25	500,000	25	2,500,000	DINAS PUPR
3	1	2	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH KEGIATAN JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR YANG TERKENDALI DAN TERAWASI	KEGIATAN	0	72	80,000,000	74	80,000,000	76	100,000,000	77	100,000,000	78	50,041,456	377	410,041,456	DINAS PUPR
3	1	2	12	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	DOKUMEN	2	3	800,000	1	450,000	-	-	1	150,000	5	1,400,000	TRANSNAKER		
3	1	2	13	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	JUMLAH PEMBANGUNAN SP/RTJK DI KAWASAN TRANSMIGRASI	SP/KK	'1/233	1/75, SP/RTJK	3,871,000	1/50, SP/RTJK	3,280,000	1/75, SP/RTJK	4,877,000	1/50, SP/RTJK	3,285,000	1/50, SP/RTJK	2,286,000	1/300, SP/RTJK	17,599,000	TRANSNAKER
3	1	2	14	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSEN	75	75	204,000	75	204,000	80	204,000	80	204,000	85	204,000	85	1,020,000	TRANSNAKER
4				MISI 4 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Transparan Melayani Masyarakat																
4	1			TUJUAN : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	NILAI	C	C		B		B		B		B		B		
4	1	1		SASARAN 1 : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN	OPINI	WTP	WTP		WTP										
					NILAI SAKIP	KATEGORI	CC	CC		B		B		B		B		B		
4	1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	PERSEN	100	100	237,870,547	100	250,912,494	100	263,857,413	100	282,340,207	100	272,825,803	100	1,307,806,464	SEMUA OPD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026**

4	1	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE TERLAKSANNYA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSEN	100	100	450,000	100	455,000	100	500,000	100	1,100,000	100	520,000	100	3,025,000	BAPPEDA LITBANG		
4	1	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	PERSEN	100	100	500,000	100	505,000	100	510,000	100	515,000	100	520,000	100	2,550,000	BAPPEDA LITBANG		
4	1	1	4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	DOKUMEN	1	2	340,000	2	345,000	2	350,000	2	355,000	2	360,000	10	1,750,000	BAPPEDA LITBANG		
4	1	1	5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE APARATUR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TEPAT WAKTU	PERSEN	98	100	3,412,763	100	3,652,763	100	3,752,763	100	3,772,763	100	3,872,763	100	18,463,815	BKPSDM		
4	1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS YANG MEMILIKI KOMPETENSI DIKLAT KEPEMIMPINAN	PERSEN	9,65	11	1,000,000	15	1,000,000	17	1,000,000	19	1,000,000	20	1,000,000	20	5,000,000	BKPSDM		
					RASIO JABATAN FUNGSIONAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)	PERSEN	0	27	500,000	33	500,000	55	500,000	67	500,000	73	500,000	73	500,000		73	2,500,000
4	1	1	7	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSEN	89%	91%	900,000	94%	900,000	97%	900,000	100%	900,000	100%	900,000	100%	900,000	100%	3,690,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	1	1	8	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	PERSEN	83%	84%	600,000	86%	600,000	89%	600,000	93%	600,000	98%	600,000	97.98%	3,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
4	1	1	9	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH OPD	PERSEN	-	7%	100,000	14%	100,000	21%	100,000	29%	100,000	36%	100,000	36%	500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
4	1	1	10	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMUATAN DATA DALAM PENYAJIAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSEN	50%	60%	100,000	70%	100,000	80%	100,000	90%	100,000	100%	100,000	100%	500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
4	1	1	11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSEN	0	100%	6,000,000	100%	7,661,001	100%	2,800,000	100%	2,850,000	100%	1,900,000	100%	21,211,001	DPMPTSP		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026**

4	1	1	12	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	JUMLAH DOKUMEN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DOKUMEN	0	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	10	500,000	DPMPTSP
4	1	1	13	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH DOKUMEN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DOKUMEN	0	1	200,000	1	200,000							2	400,000	DPMPTSP
4	1	1	14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PEMENUHAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSEN	50	80	100,000	81	150,000	82	175,000	83	200,000	84	250,000	84	875,000	DPPPA
4	1	1	15	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KUALITAS DALAM PEMBANGUNAN	PERSEN	50	80	100,000	81	125,000	82	150,000	83	175,000	84	200,000	84	750,000	DPPPA
4	1	1	16	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMETAAN WILAYAH KABUPATEN	PERSEN	40%	60	4,494,230	70	4,495,377	80	4,494,692	90	4,495,931	100	4,497,014	100	22,477,244	SEKRETARIAT DAERAH
					PERSENTASE HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH	PERSEN	98%	100		100		100		100		100		100		
					PERSENTASE PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	PERSEN	100	100	9,000,000	100	4,250,000	100	6,000,000	100	5,250,000	100	5,000,000	100	29,500,000	
4	1	1	17	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSEN	96	100	655,000	100	675,250	100	695,760	100	711,540,000	100	737,600,000	100	3,475,150	SEKRETARIAT DAERAH
					PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PERSEN	80	90		100		100		100		100				
					TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN PELELANGAN	PERSEN	96	100		100		100		100		100				
4	1	1	18	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PERSENTASE OPD YANG TEPAT STRUKTUR DAN TEPAT FUNGSI	PERSEN	80	85	10,000,000	90	10,495,000	95	11,014,000	100	11,558,200	100	12,128,860	100	55,196,060	SEKRETARIAT DAERAH
					PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PERSEN	100	100		100		100		100		100				
					PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	PERSEN	100	100		100		100		100		100		100		
4	1	1	19	PROGRAM PENYELESAIAN SENGEKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGEKETA TANAH	PERSEN	60	70	162,098	80	162,098	90	162,098	95	162,098	100	162,098	100	810,490	SEKRETARIAT DAERAH



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026**

4	1	1	20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	MENINGKKATNYA KUALITAS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	PERSEN	60	70	2,463,838	75	2,956,605	83	3,547,927	95	4,257,512	98	5,109,014	98	18,334,896	INSPEKTORAT DAERAH
4	1	1	21	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	MENINGKATNYA KAPABILITAS APARATUR PENGAWASAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	PERSEN	55	60	876,301	66	1,051,561	70	1,261,874	85	1,514,249	87	1,817,098	87	6,521,083	INSPEKTORAT DAERAH
4	1	1	22	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	CAKUPAN PEMENUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSEN	80	85	10,000,000	87	10,500,000	90	11,025,000	93	11,576,250	95	11,155,063	95	55,256,313	SETWAN
4	1	1	23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN	100	100	214,598.00	100	225,328.00	100	236,594.00	100	248,424.00	100	260,845.00	100	1,185,789	KECAMATAN
4	1	1	24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSEN	100	100	1,107,994	100	1,165,394	100	1,223,413	100	1,285,184	100	1,351,843	100	6,133,828	KECAMATAN & KELURAHAN
4	1	1	25	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSEN	100	100	251,530.00	100	264,106.00	100	277,311.00	100	291,177.00	100	305,736.00	100	1,389,860	KECAMATAN
4	1	1	26	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSEN	100.00%	100%	148,125,000	100%	156,356,250	100%	164,174,062	100%	172,382,765	100%	172,382,765	100%	813,420,842	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4	1	1	27	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSEN	100%	100	500,000	100	525,000	100	551,250	100	578,813	100	607,753	100	2,762,816	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4	1	1	28	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	MENINGKATNYA CAPAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	PERSEN	100%	100	780,000	100	819,000	100	859,950	100	902,948	100	948,095	100	4,309,992	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4	1	1	29	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KEARSIPAN	PERSEN	48	100	55,000	100	70,000	100	85,000	100	90,000	100	100,000	100	400,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
4	1	1	29	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSEN	0	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	200,000	100	100,000	100	600,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
4	1	1	30	PROGRAM PENGGUNAAN PERIZINAN ARSIP	TERSEDIANYA PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PERSEN	0	100	40,000	100	60,000	100	80,000	100	100,000	100	120,000	100	400,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



4	1	1	31	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	55%	60%	1,200,000	65%	1,200,000	70%	3,000,000	75%	2,500,000	80%	2,500,000	80%	1,315,306,464	KOMINFO
4	1	1	32	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE APLIKASI E-GOVERNMENT YANG TERINTEGRASI	%	25%	30%	1,000,000	40%	1,000,000	50%	2,000,000	60%	1,800,000	65%	2,000,000	70%	7,800,000	KOMINFO
4	1	1	33	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN	LEVEL	0	0	400,000	1	500,000	1	700,000	2	750,000	3	800,000	3	3,150,000	KOMINFO
4	1	1	34	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE DATA STATISTIK YANG TERINTEGRASI UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH	PERSEN	0%	30%	300,000	40%	400,000	50%	600,000	60%	800,000	70%	700,000	70%	2,800,000	KOMINFO
4	1	2		SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DASAR BERBASIS SPM	PERSENTASE PENERAPAN SPM	PERSEN	60	65		70		75		80		85		85		
4	1	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP	PERSEN	90	100	53,318,387	100	52,055,650	100	55,626,650	100	61,396,650	100	55,451,650	100	277,848,987	DIKMUDORA
4	1	2	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PEMENUHAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG MENDAPATKAN PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	PERSEN	40	45	250,000	50	265,000	55	280,000	65	300,000	75	320,000	75	1,415,000	DINAS SOSIAL
4	1	2	3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE PEMENUHAN KELUARGA YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	PERSEN	90	90	400,000	92	420,000	95	450,000	97	485,000	100	500,000	100	2,255,000	DINAS SOSIAL
4	1	2	4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	65	70	20,265,717	75	20,429,003	80	16,690,816	85	26,932,975	90	26,279,624	90	110,598,135	DINAS KESEHATAN
					PERSENTASE JAMINAN KESEHATAN	PERSEN	50	60	5,464,632	70	7,594,057	80	10,788,195	90	15,047,046	100	20,370,609	100	20,370,609	
					PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PERSEN	100	100	3,893,319	100	4,087,985	100	4,292,384	100	4,507,003	100	4,732,354	100	4,732,354,185	
					PERSENTASE SARANA PRASARANA KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG SESUAI STANDAR	PERSEN	60	63	8,653,667	65	8,653,667	70	14,295,938	73	17,663,882	75	21,420,441	75	70,687,595	RSUD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026**

					PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT	PERSEN	64	65		66		67		68		69		69		
4	1	2	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE PENINGKATAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSEN	0	85	300,000	85	300,000	85	300,000	85	300,000	85	300,000	85	1,500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4	1	2	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	SR	1200	120	1,200,000	140	1,400,000	140	1,500,000	140	1,400,000	140	1,300,000	680	6,800,000	DINAS PUPR
					TERKELOLANYA DAN BERKEMBANGNYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MASYARAKAT	SR	800	120	1,200,000	140	1,400,000	140	1,500,000	140	1,400,000	140	1,300,000	680	6,800,000	
4	1	2	7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	TERKELOLANYA DAN BERKEMBANGNYA SISTEM AIR LIMBAH UNTUK MASYARAKAT	RUMAH	859	100	2,600,000	100	2,600,000	100	2,800,000	100	2,400,000	100	1,000,000	1359	11,400,000	DINAS PUPR
					TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM AIR LIMBAH	RUMAH	859	100	2,600,000	100	2,600,000	100	2,800,000	100	2,400,000	100	1,000,000	1359	11,400,000	
4	1	2	8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELOMPOK KERJA BANGGA KENCANA	PERSEN	0	45	50,000	50	55,000	55	60,000	60	65,000	75	70,000	75	300,000	DPPKB
4	1	2	9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING SERTA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA	PERSEN	46	50	245,000	60	250,000	65	255,000	66	260,000	70	265,000	70	1,275,000	DPPKB
4	1	2	10	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSEN	90	92	3,009,970	94	3,609,500	96	4,518,900	98	3,942,500	100	4,716,250	100	19,797,120	SATPOL-PP
4	1	2	11	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSEN	80	82	2,100,000	84	2,600,000	85	4,100,000	87	4,600,000	88	3,000,000	88	16,400,000	BPBD
4	1	2	12	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSEN	75	77	1,750,000	79	2,000,000	80	2,200,000	82	2,400,000	84	2,600,000	84	10,950,000	BPBD
5				MISI 5 PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PENGUATAN, UMKM, KOPERASI DAN PELAKU USAHA																
5	1			TUJUAN : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH	PERSENTASE PENDUDUK KEMISKINAN	PERSEN	13.47	13.4		13.3		13.1		12.95		12.8		12.8		
					LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	NILAI	-0,31	1,00-5,63		1,00-5,63		1,00-5,63		1,00-5,63		1,00-5,63		1,00-5,63		1,00-5,63



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026**

5	1	1		SASARAN 1 : MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN MASYARAKAT	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	PERSEN	3,25	3,15		3,10		3,05		3,00		2,95		2,95		
					GINI RATIO	NILAI	0,3606	0,3601		0,3598		0,3592		0,3588		0,3582		0,3582		
5	1	1	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE LEMBAGA DAN PELAKU KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSEN	60	65	300,000	70	320,000	75	350,000	80	375,000	85	400,000	85	1,745,000	DINAS SOSIAL
5	1	1	2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PEMENUHAN KELUARGA MISKIN DAN PMKS LAINNYA YANG MENDAPATKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	PERSEN	40	45	850,000	50	900,000	55	1,000,000	65	1,200,000	75	1,200,000	75	5,150,000	DINAS SOSIAL
5	1	1	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	TON	16	16.7	300,000	17	350,000	17.5	350,000	18	350,000	18.5	400,000	18.5	1,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
5	1	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	TON	17	18	250,000	18.5	300,000	19	350,000	19.5	350,000	20	400,000	20	1,650,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
5	1	1	5	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSEN	0	25	200,000	25	300,000	25	350,000	25	375,000	25	400,000	25%	1,625,000	DPMPTSP
5	1	1	6	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSEN	0	100%	350,000	100%	425,000	100%	450,000	100%	475,000	100%	500,000	100%	2,200,000	DPMPTSP
5	1	1	7	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH DESTINASI PARIWISATA YANG DIKEMBANGKAN DAN DIKELOLA	DESTINASI	4	2	3,000,000	2	5,500,000	2	6,000,000	2	7,000,000	2	5,000,000	10	26,500,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5	1	1	8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	JUMLAH PENGEMBANGAN SDM DAN EKONOMI KREATIF BIDANG PARIWISATA	KEGIATAN	10	3	1,000,000	3	1,100,000	3	1,200,000	3	1,300,000	3	1,400,000	15	6,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5	1	1	9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	JUMLAH KELOMPOK PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	KELOMPOK	38	40	1,149,000	40	1,149,000	40	1,149,000	40	1,149,000	40	1,149,000	200	5,745,000	TRANSNAKER
5	1	1	10	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	JUMLAH PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	ORANG/TAHUN	834	898	572,000	898	572,000	898	572,000	898	572,000	898	572,000	4490	2,860,000	TRANSNAKER
5	1	1	11	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	JUMLAH PERUSAHAAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL BERJALAN SESUAI PERATURAN UU	PERUSAHAAN	19	25	77,000	25	77,000	25	77,000	25	77,000	25	77,000	125	385,000	TRANSNAKER



5	1	1	12	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSENTASE PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSEN	0	40	117,000	50	124,000	60	131,000	70	138,000	80	145,000	80	655,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	13	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR	PERSEN	40	40	85,000	50	90,000	60	95,000	70	100,000	80	106,000	80	476,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	14	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSEN	0	40	70,000	50	75,000	60	80,000	70	85,000	80	90,000	80	400,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	15	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSEN	0	40	145,000	50	154,000	60	164,000	70	174,000	80	184,000	80	821,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSEN	0	40	20,000	50	21,000	60	24,000	70	25,000	80	27,000	80	117,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSEN	40	40	35,000	50	37,000	60	39,000	70	41,000	80	44,000	80	196,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	18	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	RASIO PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU YANG BERSKALA MIKRO	PERSEN	40	40	35,000	50	37,000	60	39,000	70	41,000	80	44,000	80	196,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	19	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	CAKUPAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSEN	40	40	130,000	50	138,000	60	147,000	70	157,000	80	167,000	80	739,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DI WILAYAH KERJANYA	PERSEN	15	40	420,000	50	1,313,000	60	1,381,000	70	1,453,000	80	1,527,000	80	6,094,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	21	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSEN	0	40	420,000	50	1,326,000	60	1,396,000	70	1,471,000	70	1,547,000	70	6,160,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	22	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSEN	0	40	210,000	50	221,000	60	233,000	70	246,000	80	260,000	80	1,170,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	23	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSEN	0	40	190,000	50	201,000	60	212,000	70	224,000	80	237,000	80	1,064,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	24	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSEN	0	40	115,000	50	122,000	60	129,000	70	136,000	80	144,000	80	646,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
5	1	1	25	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE TERSELESAKANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA	PERSEN	0	40	230,000	50	244,000	60	259,000	70	274,000	80	290,000	80	1,297,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026**

5	1	1	26	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSEN	0	40	80,000	50	84,000	50	90,000	50	96,000	60	102,000	60	452,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM	
5	1	1	27	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSEN	0	40	125,000	50	132,000	50	139,000	50	147,000	60	155,000	60	698,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM	
5	1	2		SASARAN 2 : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Persen	42,06	42,16		42,27		42,36		42,46		42,53		42,53			
					SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	Skor	80	81		82		83		84		85		85			
5	1	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PANGAN DALAM PENINGKATAN SUMBERDAYA EKONOMI	PERSEN	40	45	700,000	50	8,000,000	55	900,000	60	1,000,000	70	1,200,000	70	11,800,000	DINAS PANGAN	
5	1	2	2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE CADANGAN TERHADAP KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN	PERSEN	40	45	500,000	50	600,000	55	700,000	60	8,000,000	65	900,000	65	10,700,000	DINAS PANGAN	
5	1	2	3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE LOKASI/DESA RAWAN PANGAN	PERSEN	53	50	200,000	45	250,000	40	300,000	35	350,000	30	400,000	30	1,500,000	DINAS PANGAN	
5	1	2	4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN PANGAN	PERSEN	45	50	80,000	55	200,000	60	90,000	65	90,000	70	90,000	70	550,000	DINAS PANGAN	
5	1	2	5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	TINGKAT PRODUKTIVITAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	TON/HA	4,2	4,7	700,000	4,8	1,300,000	4,9	1,400,000	5	1,700,000	5,2	1,800,000	5,2	6,900,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	
					JUMLAH POPULASI TERNAK	EKOR	616.274	650,000	700,000	730,000	750,000	790,000	790,000								
					PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSEN	100	100	5,587,500	100	11,543,500	100	12,670,100	100	13,943,110	100	10,376,921	100	54,121,131	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
5	1	2	6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	PERSEN	100	90	5,630,000	92	10,630,000	95	10,630,000	97	10,630,000	99	5,930,000	99	43,450,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	
					PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSEN	92	100	1,500,000	100	1,500,000	100	1,900,000	100	1,900,000	100	1,500,000	100	8,300,000	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
5	1	2	7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN	PERSEN	90	93	500,000	94	500,000	95	500,000	96	500,000	97	500,000	97	2,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	
5	1	2	8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN TANAMAN PANGAN	PERSEN	100	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	500,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	
					JUMLAH PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	HEKTAR	0	15	162,500	17	242,500	19	265,000	20	285,000	20	285,000	91	1,240,000	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
5	1	2	9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN	0	6	110,000	8	160,000	10	210,000	11	230,000	12	240,000	47	950,000	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026**

5	1	2	10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
					JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN KEGIATAN PEMBINAAN / PENYULUHAN PERTANIAN	KELOMPOK	630	700	750	800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	8,000,000	
					PERSENTASE PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSEN	100	100	100	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,500,000	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
6				MISI 6 Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat																
6	1			TUJUAN : MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA	INDEKS DESA MEMBANGUN	Nilai	0,57	0,61	0,63											
6	1	1		SASARAN : MENINGKATNYA SOLIDARITAS, TOLERANSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	INDEKS KETAHANAN SOSIAL	Nilai	0,579	0,620	0,630											
					INDEKS KETAHANAN EKONOMI	Nilai	0,579	0,622	0,637											
6	1	1	1	PROGRAM PENATAAN DESA	MENINGKATNYA TATA WILAYAH DESA SERTA SARANA DAN PRASARANA DESA	PERSEN	0	90	91	50,000	75,000	92	75,000	93	50,000	94	50,000	94	300,000	DPMD
6	1	1	2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA, TERBENTUKNYA DESA BINAAN DAN JUMLAH KAWASAN PEDESANAN YANG TERBENTUK	JUMLAH	0	19	19	75,000	100,000	19	75,000	19	75,000	19	75,000	95	400,000	DPMD
6	1	1	3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSEN	84	86	88	1,053,000	1,053,000	90	1,125,000	94	850,000	100	850,000	100	4,931,000	DPMD
6	1	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	TERFASILITASINYA KEGIATAN PKK SERTA MENINGKATNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT YANG TERFASILITASI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN DIBERDAYAKAN	PERSEN	100	100	100	1,150,000	1,150,000	100	1,150,000	100	1,150,000	100	1,150,000	100	5,750,000	DPMD
6	1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN PARIPURNA DI KAMPUNG KB	PERSEN	0	50	60	50,000	60,000	68	70,000	75	80,000	80	90,000	80	350,000	DPPKB



6	1	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSEN	100	100	236,418.00	100	248,239.00	100	260,651.00	100	273,683.00	100	287,367.00	100	463,896,481.58	KECAMATAN
7																				
MISI 7 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA																				
7	1			TUJUAN : MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	TINGKAT PARTISIPASI ORGANISASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN	Persen	20	25		30		35		37		38		38		
7	1	1		SASARAN : MENINGKATNYA PEMUDA BERPRESTASI DI BIDANG OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA	JUMLAH PRESTASI MINIMAL PADA LEVEL PROVINSI	Jumlah	0	2		3		3		4		4		4		
7	1	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PERSEN	30	60	870,000	60	1,570,000	60	1,570,000	80	1,770,000	90	1,870,000	90	7,650,000	DIKMUDORA
7	1	1	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEJUARAAN TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI	PERSEN	30	60	1,560,000	60	3,100,000	60	3,100,000	80	4,550,000	90	3,120,000	90	15,430,000	DIKMUDORA
7	1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN	PERSEN	30	60	680,193	60	680,193	60	680,193	80	680,193	90	680,193	90	3,400,965	DIKMUDORA
7	1	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE PENGEMBANGAN KARAKTER REMAJA YANG BERKUALITAS	PERSEN	0	40	70,000	50	80,000	60	90,000	70	100,000	75	110,000	75	450,000	DPPKB
7	1	1	5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PELAYANAN KASUS KERASAN TERHADAP ANAK	PERSEN	80	80	100,000	81	125,000	82	150,000	83	175,000	84	200,000	84	750,000	DPPPA
7	1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	JUMLAH KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	KEGIATAN	4	4	500,000	4	700,000	4	750,000	4	800,000	4	850,000	20	3,600,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	1	7	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	SANGGAR SENI	1	2	500,000	2	650,000	2	700,000	2	75,000	2	800,000	10	2,725,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	1	1	8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	JUMLAH PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	CAGAR BUDAYA	0	2	400,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	700,000	10	1,315,306,464	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
8																				
MISI 8 MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA																				
8	1			TUJUAN : MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA UNGGULAN DAERAH	PENINGKATAN PAD SEKTOR PARIWISATA	Persen	0,00	0.25		0.3		0.35		0.4		0.5		0.5		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021-2026**

8	1	1		SASARAN : MENINGKATNYA DAYA TARIK PARIWISATA DAERAH MELALUI ATRAKSI, AMENITAS DAN AKSESIBILITAS	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	Orang	500	550	600	650	700	800	800							
8	1	1	1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH DESTINASI PARIWISATA YANG DIKEMBANGKAN DAN DIKELOLA	DESTINASI	4	2	3,000,000	2	5,500,000	2	6,000,000	2	7,000,000	2	5,000,000	10	26,500,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
8	1	1	2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	MENINGKATNYA PROMOSI PARIWISATA	MEDIA	2	2	1,000,000	2	1,200,000	2	1,400,000	2	1,600,000	2	1,600,000	10	6,800,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
8	1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	JUMLAH PENGEMBANGAN SDM DAN EKONOMI KREATIF BIDANG PARIWISATA	KEGIATAN	10	3	1,000,000	3	1,100,000	3	1,200,000	3	1,300,000	3	1,400,000	15	6,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
9				MISI 9 TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI DAN TERTIB																
9	1			TUJUAN : MEWUJUDKAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	NILAI	75	77	78	80	83	85	85							
9	1	1		SASARAN : TERCIPTANYA HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTAR UMAT BERAGAMA DAN KELOMPOK SOSIAL	KONFLIK SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	1	1	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMETAAN WILAYAH KABUPATEN	PERSEN	40%	60	4,494,230	70	4,495,377	80	4,494,692	90	4,495,931	100	4,497,014	100	22,477,244	SEKRETARIAT DAERAH
					PERSENTASE HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH	PERSEN	98%	100		100		100		100		100		100		
					PERSENTASE PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	PERSEN	100	100	9,000,000	100	4,250,000	100	6,000,000	100	5,250,000	100	5,000,000	100	29,500,000	
9	1	1	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSEN	90	92	3,009,970	94	3,609,500	96	4,518,900	98	3,942,500	100	4,716,250	100	19,797,120	SATPOL-PP
9	1	1	3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	0	100	398,092	100	419,746	100	440,159	100	461,477	100	484,851	100	2,204,325	KECAMATAN & KELURAHAN
9	1	1	5	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSEN	100	100	50,000	100	55,000	100	60,500	100	66,550	100	73,205	100	305,255	BAPOLPUM



9	1	1	6	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	CAKUPAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSEN	100	100	50,000	100	55,000	100	60,500	100	66,550	100	73,205	100	305,255	BAPOLPUM
9	1	1	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSEN	100	100	50,000	100	55,000	100	60,500	100	66,550	100	73,205	100	305,255	BAPOLPUM
9	1	1	8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSEN	100	100	100,000	100	110,000	100	121,000	100	133,100	100	146,410	100	610,510	BAPOLPUM
9	1	1	9	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSEN	100	100	150,000	100	165,000	100	181,500	100	199,650	100	219,615	100	915,765	BAPOLPUM
10				MISI 10 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA PROFESIONAL, SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																
10	1			TUJUAN : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Nilai	58,30	68,35		70,10		72,30		73,20		74,10		74,10		
10	1	1		SASARAN : TERKENDALINYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN	INDEKS KUALITAS UDARA	Nilai	75,20	75,30		75,80		76,40		76,80		78,20		78,20		
					INDEKS KUALITAS AIR	Nilai	75,20	75,40		75,60		76,20		76,60		78,30		78,30		
					INDEKS TUTUPAN LAHAN	Nilai	50,20	50,40		50,60		50,70		50,80		60,10		60,10		
10	1	1	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP YANG DI SUSUN	DOKUMEN	-	2	750000	1	100000	1	100000	1	100000	1	100000	6	1,150,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	1	1	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKSANAKAN	KEGIATAN	-	5	850000	4	200000	4	200000	4	200000	4	200000	21	1,650,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	1	1	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	JUMLAH RTH YANG DI BANGUN	UNIT	-	1	250000	1	250000	1	250000	1	250000	1	250000	5	1,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



10	1	1	4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DILAKSANAKAN	KEGIATAN	-	2	100000	2	100000	2	100000	2	100000	2	100000	10	500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	1	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE JUMLAH IZIN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) YANG DI AWASI DAN DIBINA	PERSEN	80%	85%	100,000	90%	100,000	95%	100,000	95%	100,000	100%	100,000	100%	500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	1	1	6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN	KEGIATAN	-	3	150000	3	150000	3	150000	3	150000	3	150000	15	750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	1	1	7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE JUMLAH PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DI TANGANI	PERSEN	100%	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	1	1	8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI	PERSEN	0.32%	2%	800,000	4%	800,000	6%	1,000,000	8%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	4,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta strategi Pembangunan Jangka Menengah Kolaka Timur Tahun 2021-2026 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing urusan yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat dan terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal enam perspektif sebagai berikut:

1. Permasalahan serta isu strategis daerah.
2. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
3. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja melalui terbukanya lapangan usaha.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, daya saing daerah dan kualitas lingkungan hidup.
5. Reformasi birokrasi menuju sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kualitas layanan secara cepat.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan menuju masyarakat yang sentosa secara merata dan berkeadilan.

Program perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel 7.2. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1.



Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 - 2026 Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	Proyeksi Pertumbuhan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	BELANJA OPERASI		403,149,968,795	429,115,538,725	456,766,630,525	486,213,438,452	517,573,408,230	550,971,717,149
	Belanja Pegawai	6%	208,004,543,010	220,484,815,591	233,713,904,526	247,736,738,798	262,600,943,125	278,356,999,713
	Belanja Barang dan Jasa	7%	188,866,010,585	202,086,631,326	216,232,695,519	231,368,984,205	247,564,813,099	264,894,350,016
	Belanja Hibah	4%	4,929,415,200	5,126,591,808	5,331,655,480	5,544,921,700	5,766,718,568	5,997,387,310
	Belanja Bunga		6,062,650,000	8,546,000,000	8,546,000,000	8,546,000,000	8,546,000,000	8,546,000,000
	Belanja Bantuan Sosial	5%	1,350,000,000	1,417,500,000	1,488,375,000	1,562,793,750	1,640,933,438	1,722,980,109
B	BELANJA MODAL		186,214,718,063	201,802,165,868	218,768,830,527	237,241,690,509	257,359,735,775	279,275,124,748
	Belanja Modal Tanah	8%	3,158,120,000	3,410,769,600	3,683,631,168	3,978,321,661	4,296,587,394	4,640,314,386
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5%	32,620,376,780	34,251,395,619	35,963,965,400	37,762,163,670	39,650,271,853	41,632,785,446
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7%	43,219,758,727	46,245,141,838	49,482,301,767	52,946,062,890	56,652,287,293	60,617,947,403
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10%	106,351,462,556	116,986,608,812	128,685,269,693	141,553,796,662	155,709,176,328	171,280,093,961
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5%	865,000,000	908,250,000	953,662,500	1,001,345,625	1,051,412,906	1,103,983,552
C	BELANJA TIDAK TERDUGA		3,000,000,000	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750	3,828,844,688
	Belanja Tidak Terduga	5%	3,000,000,000	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750	3,828,844,688
D	BELANJA TRANSFER		139,271,795,500	146,235,385,275	153,547,154,539	161,224,512,266	169,285,737,879	177,750,024,773
	Belanja Bantuan Keuangan	5%	139,271,795,500	146,235,385,275	153,547,154,539	161,224,512,266	169,285,737,879	177,750,024,773



F	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		10,000,000,000	10,300,000,000	10,609,000,000	10,927,270,000	11,255,088,100	11,592,740,743
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3%	10,000,000,000	10,300,000,000	10,609,000,000	10,927,270,000	11,255,088,100	11,592,740,743
	Penerimaan Pinjaman Daerah		151,000,000,000	0	0	0	0	0
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		3,000,000,000	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750	3,828,844,688
	Penyertaan Modal Daerah	5%	3,000,000,000	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750	3,828,844,688
	JUMLAH (A + B + C + D)		731,636,482,358	780,303,089,868	832,390,115,591	888,152,516,227	947,865,400,634	1,011,825,711,358



Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJA WAB		
					2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp (000)			
					TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PERMERINTAH DAERAH	PERSEN	100	100	237,870,547	100	250,912,494	100	263,857,413	100	282,340,207	100	272,825,803	100	1,307,806,464	SEMUA OPD
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PENDIDIKAN PAUD, SD DAN SMP	PERSEN	90	100	53,318,387	100	52,055,650	100	55,626,650	100	61,396,650	100	55,451,650	100	277,848,987	DIKUDORA
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSEN	0	80	260,000	100	841,000	100	311,000	100	381,000	100	311,000	100	2,104,000	DIKUDORA
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN MINIMAL PENDIDIK	PERSEN	85	100	900,000	100	900,000	100	900,000	100	900,000	100	900,000	100	4,500,000	DIKUDORA
1	1	5	PROGRAM PENGEDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PEMENUHAN PELAYAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSEN	0	70	58,500	100	58,500	100	58,500	100	256,500	100	117,000	100	549,000	DIKUDORA
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSENTASE PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSEN	0	0	-	80	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	600,000	DIKUDORA
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	65	70	20,265,717	75	20,429,003	80	16,690,816	85	26,932,975	90	26,279,624	90	110,598,135	DINAS KESEHATAN
				PERSENTASE JAMINAN KESEHATAN	PERSEN	50	60	5,464,632	70	7,594,057	80	10,788,195	90	15,047,046	100	20,370,609	100	20,370,609	DINAS KESEHATAN



				PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PERSEN	100	100	3,893,319	100	4,087,985	100	4,292,384	100	4,507,003	100	4,732,354	100	4,732,354,185	DINAS KESEHATAN
				PERSENTASE SARANA PRASARANA KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG SESUAI STANDAR	PERSEN	60	63	8,653,667	65	8,653,667	70	14,295,938	73	17,663,882	21,420,441	75	70,687,595	RSUD	
				PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT	PERSEN	64	65		66		67		68			69			
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	68	71		2,691,682		74		2,826,266			77			2,967,579
				PERSENTASE PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA SESUAI STANDAR RUMAH SAKIT	PERSEN	60	65	4,197,025	65	4,490,816	65	5,029,714	65	6,136,252	65	6,381,702	65	26,235,509	RSUD
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN PANGAN	PERSEN	65	70	127,270	75	133,633	80	140,315	85	147,330	90	154,697	90	154,697,480	DINAS KESEHATAN
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT	PERSEN	35	40	146,318	45	153,633	50	161,315	55	169,381	60	177,850	60	177,850,443	DINAS KESEHATAN
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR KEWENANGAN KABUPATEN	HEKTAR	2200	600	15,500,000	640	15,500,000	665	18,000,000	690	17,000,000	715	15,500,000	3310	81,500,000	DINAS PUPR
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	SR	1200	120	1,200,000	140	1,400,000	140	1,500,000	140	1,400,000	140	1,300,000	680	6,800,000	DINAS PUPR
				TERKELOLANYA DAN BERKEMBANGNYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MASYARAKAT	SR	800	120	1,200,000	140	1,400,000	140	1,500,000	140	1,400,000	140	1,300,000	680	6,800,000	DINAS PUPR
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	TERKELOLANYA DAN BERKEMBANGNYA SISTEM AIR LIMBAH UNTUK MASYARAKAT	RUMAH	859	100	2,600,000	100	2,600,000	100	2,800,000	100	2,400,000	100	1,000,000	1359	11,400,000	DINAS PUPR
				TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR SISTEM AIR LIMBAH	RUMAH	859	100	2,600,000	100	2,600,000	100	2,800,000	100	2,400,000	100	1,000,000	1359	11,400,000	DINAS PUPR
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	TERKELOLANYA INFRASTRUKTUR DRAINASE KEWENANGAN KABUPATEN	METER	8000	2000	4,000,000	2100	4,000,000	2200	6,000,000	2300	5,400,000	2400	3,400,000	19000	1,315,306,464	DINAS PUPR



1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KEWENANGAN PU	UNIT	0	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	10	10,000,000	DINAS PUPR
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PEMBANGUNAN DAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA GEDUNG KEWENANGAN KABUPATEN	UNIT	92	74	12,600,000	72	12,600,000	74	11,200,000	74	11,200,000	74	10,500,000	371	58,100,000	DINAS PUPR
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN/JEMBATAN	KM	225	24	57,200,000	24	57,200,000	24	55,000,000	24	52,800,000	24	52,800,000	125	275,000,000	DINAS PUPR
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	JUMLAH KEGIATAN JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR YANG TERKENDALI DAN TERAWASI	KEGIATAN	0	72	80,000,000	74	80,000,000	76	100,000,000	77	100,000,000	78	50,041,456	377	410,041,456	DINAS PUPR
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENATAAN RUANG	KEGIATAN	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000	DINAS PUPR
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PENENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN	PERSEN	0	85	300,000	85	300,000	85	300,000	85	300,000	85	300,000	85	1,500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSentase PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN	PERSEN	60	62	675,000	64	375,000	66	390,000	68	400,000	70	410,000	70	2,250,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSentase PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARAN UTILITAS UMUM (PSU).	PERSEN	65	68	3,450,000	70	3,750,000	72	5,750,000	74	5,750,000	76	3,750,000	76	22,450,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSentase PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSEN	90	92	3,009,970	94	3,609,500	96	4,518,900	98	3,942,500	100	4,716,250	100	19,797,120	SATPOL-PP
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSentase PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSEN	80	82	2,100,000	84	2,600,000	85	4,100,000	87	4,600,000	88	3,000,000	88	16,400,000	BPBD
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSentase PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSEN	75	77	1,750,000	79	2,000,000	80	2,200,000	82	2,400,000	84	2,600,000	84	10,950,000	BPBD



1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE LEMBAGA DAN PELAKU KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSEN	60	65	300,000	70	320,000	75	350,000	80	375,000	85	400,000	85	1,745,000	DINAS SOSIAL
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PEMENUHAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG MENDAPATKAN PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	PERSEN	40	45	250,000	50	265,000	55	280,000	65	300,000	75	320,000	75	1,415,000	DINAS SOSIAL
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PEMENUHAN KELUARGA MISKIN DAN PMKS LAINNYA YANG MENDAPATKAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	PERSEN	40	45	850,000	50	900,000	55	1,000,000	65	1,200,000	75	1,200,000	75	5,150,000	DINAS SOSIAL
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE PEMENUHAN KELUARGA YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	PERSEN	90	90	400,000	92	420,000	95	450,000	97	485,000	100	500,000	100	2,255,000	DINAS SOSIAL
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	JUMLAH KELOMPOK PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	KELOMPOK	38	40	1,149,000	40	1,149,000	40	1,149,000	40	1,149,000	40	1,149,000	200	5,745,000	TRANSNAKER
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	JUMLAH PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	ORANG/TAHUN	834	898	572,000	898	572,000	898	572,000	898	572,000	898	572,000	4490	2,860,000	TRANSNAKER
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	JUMLAH PERUSAHAAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL BERJALAN SESUAI PERATURAN UU	PERUSAHAAN	19	25	77,000	25	77,000	25	77,000	25	77,000	25	77,000	125	385,000	TRANSNAKER
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	8	2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KUALITAS DALAM PEMBANGUNAN	PERSEN	50	80	100,000	81	125,000	82	150,000	83	175,000	84	200,000	84	750,000	DPPPA
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PELAYANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	PERSEN	80	80	100,000	81	125,000	82	150,000	83	175,000	84	200,000	84	750,000	DPPPA
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE KK YANG MENGALAMI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSEN	25	25	100,000	30	125,000	35	150,000	40	175,000	45	200,000	45	750,000	DPPPA



2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PEMENUHAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSEN	50	80	100,000	81	150,000	82	175,000	83	200,000	84	250,000	84	875,000	DPPPA
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PREDIKAT/PENHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	KATEGORI	-	PRATAMA	100,000	PRATAMA	125,000	PRATAMA	150,000	PRATAMA	175,000	PRATAMA	200,000	PRATAMA	750,000	DPPPA
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PELAYANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK	PERSEN	80	80	100,000	81	125,000	82	150,000	83	175,000	84	200,000	84	750,000	DPPPA
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PANGAN DALAM PENINGKATAN SUMBERDAYA EKONOMI	PERSEN	40	45	700,000	50	8,000,000	55	900,000	60	1,000,000	70	1,000,000	70	11,600,000	DINAS PANGAN
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE CADANGAN TERHADAP KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN	PERSEN	40	45	500,000	50	600,000	55	700,000	60	8,000,000	65	900,000	65	10,700,000	DINAS PANGAN
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE LOKASI/DESA RAWAN PANGAN	PERSEN	53	50	200,000	45	250,000	40	300,000	35	350,000	30	400,000	30	1,500,000	DINAS PANGAN
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI SYARAT KEAMANAN PANGAN	PERSEN	45	50	80,000	55	200,000	60	90,000	65	90,000	70	90,000	70	550,000	DINAS PANGAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGEKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGEKETA TANAH	PERSEN	60	70	162,098	80	162,098	90	162,098	95	162,098	100	162,098	100	810,490	SEKRETARIAT DAERAH
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP YANG DI SUSUN	DOKUMEN	-	2	750000	1	100000	1	100000	1	100000	1	100000	6	1,150,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKSANAKAN	KEGIATAN	-	5	850000	4	200000	4	200000	4	200000	4	200000	21	1,650,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	JUMLAH RTH YANG DI BANGUN	UNIT	-	1	250000	1	250000	1	250000	1	250000	1	250000	5	1,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DILAKSANAKAN	KEGIATAN	-	2	100000	2	100000	2	100000	2	100000	2	100000	10	500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE JUMLAH IZIN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) YANG DI AWASI DAN DIBINA	PERSEN	80%	85%	100,000	90%	100,000	95%	100,000	95%	100,000	100%	100,000	100%	500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN	KEGIATAN	-	3	150000	3	150000	3	150000	3	150000	3	150000	15	750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE JUMLAH PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DI TANGANI	PERSEN	100%	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE VOLUME SAMPAH YANG TERTANGANI	PERSEN	0.32%	2%	800,000	4%	800,000	6%	1,000,000	8%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	4,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSEN	89%	91%	900,000	94%	900,000	97%	900,000	100%	900,000	100%	900,000	100%	3,690,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL	PERSEN	83%	84%	600,000	86%	600,000	89%	600,000	93%	600,000	98%	600,000	97.98%	3,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH OPD	PERSEN	-	7%	100,000	14%	100,000	21%	100,000	29%	100,000	36%	100,000	36%	500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PEMUATAN DATA DALAM PENYAJIAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSEN	50%	60%	100,000	70%	100,000	80%	100,000	90%	100,000	100%	100,000	100%	500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	MENINGKATNYA TATA WILAYAH DESA SERTA SARANA DAN PRASARANA DESA	PERSEN	0	90	50,000	91	75,000	92	75,000	93	50,000	94	50,000	94	300,000	DPMD
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	JUMLAH DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA, TERBENTUKNYA DESA BINAAN DAN JUMLAH KAWASAN PEDESAAAN YANG TERBENTUK	JUMLAH	0	19	75,000	19	100,000	19	75,000	19	75,000	19	75,000	95	400,000	DPMD
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSEN	84	86	1,053,000	88	1,053,000	90	1,125,000	94	850,000	100	850,000	100	4,931,000	DPMD
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	TERFASILITASINYA KEGIATAN PKK SERTA MENINGKATNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT YANG TERFASILITASI DALAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN DIBERDAYAKAN	PERSEN	100	100	1,150,000	100	1,150,000	100	1,150,000	100	1,150,000	100	1,150,000	100	5,750,000	DPMD
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN (FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL)	PERSEN	0	45	150,000	50	160,000	55	170,000	60	180,000	65	190,000	65	850,000	DPPKB
				PERSENTASE PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELOMPOK KERJA BANGGA KENCANA	PERSEN	0	45	50,000	50	55,000	55	60,000	60	65,000	75	70,000	75	300,000	DPPKB
				PERSENTASE PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN PARIPURNA DI KAMPUNG	PERSEN	0	50	50,000	60	60,000	68	70,000	75	80,000	80	90,000	80	350,000	DPPKB



				KB																
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB	PERSEN	53.3	57	145,000	60	150,000	65	155,000	70	160,000	75	165,000	75	775,000	DPPKB	
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PERSENTASE PENGEMBANGAN KARAKTER REMAJA YANG BERKUALITAS	PERSEN	0	40	70,000	50	80,000	60	90,000	70	100,000	75	110,000	75	450,000	DPPKB	
				PERSENTASE PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA DALAM PENGASUHAN DAN PENDAMPINGAN ANAK, REMAJA DAN LANSIA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER	PERSEN	48	49	100,000	50	110,000	55	120,000	57	130,000	60	140,000	60	600,000	DPPKB	
				PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBINAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING SERTA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA	PERSEN	46	50	245,000	60	250,000	65	255,000	66	260,000	70	265,000	70	1,275,000	DPPKB	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	TERSELENGGARANYA INFRASTRUKTUR DAN MANAJEMEN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	PERSEN	17	18	500,000	20	500,000	21	500,000	23	500,000	25	500,000	25	2,500,000	DINAS PUPR	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	55%	60%	1,200,000	65%	1,200,000	70%	3,000,000	75%	2,500,000	80%	2,500,000	80%	1,315,306,464	DISKOMINFO	
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE APLIKASI E-GOVERNMENT YANG TERINTEGRASI	%	25%	30%	1,000,000	40%	1,000,000	50%	2,000,000	60%	1,800,000	65%	2,000,000	70%	7,800,000	DISKOMINFO	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PRESENTASE PERLAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSEN	0	40	117,000	50	124,000	60	131,000	70	138,000	80	145,000	80	655,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM	
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR	PERSEN	40	40	85,000	50	90,000	60	95,000	70	100,000	80	106,000	80	476,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM	



2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PRESENTASE PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSEN	0	40	70,000	50	75,000	60	80,000	70	85,000	80	90,000	80	400,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PRESENTASE PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSEN	0	40	145,000	50	154,000	60	164,000	70	174,000	80	184,000	80	821,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PRESENTASE PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSEN	0	40	20,000	50	21,000	60	24,000	70	25,000	80	27,000	80	117,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PRESENTASE PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSEN	40	40	35,000	50	37,000	60	39,000	70	41,000	80	44,000	80	196,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	RASIO PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU YANG BERSKALA MIKRO	PERSEN	40	40	35,000	50	37,000	60	39,000	70	41,000	80	44,000	80	196,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH DOKUMEN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DOKUMEN	0	1	200,000	1	200,000							2	400,000	DPMPPTSP
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSEN	0	25	200,000	25	300,000	25	350,000	25	375,000	25	400,000	25%	1,625,000	DPMPPTSP
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSEN	0	100%	6,000,000	100%	7,661,001	100%	2,800,000	100%	2,850,000	100%	1,900,000	100%	21,211,001	DPMPPTSP
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGENDALIAN PROGRAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSEN	0	100%	350,000	100%	425,000	100%	450,000	100%	475,000	100%	500,000	100%	2,200,000	DPMPPTSP
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	JUMLAH DOKUMEN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DOKUMEN	0	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	10	500,000	DPMPPTSP
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PERSEN	30	60	870,000	60	1,570,000	60	1,570,000	80	1,770,000	90	1,870,000	90	7,650,000	DIKMUDORA
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEJUARAAN TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI	PERSEN	30	60	1,560,000	60	3,100,000	60	3,100,000	80	4,550,000	90	3,120,000	90	15,430,000	DIKMUDORA



2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN	PERSEN	30	60	680,193	60	680,193	60	680,193	80	680,193	90	680,193	90	3,400,965	DIKMUDORA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2	20	2	PROGRAM PENYELNGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE DATA STATISTIK YANG TERINTEGRASI UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH	PERSEN	0%	30%	300,000	40%	400,000	50%	600,000	60%	800,000	70%	700,000	70%	2,800,000	KOMINFO
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN	LEVEL	0	0	400,000	1	500,000	1	700,000	2	750,000	3	800,000	3	3,150,000	DISKOMINFO
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	JUMLAH KEGIATAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	KEGIATAN	4	4	500,000	4	700,000	4	750,000	4	800,000	4	850,000	20	3,600,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	SANGGAR SENI	1	2	500,000	2	650,000	2	700,000	2	75,000	2	800,000	10	2,725,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	JUMLAH PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	CAGAR BUDAYA	0	2	400,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	700,000	10	1,315,306,464	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	MENINGKATNYA MINAT BACA	PERSEN	20	100	150,000	100	151,000	100	150,000	100	200,000	100	200,000	50	851,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KEARSIPAN	PERSEN	48	100	55,000	100	70,000	100	85,000	100	90,000	100	100,000	100	400,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSEN	0	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	200,000	100	100,000	100	600,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	4	PROGRAM PENGGUNAAN PERINZIN ARSIP	TERSEDINYA PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PERSEN	0	100	40,000	100	60,000	100	80,000	100	100,000	100	120,000	100	400,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	TON	16	16.7	300,000	17	350,000	17.5	350,000	18	350,000	18.5	400,000	18.5	1,750,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	TON	17	18	250,000	18.5	300,000	19	350,000	19.5	350,000	20	400,000	20	1,650,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH DESTINASI PARIWISATA YANG DIKEMBANGKAN DAN DIKELOLA	DESTINASI	4	2	3,000,000	2	5,500,000	2	6,000,000	2	7,000,000	2	5,000,000	10	26,500,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	MENINGKATNYA PROMOSI PARIWISATA	MEDIA	2	2	1,000,000	2	1,200,000	2	1,400,000	2	1,600,000	2	1,600,000	10	6,800,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	JUMLAH PENGEMBANGAN SDM DAN EKONOMI KREATIF BIDANG PARIWISATA	KEGIATAN	10	3	1,000,000	3	1,100,000	3	1,200,000	3	1,300,000	3	1,400,000	15	6,000,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	TINGKAT PRODUKTIVITAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	TON/HA	4,2	4,7	700,000	4,8	1,300,000	4,9	1,400,000	5	1,700,000	5,2	1,800,000	5,2	6,900,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
				JUMLAH POPULASI TERNAK	EKOR	616,274	650,000		700,000		730,000		750,000		790,000		790,000		
				PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSEN	100	100	5,587,500	100	11,543,500	100	12,670,100	100	13,943,110	100	10,376,921	100	54,121,131	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	PERSEN	100	90	5,630,000	92	10,630,000	95	10,630,000	97	10,630,000	99	5,930,000	99	43,450,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
				PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSEN	92	100	1,500,000	100	1,500,000	100	1,900,000	100	1,900,000	100	1,500,000	100	8,300,000	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTUR A
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN	PERSEN	90	93	500,000	94	500,000	95	500,000	96	500,000	97	500,000	97	2,500,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN



3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN TANAMAN PANGAN	PERSEN	100	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	500,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
				JUMLAH PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	HEKTAR	0	15	162,500	17	242,500	19	265,000	20	285,000	20	285,000	91	1,240,000	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTUR A
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN	0	6	110,000	8	160,000	10	210,000	11	230,000	12	240,000	47	950,000	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTUR A
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSEN	100	100	800,000	100	1,800,000	100	1,800,000	100	1,800,000	100	1,800,000	100	8,000,000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
				JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN KEGIATAN PEMBINAAN / PENYULUHAN PERTANIAN	KELOMPOK	630	700		750		800		850		900		4000		
				PERSENTASE PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSEN	100	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	100	500,000	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															-	
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	CAKUPAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSEN	40	40	130,000	50	138,000	60	147,000	70	157,000	80	167,000	80	739,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DI WILAYAH KERJANYA	PERSEN	15	40	420,000	50	1,313,000	60	1,381,000	70	1,453,000	80	1,527,000	80	6,094,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PRESENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSEN	0	40	420,000	50	1,326,000	60	1,396,000	70	1,471,000	70	1,547,000	70	6,160,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSEN	0	40	210,000	50	221,000	60	233,000	70	246,000	80	260,000	80	1,170,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
3	30	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE STANDARISASI DAN PERINDUNGAN KONSUMEN	PERSEN	0	40	190,000	50	201,000	60	212,000	70	224,000	80	237,000	80	1,064,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSEN	0	40	115,000	50	122,000	60	129,000	70	136,000	80	144,000	80	646,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																



3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE TERSELESAKANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA	PERSEN	0	40	230,000	50	244,000	60	259,000	70	274,000	80	290,000	80	1,297,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSEN	0	40	80,000	50	84,000	50	90,000	50	96,000	60	102,000	60	452,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSEN	0	40	125,000	50	132,000	50	139,000	50	147,000	60	155,000	60	698,000	PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	DOKUMEN	2	3	800,000	1	450,000	-	-	-	1	150,000	5	1,400,000	TRANSAKER	
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	JUMLAH PEMBANGUNAN SP/RTJK DI KAWASAN TRANSMIGRASI	SP/KK	1/233	1/75, SP/RTJK	3,871,000	1/50, SP/RTJK	3,280,000	1/75, SP/RTJK	4,877,000	1/50, SP/RTJK	3,285,000	1/50, SP/RTJK	2,286,000	1/300, SP/RTJK	17,599,000	TRANSAKER
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSEN	75	75	204,000	75	204,000	80	204,000	80	204,000	85	204,000	85	1,020,000	TRANSAKER
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1		SEKRETARIAT DAERAH																
4	1	1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PERSENTASE OPD YANG TEPAT STRUKTUR DAN TEPAT FUNGSI	PERSEN	80	85		90		95		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
				PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PERSEN	100	100	10,000,000	100	10,495,000	100	11,014,000	100	11,558,200	100	12,128,860	100	55,196,060	
				PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	PERSEN	100	100		100		100		100		100		100		
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMETAAN WILAYAH KABUPATEN	PERSEN	40%	60	4,494,230	70	4,495,377	80	4,494,692	90	4,495,931	100	4,497,014	100	22,477,244	SEKRETARIAT DAERAH
				PERSENTASE HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH	PERSEN	98%	100		100		100		100		100		100		
				PERSENTASE PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	PERSEN	100	100	9,000,000	100	4,250,000	100	6,000,000	100	5,250,000	100	5,000,000	100	29,500,000	
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSEN	96	100	655,000	100	675,250	100	695,760	100	711,540,000	100	737,600,000	100	3,475,150	SEKRETARIAT DAERAH
				PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PERSEN	80	90		100		100		100		100		100		



				TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN PELELANGAN	PERSEN	96	100		100		100		100		100				
4	2		SEKRETARIAT DPRD															-	
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	CAKUPAN PEMENUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSEN	80	85	10,000,000	87	10,500,000	90	11,025,000	93	11,576,250	95	11,155,063	95	55,256,313	SETWAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	1		PERENCANAAN																
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE TERLAKSANNYA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSEN	100	100	450,000	100	455,000	100	500,000	100	1,100,000	100	520,000	100	3,025,000	BAPPEDA LITBANG
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE MENINGKATNYA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	PERSEN	100	100	500,000	100	505,000	100	510,000	100	515,000	100	520,000	100	2,550,000	BAPPEDA LITBANG
5	2		KEUANGAN																
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSEN	100.00%	100%	148,125,000	100%	156,356,250	100%	164,174,062	100%	172,382,765	100%	172,382,765	100%	813,420,842	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSEN	100%	100	500,000	100	525,000	100	551,250	100	578,813	100	607,753	100	2,762,816	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	MENINGKATNYA CAPAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	PERSEN	100%	100	780,000	100	819,000	100	859,950	100	902,948	100	948,095	100	4,309,992	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	3		KEPEGAWAIAN																
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE APARATUR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TEPAT WAKTU	PERSEN	98	100	3,412,763	100	3,652,763	100	3,752,763	100	3,772,763	100	3,872,763	100	18,463,815	BKPSDM



5				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS YANG MEMILIKI KOMPETENSI DIKLAT KEPEMIMPINAN	PERSEN	9,65	11	1,000,000	15	1,000,000	17	1,000,000	19	1,000,000	20	1,000,000	20	5,000,000	BKPSDM	
	3	3			RASIO JABATAN Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	PERSEN	0	27	500,000	33	500,000	55	500,000	67	500,000	73	500,000	73	2,500,000	BKPSDM	
5	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5	5	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	DOKUMEN	1	2	340,000	2	345,000	2	350,000	2	355,000	2	360,000	10	1,750,000	BAPPEDA LITBANG	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
6	1			INSPEKTORAT DAERAH																	
6	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	PERSEN	60	70	2,463,838	75	2,956,605	83	3,547,927	95	4,257,512	98	5,109,014	98	18,334,896	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	MENINGKATNYA KAPABILITAS APARATUR PENGAWASAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	PERSEN	55	60	876,301	66	1,051,561	70	1,261,874	85	1,514,249	87	1,817,098	87	6,521,083	INSPEKTORAT DAERAH	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1			KECAMATAN																	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSEN	100	100	214,598	100	225,328	100	236,594	100	248,424	100	260,845	100	410,081	KECAMATAN	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSEN	100	100	1,107,994	100	1,165,394	100	1,223,413	100	1,285,183	100	1,351,843	100	1,042,961	KECAMATAN & KELURAHAN	
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	PERSEN	0	100	398,092	100	419,746	100	440,159	100	461,477	100	484,851	100	2,204,325	KECAMATAN & KELURAHAN	
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSEN	100	100	251,530	100	264,106	100	277,311	100	291,177	100	305,736	100	554,194	KECAMATAN	



7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSEN	100	100	236,418	100	248,239	100	260,651	100	273,683	100	287,367	100	463,896	KECAMATAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	CAKUPAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSEN	100	100	50,000	100	55,000	100	60,500	100	66,550	100	73,205	100	305,255	BAPOLPUM
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	CAKUPAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSEN	100	100	50,000	100	55,000	100	60,500	100	66,550	100	73,205	100	305,255	BAPOLPUM
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSEN	100	100	50,000	100	55,000	100	60,500	100	66,550	100	73,205	100	305,255	BAPOLPUM
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSEN	100	100	100,000	100	110,000	100	121,000	100	133,100	100	146,410	100	610,510	BAPOLPUM
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSEN	100	100	150,000	100	165,000	100	181,500	100	199,650	100	219,615	100	915,765	BAPOLPUM



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Kolaka Timur terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Kolaka Timur, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama berdasarkan



uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022-2026 pada tabel berikut ini :

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kolaka Timur

No.	INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Nilai	67,10	67,18	67,21	67,24	67,30
2	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	Tahun	7,40	7,50	7,60	7,80	8,10
3	HARAPAN LAMA SEKOLAH	Tahun	11,95	12,00	12,00	13,9	13,9
4	ANGKA USIA HARAPAN HIDUP	Tahun	72,60	72,70	72,80	72,85	72,90
5	CAKUPAN KARTU SEHAT DAERAH BAGI MASYARAKAT MISKIN	Persen	45,00	60,00	70,00	75,00	85,00
6	ANGKA KESAKITAN	Persen	50	45	40	35	30
7	PRESENTASE PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
8	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN	Persen	11.64	13.96	16.28	18.60	20.92
9	CAKUPAN PELAYAN AIR MINUM DAN SANITASI	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
10	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai	C	B	B	B	B
11	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	NILAI SAKIP	Kategori	CC	B	B	B	B
13	PRESENTASE PENERAPAN SPM	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
14	PRESENTASE PENDUDUK KEMISKINAN	Persen	13,40	13,30	13,10	12,95	12,80
15	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	Nilai	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63	1,00-5,63



16	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	Persen	3,15	3,10	3,05	3,00	2,95
17	GINI RATIO	Nilai	0,3601	0,3598	0,3592	0,3588	0,3582
18	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	Persen	42,16	42,27	42,36	42,46	42,53
19	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH)	Skor	81	82	83	84	85
20	INDEKS DESA MEMBANGUN	Nilai	0,61	0,63	0,66	0,67	0,68
21	INDEKS KETAHANAN SOSIAL	Nilai	0,620	0,630	0,650	0,675	0,685
22	INDEKS KETAHANAN EKONOMI	Nilai	0,622	0,637	0,670	0,675	0,692
23	TINGKAT PARTISIPASI ORGANISASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN	Persen	25.00	30.00	35.00	37.00	38.00
24	JUMLAH PRESTASI MINIMAL PADA LEVEL PROVINSI	Jumlah	2	3	3	4	4
25	PENINGKATAN PADA SEKTOR PARIWISATA	Persen	0.30	0.35	0.40	0.50	0.50
26	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	Orang	550	600	650	700	800
27	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	NILAI	77.00	78.00	80.00	83.00	85.00
28	KONFLIK SARA	Kasus	0	0	0	0	0
29	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Nilai	68,35	70,10	72,30	73,20	74,10
30	INDEKS KUALITAS UDARA	Nilai	75,30	75,80	76,40	76,80	78,20
31	INDEKS KUALITAS AIR	Nilai	75,40	75,60	76,20	76,60	78,30
32	INDEKS TUTUPAN LAHAN	Nilai	50,40	50,60	50,70	50,80	60.10



Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
1	PENDIDIKAN								
1.1	TINGKAT PARTISIPASI PAUD 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PAUD	Persen	92,23	100	100	100	100	100	100
1.2	TINGKAT PARTISIPASI SD 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR	Persen	92,43	100	100	100	100	100	100
1.3	TINGKAT PATISIPASI SMP 13-15 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	Persen	84,43	100	100	100	100	100	100
1.4	TINGKAT PASTISIPASI USIA 7-18 TAHUN YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Persen	84,83	86	88	90	92	94	94
2	KESEHATAN								
2.1	RASIO DAYA TAMPUNG RS TERHADAP JUMLAH PENDUDUK	Persen	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07
2.2	PERSENTASE RS RUJUKAN YANG TERAKREDITASI	Persen	100	100	100	100	100	100	100



2.3	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.4	PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN IBU BERSALIN	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.5	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.6	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.7	PERSENTASE ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.8	PERSENTASE ORANG USIA 15-29 TAHUN MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.9	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 60 TAHUN KEATAS MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.10	PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.11	PERSENTASE PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.12	PERSENTASE ODGJ BERAT YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.13	PERSENTASE ORANG TERDUGA TBC MENDAPATKAN PELAYANAN TABC SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.14	PERSENTASE ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PELAYANAN DETEKSI DINI HIV SESUAI STANDAR	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1	RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DI WS KEWENANGAN KAB/KOTA	Persen	0%	10%	12%	14%	16%	18%	18%



3.2	RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN SEPANJANG PANTAI RAWAN ABRASI, EROSI, DAN AKRESI YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGAMAN PANTAI DI WS KEWENANGAN KAB/KOTA	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.3	RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI	Persen	92.06%	92.20%	92.34%	92.48%	92.62%	92.76%	92.76%
3.4	PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SPAM JARINGAN PERPIPAAN DAN BUKAN JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI TERHADAP RUMAH TANGGA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA	Persen	7.04%	8.50%	9.96%	11.42%	12.88%	14.34%	14.34%
3.5	PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Persen	2.92%	5.00%	7.08%	9.16%	11.24%	13.32%	13.32%
3.6	RASIO KEPATUHAN IMB KAB/KOTA	Persen	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%
3.7	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN/KOTA	KM	36.97	39.87	42.77	45.67	48.57	51.47	51.47
3.8	RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI	Persen	0.00%	4.00%	8.00%	12.00%	16.00%	20.00%	20.00%
3.9	RASIO PROYEK YANG MENJADI KEWENANGAN PENGAWASAN TANPA KECELAKAAN KONSTRUKSI	Persen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	PERUMAHAN RAKYAT								
4.1	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	KK	0	5	5	5	5	5	25
4.2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK RELOKASI PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	KK	0	5	5	5	5	5	25
4.3	PERENTASE KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIBAWAH 10 Ha DI KABUPATEN/KOTA YANG DITANGANI	Persen	0	5	5	5	5	5	25
4.4	BERKURANGNYA JUMLAH UNIT RTLH [RUMAH TIDAK LAYAK HUNI]	KK	2295	2285	2275	2265	2255	2245	2245



4.5	JUMLAH PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU [PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM]	Unit	0	5	5	5	5	5	25
5	KETENTERANGAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
5.1	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN	Persen	11.76%	15%	20%	25%	30%	35%	35%
5.3	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.4	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.5	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.6	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5.7	WAKTU TANGGAP {RESPON TIME} PENANGANAN KEBAKARAN	Menit	34.4	32	28	25	20	18	18
6	SOSIAL								
6.1	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI [INDIKATOR SPM]	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6.2	PERSENTAS KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								



1	TENAGA KERJA								
1.1	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	Persen	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.2	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	Persen	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
1.3	TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Orang	271	305	305	305	305	305	1525
1.4	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK {PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETANAGAKERJAAN}	Persen	21.97	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73
1.5	PERSENTAS TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN {DALAM DAN LUAR NEGERI} MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA	Persen	58.89	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.1	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	Persen	0.26	10	15	20	25	30	30
2.2	PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT KABUPATEN	Persen	0.002	0.01	0.014	0.016	0.018	0.2	0.2
2.3	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO {PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN}	Persen	4.95	4.9	4.84	4.8	4.75	4.7	4.7
3	PANGAN								
3.1	PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN {TERSEDIAANYA CADANGAN BERAS/ JAGUNG SESUAI KEBUTUHAN}	Persen	92.18	94.79	96.09	97.39	98.7	100	100
4	PERTANAHAN								



4.1	PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DIATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERBITKAN	Persen	0	20	40	60	80	100	100
4.2	PERSENTASE PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	Persen	50	60	70	80	90	100	100
4.3	TERSEDINYA LOKASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL	Persen	0	20	40	60	80	100	100
4.4	TERSEDINYA TANAH PBYEK LANDREFORM (TOL) YANG SIAP DISEDISTRIBUSIKAN YANG BERASAL DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persen	0	20	40	60	80	100	100
4.5	TERSEDINYA TANAH UNTUK MASYARAKAT	Persen	0	20	40	60	80	100	100
4.6	PENANGAN SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	LINGKUNGAN HIDUP								
5.1	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP {IKLH} KAB/KOTA	Indeks	58,3	68,35	70,10	72,30	73,20	74,10	74,10
5.2	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KAB/KOTA	Persen	0.32%	2%	4%	6%	8%	10%	10%
5.3	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persen	100	0	0	0	0	0	0
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
6.1	PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK	Jiwa	81062	83162	83162	83162	90000	92280	92280
6.2	PERSENTASE ANAK USIA 01-7 TAHUN KURANG 1 {SATU} HARI YANG MEMILIKI KIA	Persen	19.28	25	35	45	55	65	65



6.3	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	Jiwa	34878	36278	37778	39378	41078	42878	42878
6.4	JUMLAH OPD YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA KIA	OPD	0	2	2	2	2	2	10
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
7.1	PERSENTASE PENGENTASAN DESA TERTINGGAL	Persen	46.15	40.99	34.02	26.34	17.18	2.56	2.56
7.2	PERSENTASE PENIGNKATAN STATUS DESA MANDIRI	Persen	0	0.85	1.71	2.56	3.42	4.27	4.27
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
8.1	TFR {ANGKA KELAHIRAN TOTAL}	Persen	2.34	2.32	2.3	2.28	2.26	2.24	2.24
8.2	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN {MODERN CONTRACEPTIVE PREWALENCE RATE,MCPR}	Persen	16	16.5	17	17.5	18	18.5	18.5
8.3	PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI {UNMET MEED}	Persen	14.11	14	13.5	13	12.5	11	11
9	PERHUBUNGAN								
9.1	RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN/KOTA	Persen	28.75	29.80	30.85	31.90	32.95	34.00	34.00
9.2	KINERJA LALU LINTAS KABUPATEN/KOTA	Persen	0.00	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	2.80
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
10.1	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH {OPD} YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO	Persen	96.4	98	100	100	100	100	100



10.2	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	Persen	20	30	40	50	60	70	70
10.3	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	58.42	58.42	60	62.50	65	68	68
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
11.1	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	Persen	1.86	2.60	2.79	2.98	3.16	3.35	3.35
11.2	MENINGKATNYA USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRUSAHA	Persen	1.11	1.55	1.67	1.78	1.89	2.00	2.00
12	PENANAMAN MODAL								
12.1	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA	Rp	213,886,157,211	267,357,696,514	334,197,120,642	417,746,400,803	522,183,001,003	652,728,751,254	2,194,212,970,216
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
13.1	TINGKAT PERTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	Persen	0,09	0,095	0,1	0,12	0,14	0,16	0,16
13.2	TINGKAT PERTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	Persen	0,55	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1
13.3	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Jumlah	0	2	3	3	4	4	4
14	STATISTIK								
14.1	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH {OPD} YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persen	95.12	95.12	95.12	97.56	97.56	100	100



14.2	PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persen	63.41	63.41	65.85	65.85	68.29	68.29	68.29
15	PERSANDIAN								
15.1	TINGKAT KECAMATAN INFORMASI PEMERINTAHAN	Persen	0	20	25	30	35	40	40
16	KEBUDAYAAN								
16.1	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	Cagar Budaya	6	2	2	2	2	2	16
17	PERPUSTAKAAN								
17.1	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	Persen	0.00996	1	1.5	2	2.5	3	3
17.2	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	KEARSIPAN								
18.1	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL PASAL 40 DAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN	PERSEN	25	30	35	40	45	50	50
18.2	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN PALAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSEN	0	1	2	3	4	5	5
	URUSAN PILIHAN								
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN								



1.1	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN {TANGKAP DAN BUDIDAYA} KABUPATEN/KOTA	Ton/ Tahun	33.95	34.7	35.5	36.5	37.5	38.5	38.5
2	PARIWISATA								
2.1	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEgara PER KEBANGSAAN	Persen	-28	15	20	25	30	40	40
2.2	PERSENTASE PENINGKATAN PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA YANG DATANG KE KABUPATEN/KOTA	Persen	-41,44	40	45	50	55	60	60
2.3	TINGKAT HUNIAN AKOMODASI	Persen	23,56	30	35	40	45	50	50
2.4	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	Persen	0	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
2.5	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD	Persen	0	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
3	PERTANIAN								
1.1	PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	Ton/Hektar	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.2
		Ton/Hektar	0,554	4	4.2	4.5	4.8	5	5
1.2	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	Persen	N/A	-0.17	-0.20	-0.25	-0.42	-0.57	-0.57
4	PERDAGANGAN								
4.1	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN {IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN}	Persen	3	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.4
4.2	PERSENTASE KINERJA REALISASI PUPUK	Persen	0	40	50	60	70	80	80



4.3	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA {UTTP} BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU	Persen	48	67.2	72	76.8	81.6	86.4	86.4
5	PERINDUSTRIAN								
5.1	PERTAMBAHAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI	Persen	0.67	0.94	1.01	1.07	1.14	1.21	1.21
5.2	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP	Persen	0	0	0	0	0	0	0
5.3	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	Persen	40	56	60	64	68	72	72
5.4	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN PERLUASAN INDUSTRI {IPUI} KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	Persen	0	40	50	60	70	80	80
5.5	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI {IUKI} DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI {IPKI} YANG LOKASINYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	0	40	50	60	70	80	80
5.6	TERSEDIAANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	Persen	0	40	50	60	70	80	80
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN								
1.1	RASIO BELANJA PEGAWAI DI LUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN	Persen	12	13.20	13.86	14.55	16.04	16.04	16.04
1.2	RASIO PAD	Persen	0.57	0.63	0.66	0.69	0.73	0.76	0.76
1.3	MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMEINTAH {SPIP}	Level	1	1	2	3	3	3	3



1.4	PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN {APIP}	Level	2	2	2	3	3	3	3
1.5	RASIO BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM {DIKIRANGI TRANSFER EXPENDITURES}	Persen	48.89	53.78	56.47	59.29	62.26	65.37	65.37
1.6	OPINI LAPORAN KEUANGAN	Opini	WTP						
2	PENGADAAN								
1.1	PERSENTASE JUMLAH TOTAL PROYEK KONSTRUKSI YANG DIBAWA KE TAHUN BERIKUTNYA. YANG DITANDATANGANI PADA KUARTAL PERTAMA	Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2	PERSENTASE JUMLAH PENGADAAN YANG DILAKUKAN DENGAN METODE KOMPETITIF	Persen	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%
1.3	RASIO NILAI BELANJAYANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN	Persen	29%	30%	31%	32%	34%	35%	35%
3	KEPEGAWAIAN								
3.1	RASIO PEGAWAI PENDIDIKAN TINGGI DAN MENENGAH/DASAR {%} PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN	Persen	562.13%	603.77%	651.01%	677.08%	697.84%	727.61%	727.61%
3.2	RASIO PEGAWAI FUNSIONAL {%} PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN	Persen	6.34%	33.04%	40.18%	49.11%	53.57%	66.96%	66.96%
3.3	RASIO JABATAN FUNSIONAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI {%} PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN	Persen	69%	27.03%	33.33%	54.55%	66.67%	73.33%	73.33%
4	MANAJEMEN KEUANGAN								
4.1	DEVIASI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA TOTAL DALAM APBD	Persen	-7.55	-8.31	-8.72	-9.16	-9.61	-10.09	-10.09



4.2	DEVIASI REALISASI PAD TERHADAP ANGGARAN PAD DALAM APBD	Persen	-0.24	-0.26	-0.28	-0.29	-0.31	-0.32	-0.32
4.3	MANAJEMEN ASET	Ya/Tdk	YA						
4.4	RASIO ANGGARAN SISA TERHADAP TOTAL BELANJA DALAM APBD TAHUN SEBELUMNYA	Persen	6,22	6.84	7.18	7.54	7.92	8.32	8.32
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
5.1	INFORMASI TENTANG SUMBER DAYA YANG TERSEDIA UNTUK PELAYANAN	Persen	50	100	100	100	100	100	100
5.2	AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI KEUANGAN DAERAH	Persen	50	100	100	100	100	100	100



BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan, dan program kepala daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat selama lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Akademisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat, menuju Kabupaten Kolaka Timur yang Sejahtera Bersama Masyarakat Kolaka Timur Yang Agamis, Maju Mandiri Dan Berkeadilan.

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Hj. ANDI MERYA, S.Ip

